

LAPORAN TRIWULANAN
TRIWULAN I - 2016

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui
www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 29600000
fax. (021) 386 6032

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan bimbinganNya, OJK senantiasa terus meningkatkan kinerjanya dalam mengemban tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Di triwulan I-2016, pemulihan ekonomi global terus berlanjut meski dengan laju yang lambat dan tidak merata. Perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS) tidak sesolid sebelumnya dengan kemungkinan laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat. Tingkat inflasi yang masih rendah dan prospek perekonomian yang melemah di Eropa dan Jepang mendorong dilakukannya pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank of Japan (BoJ) melalui penerapan kebijakan suku bunga negatif. Sementara itu, perlambatan ekonomi di Tiongkok terus berlanjut ditandai dengan penurunan cadangan devisa Tiongkok serta pelemahan Chinese Yuan (CNY) yang mendorong People's Bank of China (PBoC) menurunkan rasio giro wajib minimum dengan tujuan menambah likuiditas dalam rangka mendorong perekonomian yang melambat.

Terbatasnya konsumsi pemerintah dan investasi, terjadinya kontraksi di sektor pertambangan akibat rendahnya harga komoditas, serta pergeseran musim panen raya sebagai dampak *el nino*, merupakan beberapa hal yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2016 tercatat sebesar 4,92% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (5,04%). Sementara itu, pasar keuangan domestik bergerak menguat seiring berlanjutnya aliran masuk modal asing. Hal ini merupakan imbas dari sentimen positif global terkait berkurangnya ketidakpastian di pasar keuangan, yang disebabkan kenaikan *Fed Funds Rate* yang lebih lambat dan penerapan suku bunga negatif di Eropa dan Jepang. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan IHSG, yang diikuti oleh posisi *net buy* investor nonresiden. Sejalan dengan positifnya pertumbuhan IHSG, pasar SBN juga mengalami penguatan dimana imbal hasil (*yield*) menurun dan memicu aksi beli investor nonresiden dengan posisi *net buy*.

Kondisi perekonomian domestik mempengaruhi pertumbuhan industri perbankan dimana terjadi

Kata Pengantar

penurunan pertumbuhan aset dan kredit Bank Umum Konvensional (BUK) masing-masing sebesar 0,18% (*qtq*) dan 2,25% (*qtq*). Meskipun demikian, kondisi permodalan BUK mengalami peningkatan, terlihat dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang relatif tinggi sebesar 21,93%. Pada industri Pasar Modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 4.845,37 atau meningkat sebesar 5,49% dibanding triwulan sebelumnya. Nilai kapitalisasi pasar saham juga meningkat sebesar 5,56% menjadi Rp5.143,45 triliun. Membaiknya kondisi ekonomi makro serta IHSG memberi dampak positif bagi kinerja Reksa Dana, terlihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang meningkat 7,85% menjadi sebesar Rp293,31 triliun. Sementara itu, Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) bergerak positif dimana total aset IKNB naik 3,6% menjadi Rp1.695,71 triliun.

Di bidang pengaturan, OJK menerbitkan 19 peraturan OJK (POJK) untuk memperkuat sektor jasa keuangan dimana delapan POJK merupakan konversi peraturan Bank Indonesia (PBI)

menjadi POJK, serta lima POJK yang merupakan konversi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) menjadi POJK. Peraturan yang diterbitkan terdiri dari 12 POJK yang mengatur sektor Perbankan, satu POJK yang mengatur sektor Pasar Modal, dan enam POJK yang mengatur sektor IKNB. Di bidang pengawasan, beberapa kegiatan strategis dilakukan dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan antara lain peluncuran *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia (GMRA Indonesia) sebagai upaya pengembangan dan pendalaman pasar, peluncuran Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK Proksi) dalam rangka pengembangan dan peningkatan peran keuangan mikro serta inklusi keuangan bagi masyarakat, serta pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) untuk mendukung pembiayaan beberapa sektor ekonomi seperti Pokja Pengembangan Pertanian Organik, Pokja Program Pembiayaan Perumahan Sederhana dan Pokja Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif.

Di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK berupaya meningkatkan inklusi keuangan

melalui program-program strategis antara lain peresmian Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU) di Solo, peluncuran SimPel/SimPel iB di Papua serta pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tiga provinsi. Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen, OJK melaksanakan *Thematic Surveillance* dan Operasi Intelijen Pasar di 3 kota dan membentuk *Working Group* Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam rangka pengembangan kapasitas manajemen internal, OJK berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pengembangan kompetensi, penyempurnaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang operasional. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK melaksanakan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengawasan sektor jasa keuangan melalui pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi (*Bancaassurance*), Sistem Informasi *Banking Surveillance*

Dashboard (BSD), dan Sistem Informasi Pelaporan Perkembangan Penyelenggaraan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para pegawai yang telah menjalankan tugas dengan baik dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai strategis institusi. OJK akan selalu berupaya memperbaiki kinerjanya dalam rangka mendorong peningkatan layanan sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen, serta senantiasa terus meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah, DPR dan lembaga terkait, untuk mewujudkan industri keuangan nasional yang kontributif, stabil dan inklusif.

**Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**



Muliaman D. Hadad, Ph.D

DAFTAR ISI

iii	KATA PENGANTAR
vi	DAFTAR ISI
viii	DAFTAR TABEL
IX	DAFTAR GRAFIK
x	DAFTAR GAMBAR
xi	RINGKASAN EKSEKUTIF
01	BAB I. TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
03	1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA
03	1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global
05	1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik
07	1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan
08	1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN
08	1.2.1 Perkembangan Bank Umum
09	1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
10	1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
11	1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif
12	1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
12	1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek
14	1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek
15	1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi
16	1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
18	1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
20	1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
21	1.4.1 Perkembangan Industri Asuransi dan BPJS
22	1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun
23	1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan
24	1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura
26	1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
26	1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus
28	1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB
29	1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro
31	BAB II. TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN
33	2.1 AKTIVITAS PENGATURAN
33	2.1.1 Pengaturan Terintegrasi
33	2.1.2 Pengaturan Bank
36	2.1.3 Pengaturan Pasar Modal
36	2.1.4 Pengaturan IKNB
37	2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN
37	2.2.1 Pengawasan Perbankan
42	2.2.2 Pengawasan Pasar Modal
48	2.2.3 Pengawasan IKNB
55	2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN
55	2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan
58	2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal
61	2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank
62	2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN
62	2.4.1 Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan
63	2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
63	2.5.1 Inklusi Keuangan
65	2.5.2 Edukasi dan Literasi Keuangan
67	2.5.3 Pengaturan dan Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan
69	2.5.4 Perlindungan Konsumen
72	2.5.5 <i>Market Conduct</i>
77	2.5.6 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
75	2.5.7 Pengaturan dan Pengembangan Perlindungan Konsumen

2.6	PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAAN PENDANAAN TERORISME	76
2.6.1	Penyidikan Sektor Jasa Keuangan	76
2.6.2	Penangan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	77
2.7	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	78
2.7.1	Kerjasama Domestik	78
2.7.2	Kerjasama Internasional	79
2.7.3	Isu-Isu Internasional	81
2.8	HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER	83
BAB III.	TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	85
3.1	TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH	87
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	87
3.1.2	Perkembangan Pasar Modal Syariah	88
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	91
3.2	PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	93
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	93
3.2.2	Pengaturan Pasar Modal Syariah	94
3.2.3	Pengaturan IKNB Syariah	94
3.3	PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	94
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	94
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	96
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	96
3.4	PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	96
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	96
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	98
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	99
BAB IV.	MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI	101
4.1	MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK	103
4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	103
4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	104
4.1.3	Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK	105
4.2	AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS	105
4.3	RAPAT DEWAN KOMISIONER	107
4.4	KOMUNIKASI	108
4.4.1	Komunikasi Informasi OJK	108
4.4.2	Kunjungan Instansi	110
4.4.3	Penghargaan	111
4.5	KEUANGAN	112
4.5.1	Anggaran dan Penggunaan	112
4.5.2	Pengembangan Sistem Keuangan Internal	112
4.6	SISTEM INFORMASI	112
4.6.1	Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	112
4.6.2	Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi	113
4.7	LOGISTIK	113
4.7.1	Penyiapan Gedung Kantor Pusat	113
4.7.2	Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK	114
4.7.3	Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik	114
4.8	SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI	114
4.8.1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan	114
4.8.2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	115
4.8.3	Pengembangan Organisasi	115
4.9	OJK INSTITUTE	116
4.9.1	Program Pengembangan Kepemimpinan	116
4.9.2	Program Pengembangan Kompetensi	117
4.9.3	Program Pendidikan Formal	117
4.9.4	Program Asesmen	117
4.10	MANAJEMEN PERUBAHAN	117

DAFTAR TABEL

05	Tabel I.1	Penurunan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global
08	Tabel I.2	Kondisi Umum Perbankan Konvensional
09	Tabel I.3	Kondisi Umum BPR
10	Tabel I.4	Konsentrasi Penyaluran UMKM
11	Tabel I.5	Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank (dalam miliar rupiah)
12	Tabel I.6	Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)
13	Tabel I.7	Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham
14	Tabel I.8	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang
14	Tabel I.9	Jumlah Perusahaan Efek
14	Tabel I.10	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat
15	Tabel I.11	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
15	Tabel I.12	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana
15	Tabel I.13	Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya
16	Tabel I.14	Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif
16	Tabel I.15	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin
17	Tabel I.16	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)
17	Tabel I.17	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
17	Tabel I.18	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas
18	Tabel I.19	Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
18	Tabel I.20	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal
19	Tabel I.21	Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori <i>Investment Grade</i> Dan <i>Non-Investment Grade</i>
20	Tabel I.22	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal
20	Tabel I.23	Kegiatan Pendidikan Terkait Akuntan
20	Tabel I.24	Kegiatan Pendidikan Terkait Konsultan Hukum
20	Tabel I.25	Total Aset IKNB (dalam Triliun Rupiah)
21	Tabel I.26	Indikator Perusahaan Perasuransian
22	Tabel I.27	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian
22	Tabel I.28	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun Periode Triwulan I 2015 s.d. Triwulan I 2016
22	Tabel I.29	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Periode Triwulan I 2015 s.d. Triwulan I 2016
23	Tabel I.30	Portofolio Investasi Dana Pensiun Periode Triwulan I 2015 s.d. Triwulan I-2016
23	Tabel I.31	Jumlah Dana Pensiun
28	Tabel I.32	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB (dalam Triliun Rupiah)
29	Tabel I.33	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB
29	Tabel I.34	Jumlah LKM
29	Tabel I.35	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (dalam Miliar Rupiah)
34	Tabel II.1	Kelompok BPR berdasarkan Modal Inti (BPRKU)
37	Tabel II.2	Pemeriksaan Bank Umum
38	Tabel II.3	Pemeriksaan Khusus Bank
38	Tabel II.4	Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan I-2016
39	Tabel II.5	Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2016
40	Tabel II.6	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi
40	Tabel II.7	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor
41	Tabel II.8	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional
41	Tabel II.9	FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Selama Triwulan I-2016
42	Tabel II.10	Perizinan BPR
42	Tabel II.11	Daftar Hasil <i>Fit and Proper Test New Entry</i> BPR
50	Tabel II.12	Rekapitulasi Kegiatan Perizinan di Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan I-2016
50	Tabel II.13	Pemberian Izin Usaha
50	Tabel II.14	Pencabutan Izin Usaha
50	Tabel II.15	Pemberian Izin Perubahan Nama Perusahaan
51	Tabel II.16	Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) selama Triwulan I-2016
51	Tabel II.17	Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha
52	Tabel II.18	Rincian Permohonan Perizinan Kelembagaan IKNB
52	Tabel II.19	Rincian Kegiatan <i>Fit and Proper Test</i> untuk Setiap Sektor di IKNB
52	Tabel II.20	Rincian Penetapan Kelulusan Berdasarkan Pihak Utama dan Sektor IKNB
52	Tabel II.21	Rincian Kegiatan Terkait Pencatatan, Pelaporan, dan Persetujuan Produk Asuransi

Tabel II.22	Rincian Permohonan Izin Usaha	53
Tabel II.23	Rincian Pencabutan Izin Usaha	53
Tabel II.24	Penyelesaian Pencabutan Izin Usaha	53
Tabel II.25	Rincian Kegiatan Terkait Perubahan Kepemilikan Perusahaan, Perubahan Modal, dan Perubahan Nama	54
Tabel II.26	Rincian Kegiatan Terkait Kantor Cabang Dan Kantor Pemasaran Perusahaan Asuransi Serta Kantor Selain Kantor Cabang Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus	55
Tabel II.27	Total Aset Konglomerasi	57
Tabel II.28	Penerimaan Layanan Triwulan 1 - 2016	71
Tabel II.29	Domisili Pelapor Layanan Triwulan I-2016	71
Tabel II.30	Penilaian Stabilitas dan Pengembangan Sistem Keuangan dalam FSAP	81
Tabel II.31	<i>Technical Compliance Rating / TCR*</i>)	82
Tabel II.32	<i>Effectiveness Rating/ER</i>	82
Tabel III.1	Indikator Perbankan Syariah	88
Tabel III.2	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (dalam jutaan rupiah)	89
Tabel III.3	Perkembangan Indeks Saham Syariah	89
Tabel III.4	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	89
Tabel III.5	Perkembangan Reksa Dana Syariah	90
Tabel III.6	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara <i>Outstanding</i>	91
Tabel III.7	Aset IKNB Syariah (dalam triliun rupiah)	91
Tabel III.8	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun Rp)	92
Tabel III.9	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar rupiah)	93
Tabel III.10	Permohonana Perbankan Syariah	95
Tabel IV.1	Judul Siaran Pers Triwulan I-2016	109
Tabel IV.2	Jumpa Pers Triwulan I-2016	110
Tabel IV.3	Media <i>Gathering</i> , <i>Focus Group Discussion</i> , dan Pelatihan Jurnalistik Triwulan I-2016	110
Tabel IV.4	Kunjungan Instansi Triwulan I-2016	111

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Inflasi Amerika Serikat	03
Grafik I.2	Tingkat Inflasi Zona Euro	04
Grafik I.3	Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok	04
Grafik I.4	Perkembangan Harga Minyak Dunia	04
Grafik I.5	Kinerja Ekspor Beberapa Negara EM	05
Grafik I.6	Pertumbuhan Ekonomi	05
Grafik I.7	Tingkat Inflasi	06
Grafik I.8	Neraca Perdagangan Indonesia	06
Grafik I.9	Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah	06
Grafik I.10	Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional	07
Grafik I.11	Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional	07
Grafik I.12	Perkembangan <i>Yield</i> SBN	08
Grafik I.13	Perkembangan Likuiditas Perbankan	09
Grafik I.14	Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah	11
Grafik I.15	Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar	11
Grafik I.16	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (%)	12
Grafik I.17	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (ytd)	13
Grafik I.18	Perkembangan Indeks Industri	13
Grafik I.19	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	13
Grafik I.20	Perkembangan IHSG dan Net Asing	14
Grafik I.21	<i>Indonesia Government Securities Yield Curve</i> (IBPA-IGSYC)	14
Grafik I.22	Laporan Penggunaan Dana	18
Grafik I.23	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan I-2016	19
Grafik I.24	<i>Market Share Company Rating</i> Triwulan I-2016	19

21	Grafik I.25	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan I-2016
23	Grafik I.26	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan I-2016
23	Grafik I.27	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (Triliun Rupiah)
24	Grafik I.28	Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam Triliun Rupiah)
25	Grafik I.29	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam Triliun Rupiah)
25	Grafik I.30	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal (dalam Triliun Rupiah)
25	Grafik I.31	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (dalam Triliun Rupiah)
26	Grafik I.32	Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas (Triliun Rupiah)
26	Grafik I.33	Pertumbuhan Aset LJK (dalam triliun Rupiah)
26	Grafik I.34	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan (dalam Triliun Rupiah)
27	Grafik I.35	<i>Outstanding</i> Penjaminan (dalam Triliun Rupiah)
27	Grafik I.36	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam triliun Rupiah)
27	Grafik I.37	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam triliun Rupiah)
27	Grafik I.38	<i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (dalam triliun Rupiah)
28	Grafik I.39	Pertumbuhan Aset SMF (dalam triliun Rupiah)
28	Grafik I.40	Pertumbuhan Aset PT Pegadaian (dalam triliun Rupiah)
28	Grafik I.41	<i>Outstanding</i> Pinjaman PT Pegadaian (Persero) (dalam triliun Rupiah)
39	Grafik II.1	Wilayah Penyebaran Agen LAKU PANDAI Triwulan I-2016
39	Grafik II.2	Sebaran Jenis Dugaan Tipibank Periode Triwulan I-2016
39	Grafik II.3	Pelaku Dugaan Tipibank Periode Triwulan I-2016
41	Grafik II.4	Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia
42	Grafik II.5	Jaringan Kantor BPR
45	Grafik II.6	Penyampaian LKT-2015
45	Grafik II.7	Penyampaian LT-2015
46	Grafik II.8	Perubahan Data dan Informasi Profesi Penunjang Pasar Modal
52	Grafik II.9	Penyelesaian Permohonan Produk Asuransi Triwulan I-2016
57	Grafik II.10	Jenis Konglomerasi Keuangan
57	Grafik II.11	<i>Trend</i> Total Aset Konglomerasi Keuangan (dalam triliun rupiah)
57	Grafik II.12	Perbandingan Konglomerasi Keuangan dengan SJK (dalam triliun rupiah)
62	Grafik II.13	IHSG dan Arus Modal Nonresiden di Pasar Saham
70	Grafik II.14	Layanan Per Sektor
70	Grafik II.15	Kanal Layanan
71	Grafik II.16	Layanan Berdasarkan satuan Kerja yang Menerima dan Melakukan Pencatatan
71	Grafik II.17	Tingkat Penyelesaian Akumulatif s.d. Triwulan I-2016
73	Grafik II.18	Jumlah Pelanggaran Iklan Berdasarkan Jenis Produk
73	Grafik II.19	Jumlah Pelanggaran Iklan Berdasarkan Bulan
89	Grafik III.1	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia
90	Grafik III.2	Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi Dan Sukuk Korporasi <i>Outstanding</i>
90	Grafik III.3	Perbandingan Jumlah Sukuk <i>Outstanding</i>
90	Grafik III.4	Perbandingan Nilai Sukuk <i>Outstanding</i>
91	Grafik III.5	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah
91	Grafik III.6	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>
92	Grafik III.7	Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan I-2016
103	Grafik IV.1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)
108	Grafik IV.2	Statistik Pengunjung Website OJK
109	Grafik IV.3	<i>Tone</i> Pemberitaan Triwulan I-2016
112	Grafik IV.4	Realisasi Anggaran

DAFTAR GAMBAR

64	Gambar II.1	<i>Launching</i> SimPel/SimPel iB Bank Papua
64	Gambar II.2	Laku Mikro
111	Gambar IV.1	Piagam Penghargaan <i>The 1st PR INDONESIA Media Relations Awards & Summit (PRIMAS) 2016</i>

Ringkasan
Eksekutif



Ringkasan Eksekutif

TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA

Pemulihan ekonomi global triwulan I-2016 berlanjut meski dengan laju yang lambat dan tidak merata. Perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS) tidak sesolid sebelumnya dengan kemungkinan laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat. Inflasi AS berada pada level yang rendah dan didukung indikator ketenagakerjaan serta kinerja ekspor-impor-manufaktur yang melemah.

Tingkat inflasi yang rendah dan prospek perekonomian yang melemah di Eropa dan Jepang mendorong pelonggaran kebijakan moneter. Bank Sentral Eropa (ECB) melonggarkan kebijakan moneternya melalui kebijakan suku bunga negatif dan meningkatkan program pembelian aset (QE). Bank of Japan (BoJ) juga melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga simpanan ke level negatif 0,1% dan mempertahankan program pembelian aset senilai JPY80 triliun per tahun.

Perlambatan di Tiongkok terus berlanjut dengan kinerja eksternal yang melemah. Cadangan devisa Tiongkok juga menurun seiring kinerja ekspor-impor yang terus tertekan serta CNY

yang mengalami pelemahan. Merespon perkembangan ini, People's Bank of China (PBoC) menurunkan rasio giro wajib minimum sebesar 50 *basis point* menjadi 17% dengan tujuan menambah likuiditas dalam rangka mendorong perekonomian yang melambat

Pertumbuhan ekonomi domestik triwulan I-2016 sebesar 4,92% *yoy* lebih rendah dari triwulan sebelumnya seiring masih terbatasnya pertumbuhan konsumsi Pemerintah dan investasi. Turunnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2016 disebabkan kontraksi di sektor pertambangan terkait rendahnya harga komoditas dan pergeseran musim panen raya ke triwulan II-2016 sebagai dampak *El Nino*. Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga tercermin dari melambatnya pertumbuhan kredit dan realisasi penyerapan APBN triwulan I-2016 yang masih terbatas. Sementara itu, tingkat inflasi secara keseluruhan terpantau meningkat dengan inflasi inti yang masih rendah. Secara *yoy*, inflasi Indonesia berada pada level 4,45%. Persepsi risiko dan prospek perekonomian domestik semakin membaik seiring penurunan *BI Rate* dan Paket Kebijakan

TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

Ekonomi Pemerintah. Selama triwulan I-2016 Pemerintah mengeluarkan tiga paket kebijakan ekonomi lanjutan dalam rangka memperbaiki iklim investasi dalam negeri.

Pasar keuangan domestik bergerak menguat seiring berlanjutnya aliran masuk modal asing sebagai imbas sentimen positif global terkait berkurangnya ketidakpastian di pasar keuangan global akibat kemungkinan laju kenaikan *Fed Funds Rate* yang lebih lambat dan penerapan suku bunga negatif di Eropa dan Jepang. Sentimen ini mendorong perbaikan persepsi risiko *emerging markets* sehingga investor mulai mengalihkan dananya dari *safe heaven* ke aset-aset *emerging markets* yang lebih beresiko. Pada triwulan I-2016, IHSG mencatat pertumbuhan sebesar 5,49% *qta* yang diikuti oleh *net buy* nonresiden sebesar Rp4,2 triliun (triwulan IV-2015: *net sell* Rp9,4 triliun). Sejalan dengan positifnya pertumbuhan IHSG, pasar SBN juga mengalami penguatan. Imbal hasil (*yield*) menurun rata-rata sebesar 101 *basis point* yang memicu aksi beli investor nonresiden dimana tercatat *net buy* nonresiden sebesar Rp36,5 triliun (triwulan IV-2015: *Net buy* Rp35,1 triliun).

Untuk mendukung terwujudnya misi OJK yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, selama periode laporan OJK telah melakukan beberapa inisiatif antara lain :

1. Peluncuran Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK Proksi) sebagai pusat pengembangan keuangan mikro dan inklusi keuangan di Indonesia. Peluncuran OJK Proksi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi diantara lembaga-lembaga pemerintah, menyediakan forum pembelajaran bagi para pemangku kepentingan dan sebagai pusat pembelajaran bagi penyusunan kebijakan mengenai keuangan mikro dan keuangan inklusif.
2. Peluncuran *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia (GMRA Indonesia) sebagai upaya pengembangan dan pendalaman pasar. Peluncuran ini disertai acara penandatanganan perjanjian Transaksi Repo menggunakan GMRA Indonesia oleh empat bank nasional.

3. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Program Pembiayaan Perumahan Sederhana dan Pembiayaan Ekonomi Kreatif untuk mendukung program satu juta rumah pemerintah dan meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM
4. Peresmian Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU) di Solo untuk memperkuat infrastruktur yang mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
5. Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tiga provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Pembentukan TPAKD ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan produk keuangan seperti kredit usaha berskala mikro atau tabungan untuk berinvestasi dalam bentuk aset produktif.
6. Terkait dengan pengawasan *Market Conduct*, OJK melakukan *Thematic Surveillance* dan Operasi Intelijen Pasar di tiga kota yaitu Jakarta, Yogyakarta dan Semarang dengan cakupan kegiatan memetakan perlindungan konsumen terkait dengan gadai swasta mulai dari tahapan *pre sales* hingga *after sales*.

Selain melakukan pengaturan, pengawasan serta edukasi dan perlindungan konsumen, OJK juga melakukan hubungan kelembagaan domestik antara lain penandatanganan Nota kesepahaman dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bank Indonesia dan Mahkamah

Agung, Nahdlatul Ulama serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait dengan kerja sama hubungan internasional, OJK melakukan penandatanganan *Letter of Intent (LOI)* dengan Bank of Thailand, penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Bank Sentral Timor Leste -Banco Central de Timor-Leste (BCTL). Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas kemampuan pegawai OJK dan industri jasa keuangan Indonesia, OJK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Australian Centre for Financial Studies - Monash University dan Pemerintah Negara Bagian Victoria.

Dalam rangka memperkuat kapasitas organisasi dan mendukung pelaksanaan Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) serta untuk membantu melakukan *alignment* antara Sasaran Strategis OJK dengan risiko yang dihadapi dalam mencapai sasaran tersebut, OJK melakukan pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) untuk menyelaraskan Sasaran Strategis dengan profil risiko organisasi. Selain itu, OJK juga mengembangkan beberapa sistem informasi antara lain Sistem Perizinan Terintegrasi (*Bancaassurance*), Sistem Informasi *Banking Surveillance Dashboard (BSD)*, dan Sistem Informasi Pelaporan Perkembangan Penyelenggaraan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada media di daerah terhadap perkembangan sektor keuangan dan berbagai aspek kebijakan di sektor keuangan, OJK menyelenggarakan 27 siaran pers dan menyelenggarakan tujuh Jumpa pers serta tiga *media gathering*. Selain itu, OJK juga menerima 16 kunjungan instansi dengan total 1.075 peserta. Ulasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK dalam mewujudkan Visi OJK selama triwulan I-2016 dijabarkan di dalam buku Laporan Triwulanan I-2016.

Tinjauan industri Sektor Jasa Keuangan

Total Aset IKNB
naik
3,6% (qtq)

NAB Reksa Dana
meningkat
7,85%
&
IHSG meningkat
5,49%

Dana Pihak Ketiga
(DPK) meningkat
0,6%
Ratio kecukupan modal
(**Capital Adequacy
Ratio/CAR**) Bank Umum
Konvensional masih tinggi
sebesar **21,93%**

OJK menerbitkan
19 POJK
terkait Pengawasan
Perbankan, Pengawasan
Pasar Modal dan
Pengawasan IKNB

Selama triwulan I-2016
terdapat **11** Penawaran
Umum
dengan total
nilai Emisi **Rp17,1
triliun(ytd)**

Tinjauan industri Sektor Jasa Keuangan Syariah

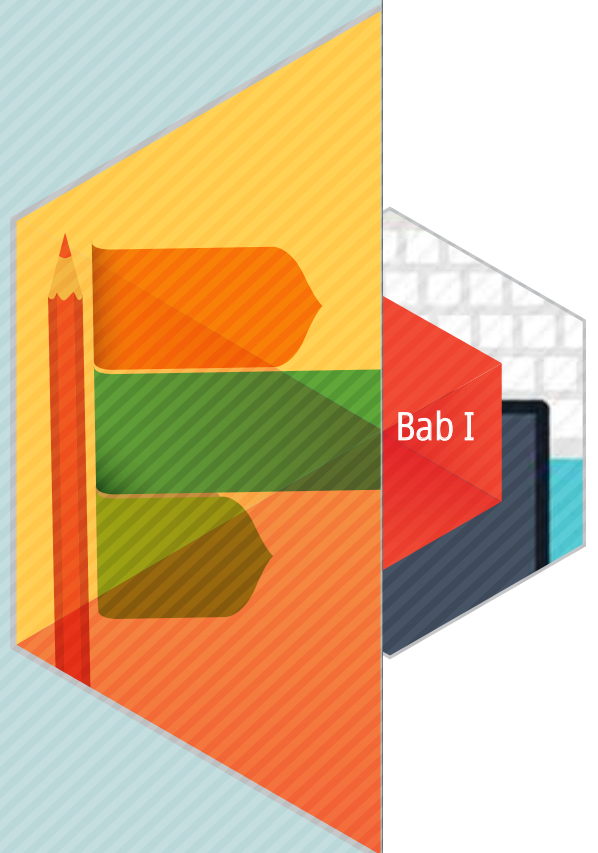
Total Reksa
Dana Syariah
meningkat
6,5% (qtq)

Pada triwulan
I-2016, OJK
mengeluarkan
dua POJK yang
mengatur SJK
Syariah

Dana Pihak Ketiga
(DPK) mengalami
pertumbuhan **0,3%**
dan Biaya Operasional
terhadap Pendapatan
Operasional (BOPO)
Menurun **3,4%**

Aset IKNB
Syariah
mengalami
kenaikan sebesar
10,1% (qtq)

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan



Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan

I

1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

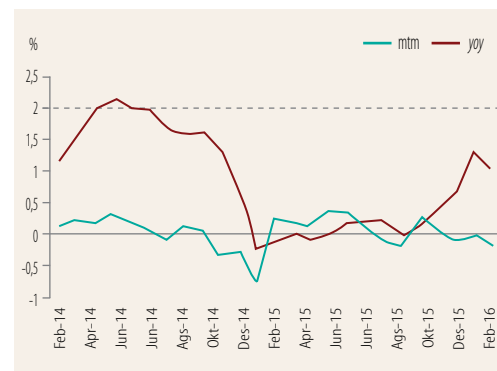
1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Pemulihan ekonomi global triwulan I-2016 berlanjut meski dengan laju yang lambat dan tidak merata. Perbaikan ekonomi Amerika Serikat tidak sesolid sebelumnya dengan kemungkinan laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat. Pelonggaran kebijakan moneter terus berlanjut di Eropa dan Jepang seiring tingkat inflasi yang masih rendah dan prospek perekonomian yang melemah. Di Tiongkok, perlambatan terus berlanjut dengan kinerja eksternal yang semakin melemah. Selama periode laporan, harga minyak mulai rebound didukung wacana pembatasan produksi.

Sepanjang triwulan I-2016, kinerja ekonomi Amerika Serikat tidak sesolid sebelumnya tercermin dari berbagai indikator yang menunjukkan pelemahan. Inflasi masih berada pada level yang rendah, dengan arah tren pergerakan yang belum stabil. Indikator ketenagakerjaan secara umum melemah. Sejalan kinerja ekspor-impor yang melemah, kinerja manufaktur juga mencatatkan pelemahan. The Fed merespons perkembangan ini dengan mempertahankan *Fed Funds Rate* pada level 0,25-0,50%. Dengan melihat perkembangan

domestik yang kurang menggembirakan serta ketidakpastian ekonomi global, diperkirakan laju peningkatan *Fed Funds Rate* akan lebih lambat.

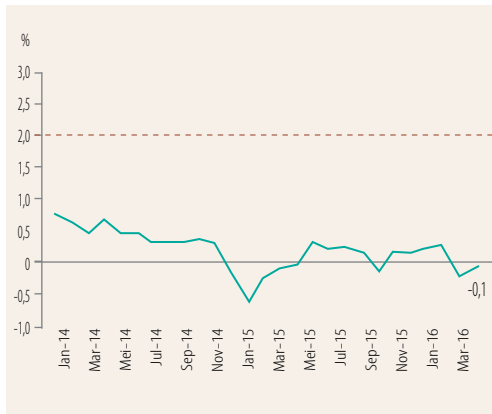
Grafik I - 1 Inflasi Amerika Serikat



Di sisi lain, ekonomi zona Euro belum mengalami pemulihan yang cukup signifikan bahkan cenderung stagnan dan belum terlihat perbaikan yang berarti, meski *quantitative easing* terus digulirkan. Isu Brexit semakin menambah ketidakpastian ekonomi Eropa terkait potensi pelemahan perekonomian dan meningkatnya volatilitas pasar keuangan. Pesimisme ekonomi Eropa juga didukung oleh deflasi yang terus berlanjut dalam dua bulan terakhir pada triwulan I-2016 serta kinerja ekspor yang masih melambat. Selama periode laporan,

ECB merespons perkembangan ini dengan kembali melonggarkan kebijakan moneternya melalui kebijakan suku bunga negatif dan meningkatkan program pembelian aset (QE).

Grafik I - 2 Tingkat Inflasi Zona Euro

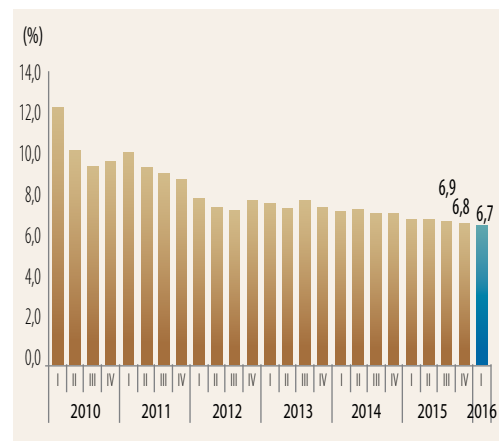


Di Jepang, sebagai respons terhadap tingkat inflasi yang rendah dan penurunan harga komoditas, Bank of Japan (BoJ) memutuskan melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga simpanan ke level negatif 0,10% dan mempertahankan program pembelian aset senilai JPY80 triliun per tahun. Keputusan BoJ dilatarbelakangi oleh kinerja ekonomi Jepang yang masih berkontraksi seiring melemahnya sektor manufaktur dan kondisi bisnis secara keseluruhan.

Sementara itu, perekonomian Tiongkok terus melambat yang tercermin dari perlambatan pertumbuhan menjadi 6,7% yoy pada triwulan I-2016. Selain itu, cadangan devisa Tiongkok terus menurun seiring kinerja ekspor-impor yang terus tertekan serta CNY yang mengalami pelemahan. Meski indikator *Purchasing Manager Index (PMI)* untuk pertama kalinya memasuki zona ekspansi pada akhir triwulan I-2016, namun kinerja manufaktur secara keseluruhan relatif masih lemah. Berbagai stimulus yang dikeluarkan otoritas belum mampu mendorong perbaikan yang signifikan. Perlambatan Tiongkok menjadi salah satu risiko utama yang diwaspadai berdampak terhadap kinerja eksternal *emerging markets*. Tren perlambatan Tiongkok ini mendorong Moody's menurunkan

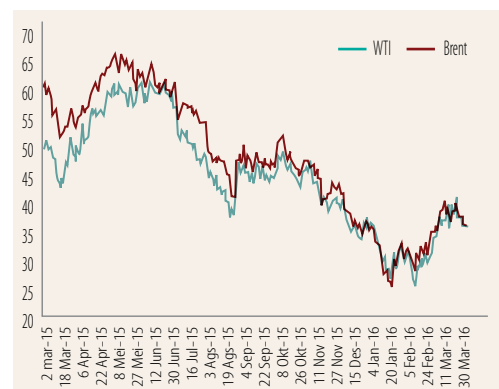
outlook sovereign rating Tiongkok dari stabil menjadi negatif. Merespon perkembangan ini, People's Bank of China (PBoC) menurunkan rasio giro wajib minimum sebesar 50 *basis point* menjadi 17% dengan tujuan menambah likuiditas dalam rangka mendorong perekonomian yang melambat.

Grafik I - 3 Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok



Memasuki awal 2016, harga minyak masih melanjutkan penurunan seiring dengan banyaknya *supply* di tengah permintaan yang terus menurun. *Rebound* harga minyak terjadi pada pertengahan triwulan I-2016 yang didorong rencana pertemuan empat produsen minyak terbesar untuk melakukan pembatasan produksi. Sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat, harga minyak diperkirakan masih berfluktuasi dan akan berada pada level rendah hingga beberapa tahun yang akan datang.

Grafik I - 4 Perkembangan Harga Minyak Dunia



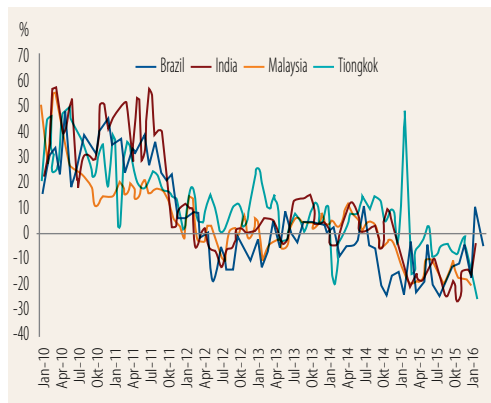
Perkembangan ekonomi global mendorong beberapa lembaga multilateral seperti OECD, IMF dan Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan global 2016 dan 2017.

Tabel I - 1 Penurunan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

Lembaga Multilateral	2016		2017	
	awal	revisi	awal	revisi
OECD	3,3%	3,0%	3,6%	3,3%
IMF	3,6%	3,4%	3,8%	3,6%
Bank Dunia	3,3%	2,9%	3,2%	3,1%

Selain penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi, lembaga pemeringkat juga menurunkan peringkat atau *outlook* beberapa *emerging markets (EM)* yang didorong oleh masih tertekannya kinerja ekspor negara-negara EM. Hal ini turut dipengaruhi penurunan harga komoditas dan masih lemahnya permintaan Tiongkok sebagai mitra dagang utama negara-negara EM.

Grafik I - 5 Kinerja Ekspor Beberapa Negara EM



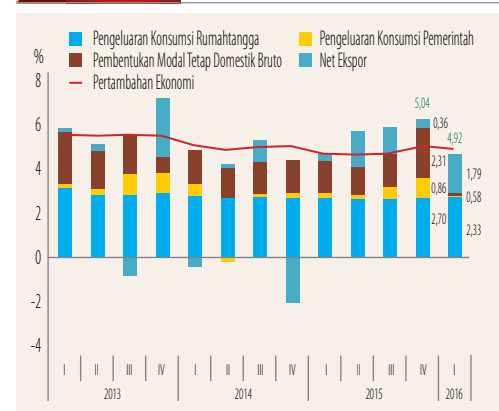
1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Pertumbuhan ekonomi domestik pada periode laporan lebih rendah dari periode sebelumnya seiring terbatasnya pertumbuhan konsumsi Pemerintah dan investasi. Tingkat inflasi secara keseluruhan terpantau meningkat dengan inflasi inti yang masih rendah. Kinerja eksternal terpantau masih lemah dan perbaikan sektor riil belum solid.

Persepsi risiko dan prospek perekonomian domestik membaik seiring penurunan BI Rate dan Paket kebijakan Ekonomi Pemerintah. Selama triwulan I-2016 Pemerintah telah mengeluarkan tiga paket kebijakan ekonomi lanjutan dalam rangka memperbaiki iklim investasi dalam negeri.

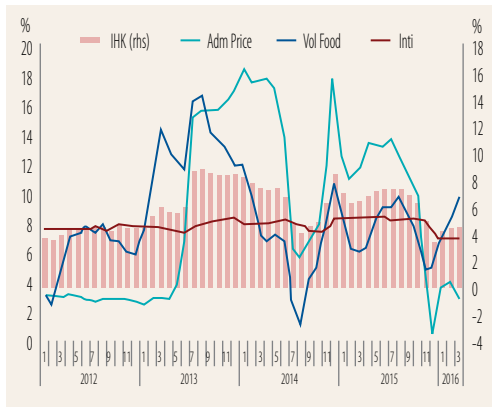
Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2016 sebesar 4,92% yoy, lebih rendah dari triwulan IV-2015 sebesar 5,04% yoy. Meskipun demikian, masih lebih tinggi daripada pertumbuhan triwulan I-2015 sebesar 4,73% yoy. Lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2016 antara lain disebabkan oleh kontraksi di sektor pertambangan terkait rendahnya harga komoditas. Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga tercermin dari melambatnya pertumbuhan kredit dan realisasi penyerapan APBN triwulan I-2016 yang relatif masih terbatas.

Grafik I - 6 Pertumbuhan Ekonomi



Pada akhir triwulan-I 2016, angka inflasi tercatat sebesar 0,19% *mtm*, didorong oleh inflasi *volatile food* seiring meningkatnya harga bahan makanan seperti cabai dan bawang merah. Harga barang *administered price* masih mencatat deflasi. Secara YoY, inflasi berada pada level 4,45%. Dari sisi *demand*, *core inflation* melanjutkan tren melambat dalam beberapa bulan terakhir, yang mengindikasikan masih lemahnya permintaan domestik. Tingkat inflasi menunjukkan tren peningkatan pada beberapa bulan terakhir, namun peningkatan ini lebih didorong oleh sisi *supply*.

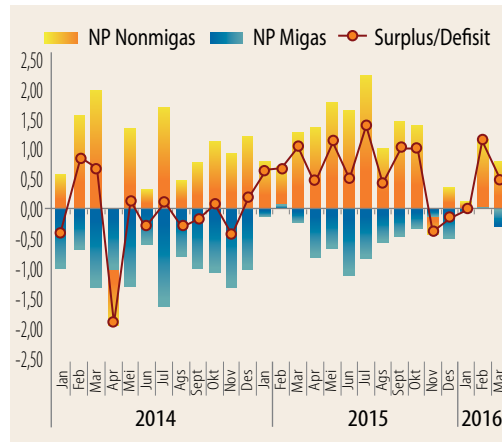
Grafik I - 7 Tingkat Inflasi



Dari sisi eksternal, pada triwulan I-2016 neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus yang tercermin dari surplus neraca perdagangan sebesar USD1,7 miliar. Namun surplus ini terjadi di tengah pelemahan kinerja ekspor-impor. Pelemahan impor juga terjadi pada kelompok bahan baku/penolong dan barang modal. Sepanjang periode laporan terjadi penurunan ekspor-impor masing-masing sebesar 15,2% dan 18,2% YoY. Perkembangan ini akan mempengaruhi kapasitas produksi dalam negeri yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap *output* pertumbuhan ekonomi.

Kinerja sektor riil masih belum solid tercermin dari penjualan semen yang tumbuh melambat dan penjualan ritel yang kembali menurun. Sementara itu, pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor masih dalam tren

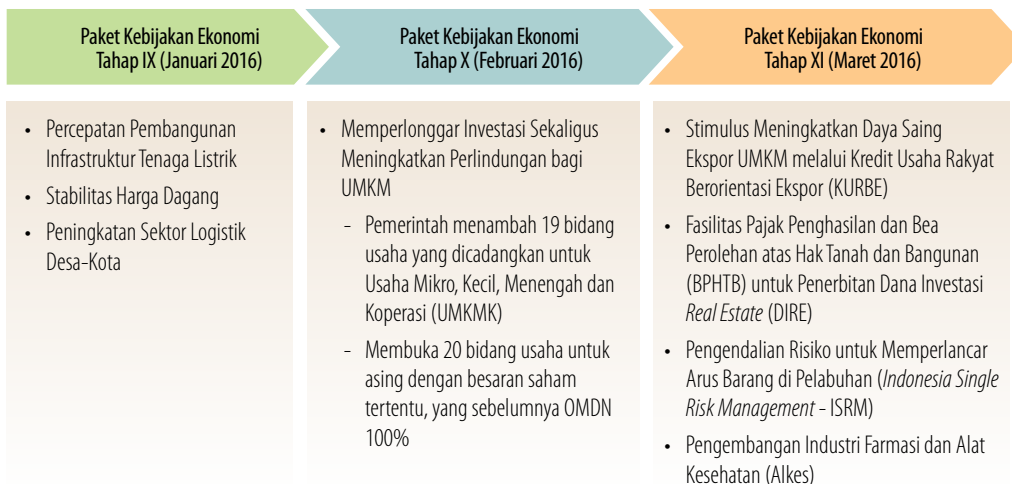
Grafik I - 8 Neraca Perdagangan Indonesia



melambat meskipun terlihat adanya perbaikan pada tengah periode. Sementara itu, kinerja manufaktur Indonesia mengalami ekspansi pertama kalinya tercermin dari meningkatnya indikator *Purchasing Manager Index (PMI)* Indonesia.

Di tengah perkembangan makroekonomi yang belum terlalu menggembirakan, persepsi risiko domestik terpantau menunjukkan perkembangan positif. Indikator persepsi risiko jangka menengah, *Credit Default Swap (CDS)* 5 tahun, cenderung menguat sebagaimana juga dialami oleh beberapa *emerging markets*. Volatilitas di pasar keuangan domestik jauh mereda dibandingkan triwulan sebelumnya, diiringi oleh masuknya kembali dana investor nonresiden di pasar modal dalam negeri.

Grafik I - 9 Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah



Di tengah berlanjutnya aliran masuk modal asing, Pemerintah berupaya memanfaatkan momentum tersebut dengan mengeluarkan tiga Paket Kebijakan Ekonomi yang diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pertumbuhan domestik serta mengembalikan kepercayaan pasar.

Sepanjang triwulan I-2016 Bank Indonesia menurunkan *BI Rate* sebanyak tiga kali. *BI Rate* menunjukkan tren menurun dari 7,50% pada Desember 2015 menjadi 6,75% pada Maret 2016. Penurunan suku bunga acuan ini sejalan dengan masih terbukanya ruang pelonggaran kebijakan moneter seiring proyeksi menurunnya tekanan inflasi pada tahun 2016 serta meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat upaya meningkatkan permintaan domestik sehingga dapat memanfaatkan momentum perbaikan tersebut.

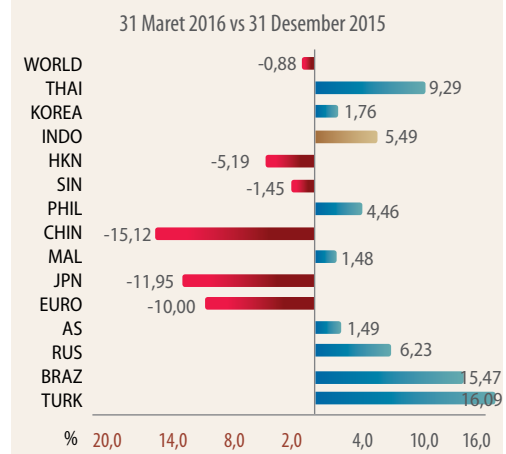
1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

Pasar keuangan domestik pada triwulan I-2016 bergerak menguat seiring berlanjutnya aliran masuk modal asing sebagai imbas sentimen positif global. Sejalan dengan penguatan pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN), Rupiah juga menguat dengan tren volatilitas yang menurun. Perkembangan ini mendorong aksi beli investor di pasar saham dan pasar obligasi.

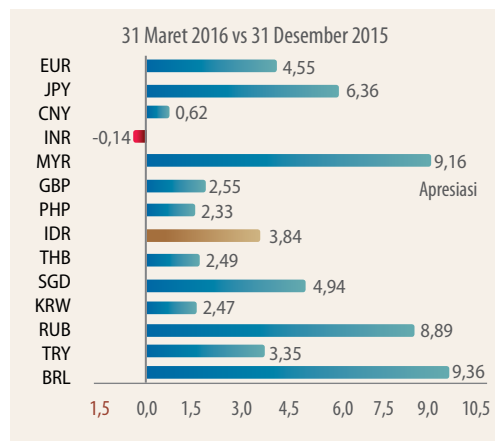
Sentimen positif global yang mewarnai pergerakan pasar terutama berkurangnya ketidakpastian di pasar keuangan global akibat kemungkinan laju kenaikan *Fed Funds Rate* yang lebih lambat serta penerapan suku bunga negatif di Eropa dan Jepang. Kondisi tersebut mendorong perbaikan persepsi risiko *emerging markets* termasuk Indonesia dimana investor mulai mengalihkan dananya dari *safe haven* ke aset-aset *emerging markets* termasuk Indonesia. Hal ini turut mempengaruhi penguatan pasar saham domestik sepanjang triwulan I-2016. Penguatan pasar saham juga terdorong oleh harga minyak yang mulai menunjukkan tren meningkat sejak Februari 2016. Pada periode laporan, IHSG mencatat pertumbuhan sebesar 5,49% *qta* yang diikuti oleh *net buy* nonresiden sebesar Rp4,2 triliun (triwulan IV-2015: *net sell* Rp9,4 triliun).

Sejalan dengan penguatan mayoritas mata uang global, penguatan Rupiah pada triwulan I-2016 ditopang oleh

Grafik I - 10 Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional



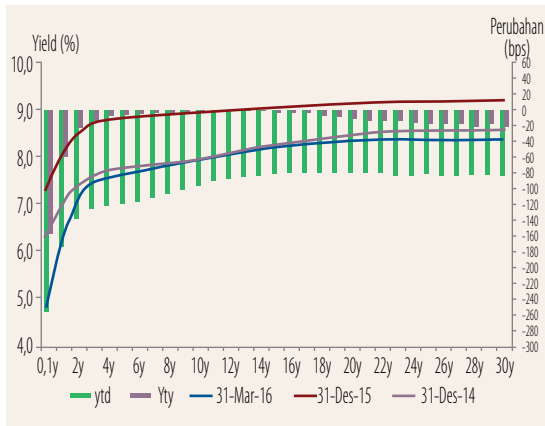
Grafik I - 11 Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional



depresiasi USD dan *rebound* harga minyak. Selain sentimen positif global, penguatan nilai tukar Rupiah juga didukung sentimen positif domestik. Persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian membaik seiring penurunan *BI Rate*, paket kebijakan Pemerintah dan implementasi proyek infrastruktur yang efektif menjadi pendorong penguatan Rupiah dari sisi domestik.

Sejalan dengan apresiasi Rupiah, pasar SBN juga terpantau mengalami penguatan pada triwulan I-2016. Imbal hasil (*yield*) menurun rata-rata sebesar 101 *basis point*. Penguatan pasar ini diiringi oleh aksi beli investor nonresiden yang tercatat *net buy* sebesar Rp36,5 triliun (triwulan IV-2015: *Net buy* Rp35,1 triliun).

Grafik I - 12 Perkembangan Yield SBN



1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

1.2.1 Perkembangan Bank Umum

Selama periode laporan¹, kondisi Bank Umum Konvensional (BUK) masih terjaga baik (*financially sound*), meskipun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, pertumbuhan aset dan kredit mengalami penurunan. Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan sebesar 0,60% (*qtq*) menjadi Rp4.263,7 triliun, di sisi lain aset dan kredit masing-masing menurun sebesar 0,18% (*qtq*) dan 2,25% (*qtq*) menjadi Rp5.908,8 triliun dan Rp3.816,2 triliun. Kondisi permodalan BUK mengalami peningkatan, hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang relatif tinggi sebesar 21,9%, meningkat 55 *bps*. Rentabilitas BUK relatif stabil dengan *Return on Assets* (ROA) sebesar 2,29%. Sementara itu, kualitas kredit masih cukup baik karena masih berada dibawah *threshold* 5%, walaupun kualitas kredit mengalami penurunan tercermin dari NPL *gross* yang meningkat sebesar 37 *bps* (*qtq*) menjadi 2,76% serta BOPO yang relatif meningkat menjadi 84,2%.

Tabel I - 2 Kondisi Umum Perbankan Konvensional

Rasio	2015	2016	<i>qtq</i>
	Triwulan IV	Triwulan I	
Total Aset (Rp miliar)	5.919.406	5.908.761	↓ -0,18%
Kredit (dalam miliar rupiah)	3.904.158	3.816.156	↓ -2,25%
Dana Pihak Ketiga (dalam miliar rupiah)	4.238.349	4.263.681	↑ 0,60%
- Giro (dalam miliar rupiah)	972.657	1.002.235	↑ 3,04
- Tabungan (dalam miliar rupiah)	1.343.292	1.284.144	↓ -4,40%
- Deposito (dalam miliar rupiah)	1.922.400	1.977.303	↑ 2,86%
CAR (%)	21,39	21,93	↑ 0,55
ROA (%)	2,32	2,29	↓ (0,03)
NIM (%)	5,39	5,47	↑ 0,08
BOPO (%)	81,49	84,22	↑ 2,73
NPL Gross (%)	2,39	2,76	↑ 0,37
NPL Net (%)	1,14	1,32	↑ 0,18
LDR (%)	92,11	89,50	↓ (2,61)

Ket: ↑ Menunjukkan peningkatan ↓ Menunjukkan penurunan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Februari 2016

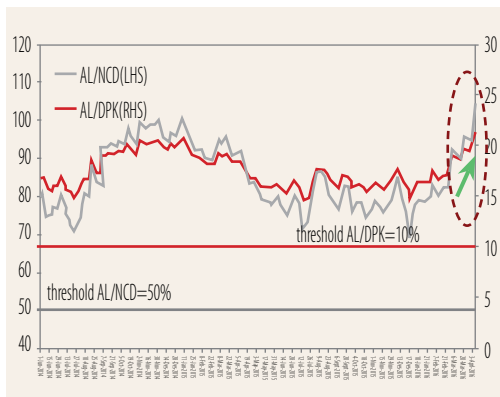
A. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Selama periode laporan, OJK mencatat bahwa jumlah DPK meningkat sebesar 0,60% (*qtq*) menjadi sebesar Rp4.263,7 triliun. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pertumbuhan pada giro dan deposito masing-masing sebesar 3,0% (*qtq*) dan 2,9% (*qtq*). Di sisi lain, tabungan mengalami penurunan sebesar 4,4% (*qtq*). Porsi DPK terbesar didominasi oleh deposito yaitu sebesar 46,4%, diikuti tabungan dan giro masing-masing sebesar 30,1% dan 23,5%. Porsi deposito yang cukup tinggi merupakan akibat dari tingginya suku bunga deposito dibandingkan dengan suku bunga tabungan dan giro.

B. Likuiditas

Likuiditas perbankan yang dilihat dari rasio AL/NCD dan AL/DPK pada periode laporan masing-masing mengalami peningkatan menjadi sebesar 94,37% dan 19,38%. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan pada alat likuid.

¹ Data Triwulan I-2016 menggunakan data posisi Februari 2016

Grafik I - 13 Perkembangan Likuiditas Perbankan

Sumber: OJK

Selanjutnya, dilihat dari LDR kondisi likuiditas perbankan juga masih memadai meskipun sedikit menurun menjadi 89,50% apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut dikarenakan menurunnya pertumbuhan kredit dibandingkan dengan pertumbuhan DPK.

C. Permodalan

Ketahanan Perbankan Indonesia masih relatif kuat, tercermin oleh tingkat permodalan yang masih relatif tinggi di atas persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Pada periode laporan, jumlah modal BUK mengalami peningkatan sebesar 2,6% (*qtq*) menjadi Rp938,2 triliun. Selain itu, rasio CAR BUK juga meningkat 55 *bps* menjadi 21,9%.

D. Kredit

Ditengah kondisi perbaikan pertumbuhan ekonomi, perkembangan kredit BUK mengalami penurunan dengan kualitas kredit yang cenderung menurun. Pertumbuhan kredit BUK pada periode laporan, turun sebesar 2,2% (*qtq*) menjadi Rp3.816,2 triliun. Di sisi lain, rasio *Non Performing Loan* (NPL) masih cukup baik karena masih dibawah *threshold* 5% meskipun meningkat 37 *bps* menjadi 2,7%. Sementara itu, NPL *net* yang masih terjaga sebesar 1,3%. Peningkatan NPL tersebut terutama terjadi pada sektor

konstruksi, transportasi, dan perdagangan besar dan eceran seiring dengan masih rendahnya harga komoditas terutama pada harga minyak. Selain itu, dari sisi eksternal turunnya ekspor sebagai akibat masih lambatnya pemulihan dan permintaan ekonomi global turut menyebabkan peningkatan pada NPL.

E. Rentabilitas

Pada triwulan I-2016, kinerja rentabilitas perbankan masih tergolong baik², tercermin dari ROA dan NIM yang relatif stabil masing-masing sebesar 2,29% dan 5,47%. Hal ini mengindikasikan masih baiknya kemampuan bank dalam memperoleh laba.

Tabel I - 3 Kondisi Umum BPR

Rasio	Triwulan IV 2105	Triwulan I 2016	qtq
Total Aset (Rp milyar)	101.713	102,667	▲ 0,94%
Kredit (Rp milyar)	74.807	75.489	▲ 0,91%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	67.266	68.735	▲ 2,18%
- Tabungan (Rp milyar)	20.266	20.839	▼ -0,57%
- Deposito (Rp milyar)	46.307	47.896	▲ 3,43%
NPL Gross (%)	5,37	6,22	▲ 0,85
NPL Net (%)	3,34	4,48	▲ 1,14
ROA (%)	2,71	2,71	→ -
LDR (%)	77,81	76,89	▼ (0,92)
CR (%)	19,14	16,80	▼ (2,34)
KAP (%)	3,68	4,05	▲ 0,37
ROE (%)	24,76	24,50	▼ (0,26)
BOPO (%)	81,59	82,24	▼ (0,65)
CAR (%)	21,93	23,93	▲ 2,00

Ket: ▲ menunjukkan peningkatan ▼ menunjukkan penurunan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK, Februari 2016

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Perkembangan industri BPR pada periode laporan menunjukkan kinerja yang cukup baik, tercermin dari peningkatan aset sebesar

2 Secara umum rentabilitas dapat dikatakan baik apabila ROA >1,5% (mengacu pada pedoman CAMELS).

0,9% (*qtq*) menjadi Rp102,7 triliun. Hal tersebut juga didukung dengan peningkatan pada penghimpunan DPK dan penyaluran kredit yang meningkat masing-masing sebesar 2,2% (*qtq*) dan 0,9% (*qtq*).

A. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada periode laporan, kegiatan penghimpunan DPK mengalami peningkatan sebesar 2,2% (*qtq*) menjadi Rp68,7 triliun. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pada deposito sebesar 3,43% (*qtq*) menjadi Rp47,9 triliun, sementara pertumbuhan tabungan mengalami penurunan sebesar 0,57% (*qtq*) menjadi sebesar Rp20,8 triliun. Dari total DPK tersebut, sebesar 69,7% disumbang oleh deposito dan 30,3% sisanya oleh tabungan.

B. Likuiditas

Dari sisi rasio keuangan, kondisi likuiditas BPR pada periode laporan mengalami penurunan yang tercermin dari *Cash Ratio* (CR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang menurun masing-masing menjadi 16,8% dan 76,9%

C. Permodalan

Kondisi permodalan BPR masih terjaga baik dengan CAR mengalami peningkatan menjadi 23,9%. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan modal selama periode laporan.

D. Kredit

Peningkatan penghimpunan DPKBPR diikuti dengan meningkatnya penyaluran kredit yang diberikan, terlihat dari peningkatan kredit sebesar 0,9% (*qtq*) menjadi sebesar Rp75,5 triliun. Peningkatan tersebut diikuti dengan meningkatnya rasio *Non Performing Loan* (NPL) *gross*, yang tercatat sebesar 6,2%. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya peningkatan NPL pada BPR, yaitu (i) Karakteristik debitur BPR tergolong *unbankable* sehingga aspek legal dari pengikatan jaminan cenderung lemah

yang pada akhirnya mendorong peningkatan kredit macet; (ii) Usaha debitur yang dibiayai merupakan usaha kecil dan individual sehingga apabila terjadi permasalahan individual pada debitur tersebut akan mempengaruhi kualitas kredit debitur yang bersangkutan; (iii) Dari sisi internal bank, sistem pengawasan debitur belum berjalan dengan baik sehingga bank cenderung terlambat dalam mengetahui permasalahan yang terjadi pada debitur tersebut.

E. Rentabilitas

Rentabilitas BPR selama triwulan I-2016 relatif stabil, hal tersebut tercermin dari rasio ROA BPR yang stabil yaitu sebesar 2,71%.

1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Alokasi kredit kepada Korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), masih dibawah *threshold* 20% yaitu sebesar 18,37%, meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Porsi penyaluran kredit UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 53,95%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 10,58%, dan pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 8,40%. Sementara dilihat dari rasio NPL UMKM dari ketiga sektor tersebut, NPL tertinggi terdapat pada sektor pertanian sebesar 4,57%, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan masing-masing sebesar 4,45% dan 3,92%.

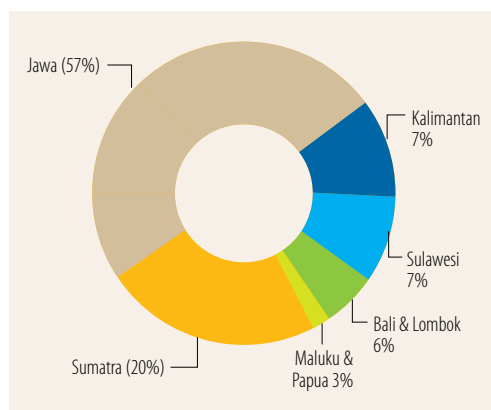
Tabel I - 4 Konsentrasi Penyaluran UMKM

	Triwulan IV-2015	Share (%)	Triwulan I-2016	Share (%)
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan				
Baki Debet	61.083	8,26%	61.243	8,40%
NPL	2.520	8,46%	2.801	8,34%
Industri Pengolahan				
Baki Debet	76.518	10,34%	77.160	10,58%
NPL	2.759	9,26%	3.021	9,00%
Perdagangan Besar dan Eceran				
Baki Debet	395.843	53,51%	393.314	53,95%
NPL	15.125	50,77%	17.505	52,13%
Total Baki Debet	739.801		728.972	
Total NPL	29.792		33.577	

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Februari 2016

Penyebaran penyaluran UMKM sebagian besar terpusat di pulau Jawa dan Sumatera, dimana total porsi lima provinsi terbesar (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) sebesar 58,22%. Adapun kelima provinsi tersebut yang memiliki porsi penyaluran UMKM terbesar antara lain DKI Jakarta (15,55%), diikuti Jawa Timur (13,24%), Jawa Barat (12,31%), Jawa Tengah (10,82%), dan Sumatera Utara (6,31%).

Grafik I - 14 Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Februari 2016

Sementara dilihat berdasarkan kelompok bank, kredit UMKM tersebut disalurkan oleh kelompok BUMN (52,49%), kelompok BUSN (38,74%), kelompok BPD (6,59%) serta kelompok KCBA dan bank Campuran sebesar 2,19%. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penyaluran kredit UMKM dari kelompok BUMN dan Bank Asing (KCBA dan Campuran) mengalami peningkatan, sementara pada kelompok BPD dan BUSN mengalami penurunan.

Tabel I - 5 Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank (dalam miliar rupiah)

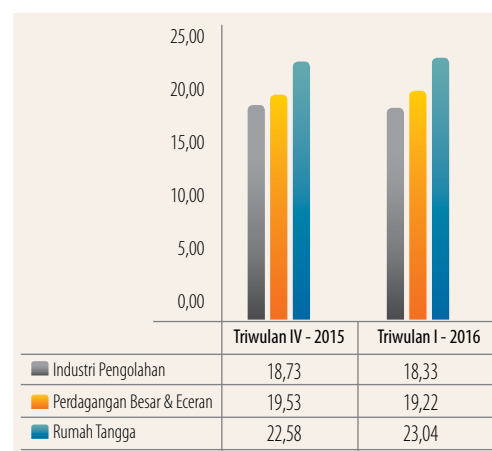
Kel. Bank	Des 2015	TW IV 2015	Feb 2016	TW I 2016
BUMN	383.166	51,79%	382.618	52,49%
BPD	51.858	7,01%	48.007	6,59%
BUSN	289.578	39,14%	282.411	38,74%
KCBA dan Campuran	15.199	2,05%	15.936	2,19%
Total UMKM	739.801	100%	728.972	100%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Februari 2016

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Secara umum, pertumbuhan kredit pada triwulan I-2016 mengalami penurunan, baik berdasarkan sektor ekonomi maupun jenis penggunaan. Hal ini dikarenakan belum tingginya kebutuhan pembiayaan korporasi pada awal tahun dan kebijakan perbankan yang selektif dalam pemberian kredit untuk menekan kenaikan risiko kredit bermasalah atau NPL. Terkait dengan penyerapan kredit, sektor yang paling mendominasi yaitu sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 19,2% dan sektor industri pengolahan sebesar 18,3%. Pemberian kredit pada sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran mengalami penurunan porsi masing-masing sebesar 40 bps dan 31 bps. Sementara untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha ditempati oleh sektor rumah tangga dengan porsi sebesar 23,04%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh masih melambatnya perekonomian global yang diindikasikan oleh ekspor yang menurun seiring lemahnya permintaan global dan penurunan harga komoditas, terutama pada batubara dan minyak bumi.

Grafik I - 15 Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Februari 2016

Tabel I - 6 Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)

No.	Kredit Berdasarkan Sektor	Kredit		Porsi		△ qtq (bps)
		TW IV 2015	TW I 2016	TW IV 2015	TW I 2016	
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	254.954	254.432	6,28	6,41	-0,20
2	Perikanan	8.843	8.933	0,22	0,23	1,01
3	Pertambangan dan Penggalian	135.273	121.349	3,33	3,06	-10,29
4	Industri Pengolahan	760.048	727.503	18,73	18,33	-4,28
5	Listrik, Gas, dan Air	99.447	100.600	2,45	2,54	1,16
6	Konstruksi	172.934	165.293	4,26	4,17	-4,42
7	Perdagangan Besar dan Eceran	792.503	762.572	19,53	19,22	-3,78
8	Penyediaan Komodasi dan Penyediaan Makan Minum	85.861	86.741	2,12	2,19	1,02
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	177.546	175.043	4,38	4,41	-1,41
10	Perantara Keuangan	164.681	170.850	4,06	4,31	3,75
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	184.755	182.728	4,55	4,61	-1,10
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	12.914	9.594	0,32	0,24	-25,71
13	Jasa Pendidikan	8.129	7.986	0,20	0,20	-1,76
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21.488	14.890	0,53	0,38	-30,71
15	Lainnya	57.989	53.414	1,43	1,35	-7,89
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	2.708	2.643	0,07	0,07	-2,41
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	110	85	0,00	0,00	-22,93
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	11.960	11.280	0,29	0,28	-5,68
19	Rumah Tangga	916.252	914.139	22,58	23,04	-0,23
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	189.508	197.833	4,67	4,99	4,39

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, Februari 2016

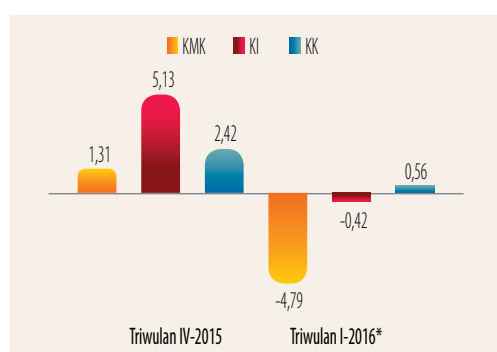
Penyaluran kredit pada sektor lainnya seperti pertanian, perburuan dan kehutanan; Perikanan; Listrik, gas, dan air; *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan; dan Penyedia akomodasi dan PMM; dan bukan lapangan usaha lainnya mengalami peningkatan porsi penyaluran kredit walaupun masih terbatas. Sementara penyaluran kredit pada sektor konstruksi mengalami penurunan baik porsi maupun pertumbuhannya, hal ini dikarenakan proyek konstruksi masih dalam tahap pelelangan sehingga diperkirakan akan melaju kembali pada periode selanjutnya untuk pembangunan proyek infrastruktur seperti jalan kereta api, pengairan, perumahan dan penyediaan rumah susun.

Berdasarkan jenis penggunaan, porsi Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK) meningkat. Namun dilihat dari pertumbuhannya, Kredit Modal Kerja (KMK) dan KI mengalami penurunan pertumbuhan pada triwulan I-2016, masing-masing sebesar 4,79% (*qtq*) dan 0,42% (*qtq*).

1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Pada akhir triwulan I-2016, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan sebesar 5,49% menjadi 4.845,371. Peningkatan ini dipengaruhi isu-isu global diantaranya hasil rapat *Federal Open Market Committee* (FOMC) yang menetapkan untuk tidak menaikkan suku bunga acuan, melimpahnya likuiditas di pasar disebabkan kebijakan ekonomi beberapa negara seperti kebijakan suku bunga negatif di Eropa dan Jepang, serta perkembangan harga minyak dunia mencapai level tertinggi sepanjang 2016 ke level USD 40 per barel setelah mengalami pelemahan dalam tiga

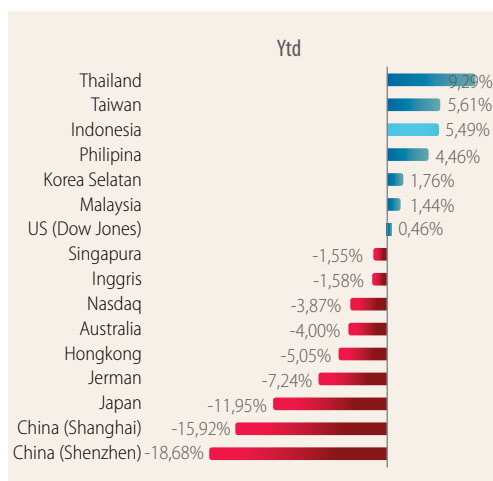
Grafik I - 16 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (%)

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI, Februari 2016)

bulan terakhir. Namun demikian, masih terdapat sentimen yang menahan peningkatan kinerja di Pasar Modal diantaranya masih melemahnya perlambatan perekonomian Tiongkok.

Selain itu, beberapa isu domestik yang mempengaruhi kinerja Pasar Modal yaitu kondisi fundamental ekonomi yang membaik, diantaranya neraca perdagangan Indonesia yang tercatat surplus sebesar USD7,5 miliar, penurunan BI rate sebanyak tiga kali selama triwulan I-2016 menjadi 6,75%, *Moody's Investor Service* yang kembali menegaskan Indonesia pada level *investment grade* menjadi Baa (*stable outlook*), serta menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi Rp13.239/USD.

Grafik I - 17 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (YTD)

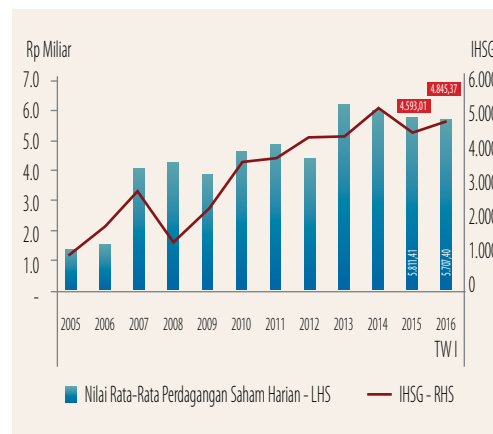


Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami peningkatan sebesar 5,56% menjadi Rp5.143,45 triliun. Rata-rata nilai perdagangan dan frekuensi perdagangan saham mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,1% dan 2,9%. Secara umum, kinerja pasar saham mengalami penguatan seiring membaiknya kondisi fundamental perekonomian Indonesia serta dukungan kebijakan pemerintah baik stimulus fiskal dan moneter.

Grafik I - 18 Perkembangan Indeks Industri



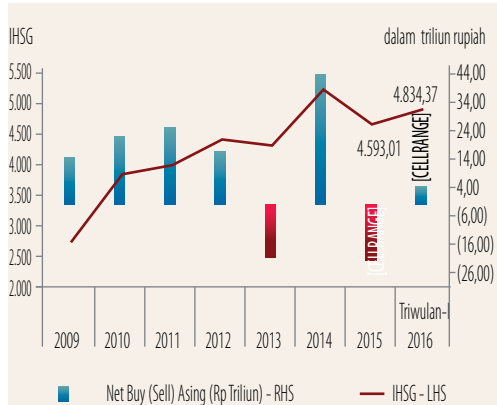
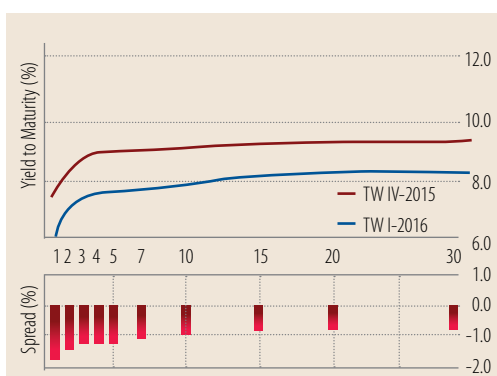
Grafik I - 19 Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian



Tabel I - 7 Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

Indikator (Rata-rata harian)	2015		2016
	Triwulan I	Triwulan IV	Triwulan I
Nilai perdagangan saham harian (Rp miliar)	6.589,60	5.484,16	5.707,40
Investor Asing (Rp miliar)			
Beli	2.771,17	1.740,80	2.682,89
Jual	2.684,18	2.550,93	2.615,57
Investor Domestik (Rp miliar)			
Beli	3.818,43	3.087,71	3.024,52
Jual	3.905,42	2.933,23	3.091,84
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	231,14	230,19	236,98

Selama triwulan I-2016 transaksi investor asing membukukan *net buy* sejumlah Rp4,11 triliun atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan IV-2015 yang mengalami *net sell* sebesar Rp9,42 triliun.

Grafik I - 20 Perkembangan IHSG dan Net Asing**Grafik I - 21** Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA- IGSYC)

Secara umum kinerja pasar Obligasi mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah menunjukkan trend penurunan dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor sebesar 96,1 *bps*. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah dan panjang mengalami penurunan masing-masing sebesar 141,1 *bps*, 117,0 *bps* dan 85,5 *bps*.

Tabel I - 8 Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang

Jenis Transaksi	Triwulan IV-2015			Triwulan I-2016		
	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek. (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek. (Kali)
Obligasi:						
- Korporasi	40,76	40,44	5.089	49,71	49,81	5.845
- SUN	740,66	705,20	42.317	899,86	899,17	51.618
Total	781,42	745,65	47.406	949,57	948,98	57.463
Repo	56,31	37,00	162	63,44	59,15	171

Volume, nilai dan frekuensi perdagangan obligasi pemerintah selama periode laporan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 21,5%, 27,5%, dan 21,9% menjadi masing-masing sebesar Rp899,86 triliun, Rp899,17 triliun dan 51.618 kali. Selain itu, peningkatan volume, nilai dan frekuensi juga terjadi pada perdagangan obligasi korporasi, dimana masing-masing mengalami kenaikan 21,9%, 23,2% dan 14,9% menjadi masing-masing sebesar Rp49,71 triliun, Rp49,81 triliun dan 5.845 kali.

1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek

Tabel I - 9 Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	38
2	Penjamin Emisi Efek	17
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	79
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	4
Total		140

Pada periode laporan terdapat dua pencabutan Perusahaan Efek (PE) secara sukarela sehingga jumlahnya menjadi 140 PE. Selain itu, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah sembilan lokasi kantor dan penutupan sejumlah 15 lokasi kantor sehingga jumlahnya menjadi 620 kantor dimana 619 tersebar di seluruh Indonesia dan satu berada di Singapura.

Tabel I - 10 Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2015	2016
	s.d. Triwulan IV	s.d. Triwulan I
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	626	620

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, sampai dengan periode laporan OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 105 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 10 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 8.611 WPPE dan 1.986 WPPE.

Tabel I - 11 Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan IV 2015		Triwulan I 2016		Total Pemegang Izin
	Dokumen yg Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yg Masuk	Pemberian Izin	
WPPE	248	122	152	105	8.611
WPPE	35	17	13	10	1.986
Total	283	139	265	115	10.597

1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Membaiknya kondisi ekonomi makro serta IHSG memberikan dampak positif terhadap kinerja Reksa Dana. Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat sebesar 7,8% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp293,3 triliun. NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap mengalami peningkatan terbesar sebesar Rp6,7 triliun diikuti oleh Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp6,4 triliun, Reksa Dana Saham sebesar Rp4,9 triliun, Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp3,4 triliun, Reksa Dana Campuran sebesar Rp1,4 triliun, Reksa Dana ETF sebesar Rp0,2 triliun, dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,1 triliun. Di sisi lain, kinerja Reksa Dana Syariah mengalami penurunan NAB sebesar Rp1,6triliun yang disebabkan adanya satu Reksa Dana Syariah-Saham yang bubar serta adanya pencairan dana (*redemption*) dari para nasabah. Hal tersebut tercermin dari jumlah UP Reksa Dana Syariah yang mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Tabel I - 12 Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

NAB Per Jenis Reksa Dana	2015 (dalam triliun rupiah)		2016 (dalam triliun rupiah)
	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
RD Pasar Uang	31,11	27,24	33,61
RD Pendapatan Tetap	45,96	48,51	55,18
RD Saham	89,67	104,46	109,31
RD Campuran	17,10	18,46	19,87
RD Terproteksi	54,15	57,98	61,35
RD Indeks	0,57	0,81	0,89
ETF	3,03	3,48	3,67
RD Syariah *	9,85	11,02	9,43
Total	251,45	271,97	293,31

*) termasuk ETF indeks

Selama periode laporan, kinerja Reksa Dana mengalami peningkatan sehingga mendorong investor untuk melakukan investasi pada Reksa Dana, hal tersebut tercermin dari *net subscription* sebesar Rp11,3 triliun

Selanjutnya, dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) serta Jumlah kontrak RDPT mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,4% dan 0,03% masing-masing menjadi Rp19,5 triliun dan 67 RDPT yang terdiri dari 39 RDPT non proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp13,75 triliun dan 28 RDPT proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp5,74 triliun.

Selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), dan KIK Dana Investasi Real Estate (DIRE), sehingga KIK EBA, KIK EBA-SP dan KIK DIRE masing-masing masih tetap berjumlah tujuh KIK, satu KIK dan satu KIK. Terkait dengan dana kelolaan KIK EBA mengalami penurunan sebesar 8,11% menjadi sebesar Rp2,4 triliun. Hal ini disebabkan adanya hutang (KPR) yang menjadi sekuritisasi dalam KIK EBA telah jatuh tempo. Sedangkan dana

Tabel I - 13 Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Produk Investasi	2015				2016
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Reksa Dana					
Jumlah	929	986	1.021	1.091	1.150
Total NAB	256,14	262,59	251,45	271,97	293,31
RDPT					
Jumlah	81	71	76	69	67
Total NAB	27,36	20,02	17,64	19,77	19,49
EBA					
Jumlah	7	7	7	7	7
Nilai	3,26	3,01	2,80	2,59	2,38
Securitisasi					
EBA-SP					
Jumlah	-	-	-	1	1
Nilai	-	-	-	0,20	0,20
Securitisasi					
DIRE					
Jumlah	1	1	1	1	1
Total Nilai	0,44	0,44	0,44	0,53	0,53
KPD					
Jumlah	277	280	278	281	279
Total Nilai	145,05	131,08	119,63	130,36	138,36

*) Dalam Rp triliun

kelolaan EBA-SP dan KIK DIRE masing-masing masih sebesar Rp0,2 triliun dan Rp0,5 triliun.

Pada periode laporan, Nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami kenaikan sebesar 6,1%, menjadi Rp138,3 triliun. Namun demikian, jumlah kontrak KPD mengalami penurunan sebesar 0,7% menjadi 279 kontrak. Sampai akhir periode laporan OJK menerbitkan 81 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I - 14 Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	9
Reksa Dana Campuran	3
Reksa Dana Pendapatan Tetap	5
Reksa Dana Pasar Uang	12
Reksa Dana Terproteksi	45
Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri	2
Reksa Dana Syariah Campuran	1
Reksa Dana Syariah Saham	1
Reksa Dana Syariah Berbasis SUKUK	1
Reksa Dana Syariah Terproteksi	2
Total	81

Selain itu, OJK juga menerbitkan 22 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 21 Reksa Dana Konvensional dan satu Reksa Dana Syariah. Rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri dari dua Reksa Dana Terproteksi yang telah jatuh tempo; dua Reksa Dana Terproteksi dan satu Reksa Dana Saham yang dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan sebesar 25 Milyar; 13 Reksa Dana Terproteksi yang dibubarkan atas dasar kesepakatan MI dan BK; satu Reksa Dana Campuran, satu Reksa Dana Saham, dan satu Reksa Dana Terproteksi yang dibubarkan karena NAB kurang dari 25 Milyar selama 90 hari bursa berturut-turut; serta terdapat satu Reksa Dana Syariah yang dibubarkan yaitu Reksa Dana Syariah-campuran dikarenakan NAB kurang dari 25 Milyar selama 90 hari bursa berturut-turut.

Tabel I - 15 Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Pelaku	2015				2016
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.654	2.742	2.776	2.811	2.864
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	22.588	18.399	18.987	19.788	20.094
Penasehat Investasi (PI)	5	5	4	4	3
INSTITUSI					
Manajer Investasi (MI)	80	82	82	83	84
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	23	24	25	26	28
Penasehat Investasi (PI)	2	2	2	2	2

Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan satu izin MI dan dua izin APERD sehingga jumlah MI dan APERD masing-masing mengalami peningkatan sebesar 1,20% dan 7,7%. Di sisi lain, OJK tidak memberikan izin maupun pencabutan izin PI institusi, sehingga jumlah PI Institusi tidak mengalami perubahan. Pelaku individu industri Pengelolaan Investasi juga mengalami peningkatan pada WMI dan WAPERD masing-masing sebesar 1,9% dan 1,5%. Selain itu, selama periode ini terdapat satu PI Individu yang mengembalikan izin sehingga jumlah PI Individu menjadi tiga pihak.

1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Sampai akhir periode laporan, terdapat 11 Penawaran Umum, yaitu dua perusahaan yang melakukan Penawaran Umum perdana saham, dua perusahaan yang melakukan Penawaran Umum terbatas, dan tujuh perusahaan yang melakukan Penawaran Umum berkelanjutan obligasi (PUB Obligasi), dengan nilai emisi mencapai Rp17,1 triliun.

Tabel I - 16 Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan I 2015		Triwulan IV 2015		Triwulan I 2016		TW IV 2015 dengan TW I 2016		TW I 2015 dengan TW I 2016	
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Δ (%) Jumlah Emisi	Δ % Nilai Emisi	Δ (%) Jumlah Emisi	Δ % Nilai Emisi
Penawaran Umum Saham (IPO)	1	4.453	6	2.280	2	110	-66,7%	-95,2%	100,0%	-97,5%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/Rights Issue)	1	199	6	28.015	2	669	-66,7%	-97,6%	100,0%	236,2%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	10	13.299	15	10.930	7	16.292	-53,3%	49,1%	-30,0%	22,5%
a. Obligasi/ Sukuk +Subordinasi	2	1.800	3	1.350	0	0	-100,0%	-100%	-100,0%	-100,0%
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	1	1.000	5	3.250	0	0	-100,0%	-100%	-100,0%	-100,0%
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	7	10.499	7	6.330	7	16.292	0,0%	157,4%	0,0%	55,2%
Total Emisi	12	17.951	27	41.225	11	17.071	-59,3%	-58,6%	-8,3%	-4,9%

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Selama periode laporan, OJK menerima lima perusahaan yang mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dimana sebanyak dua Perusahaan telah mendapat surat efektif dan tiga Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari dua Perusahaan yang telah mendapatkan efektif dari OJK tersebut sebesar Rp110,2 miliar.

emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp669,4 miliar.

Tabel I - 17 Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Tanggal Efektif	Nilai Emisi
1	PT Mahaka Radio Integra Tbk	29 Januari 2016	Rp78.789.675.000
2	PT Mitra Pemuda Tbk	29 Januari 2016	Rp31.450.000.000
TOTAL			Rp110.239.675.000

B. Penawaran Umum Terbatas (Right issue)

Pada triwulan I-2016 terdapat sembilan perusahaan yang menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dimana dua perusahaan telah mendapatkan Efektif dan sisanya masih dalam proses. Nilai

Tabel I - 18 Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Tanggal Efektif	Nilai Emisi
1	PT Equity Development Investment Tbk	29 Januari 2016	Rp269.482.960.120
2	PT Sierad Produce Tbk	28 Maret 2016	Rp400.000.000.000
TOTAL			Rp669.482.960.120

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

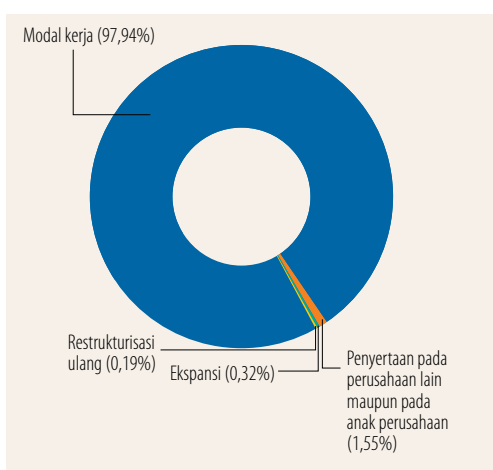
Terkait dengan Efek bersifat hutang melalui Penawaran Umum Obligasi, Penawaran Umum Sukuk dan Penawaran Umum Berkelanjutan, selama periode laporan tidak terdapat perusahaan yang melakukan Penawaran Umum obligasi/sukuk. Selain itu, terdapat enam perusahaan yang melakukan Penawaran Umum berkelanjutan obligasi (PUB obligasi) Tahap I dan masih dalam proses. Sedangkan untuk PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya, terdapat tujuh Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum. Pada periode ini, jumlah Penawaran Umum Obligasi/Sukuk mengalami kenaikan sebesar 49% menjadi sebesar Rp16,29 triliun.

Tabel I - 19 Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

PUB Obligasi Tahap II dst					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi (Rp)
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	PUB Obligasi I Tahap II	25/06/2015	29 Jan -1 Feb 2016	Rp4.650.000.000.000
2	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	PUB Obligasi II Tahap VII	23/05/2014	15-16 Feb 2016	Rp4.036.250.000.000
3	PT BFI Finance Indonesia Tbk	PUB Obligasi II Tahap III	28/02/2014	22 Februari 2016	Rp1.000.000.000.000
4	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	PUB Obligasi III Tahap III	25/06/2015	24-26 Feb 16	Rp1.101.000.000.000
5	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	PUB Obligasi III Tahap IV	30/06/2015	4-7 Maret 2016	Rp630.000.000.000
6	PT Indomobil Finance Indonesia	PUB Obligasi II Tahap III	15/04/2015	10-11 Maret 2016	Rp1.500.000.000.000
7	PT Federal International Finance	PUB Obligasi II Tahap III	15/04/2015	29-31 Maret 2016	Rp3.375.000.000.000
Total					Rp16.292.250.000.000

D. Laporan Penggunaan dana

Dari seluruh Penawaran Umum yang dilakukan pada periode laporan, persentase terbesar penggunaan dana adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 97,9% atau sekitar Rp16,8 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 1,6% atau sekitar Rp265,1 miliar untuk penyertaan pada perusahaan lain maupun pada anak perusahaan, sedangkan 0,3% atau sekitar Rp55,1 miliar untuk ekspansi dan 0,2% atau sekitar Rp32,5 miliar untuk restrukturisasi utang.

Grafik I - 22 Laporan Penggunaan Dana**1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal****A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemerangkat Efek**

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, dan Wali Amanat, serta Pemerangkat Efek dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu Surat Tanda Terdaftar Lembaga Penunjang Pasar Modal sebagai Wali Amanat. Selain itu, OJK juga menerbitkan tiga Surat Keputusan Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

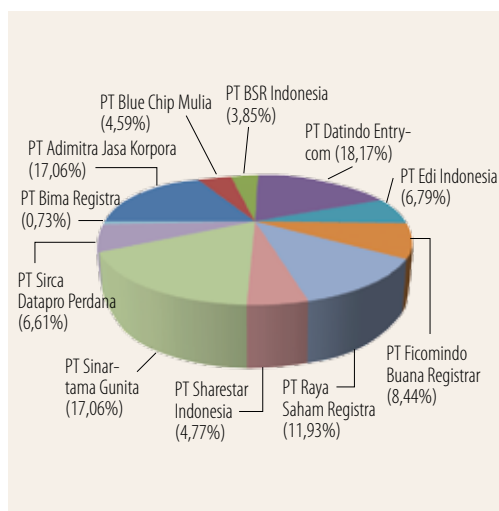
Tabel I - 20 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2015	2016	Jenis
	Triwulan IV	Triwulan I	
Biro Administrasi Efek	11	11	Surat Perizinan
Bank Kustodian	22	22	Surat Persetujuan
Wali Amanat	11	12	Surat Tanda Terdaftar
Pemerangkat Efek	2	2	Surat Perizinan
Ahli Syariah Pasar Modal	-	3	Surat Perizinan

B. Biro Administrasi Efek (BAE)

Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, pangsa pasar BAE masih didominasi oleh PT. Datindo Entrycom yang mencapai 18,2%, PT. Sinartama Gunita sebanyak 17,1%, PT. Adimitra Jasa Korpora sebanyak 17,1% dari keseluruhan klien yang menggunakan jasa BAE. Sementara, BAE dengan jumlah klien paling sedikit adalah Bima Registra sebanyak 0,7%, PT. BSR Indonesia sebanyak 3,9%, dan PT. Blue Chip Mulia sebanyak 4,6%.

Grafik I - 23 Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan I-2016



C. Pemeringkat Efek

Sampai akhir periode laporan, total perusahaan yang diperingkat oleh dua Pemeringkat Efek meningkat sebanyak 11,1% menjadi 140 Perusahaan. Pangsa pasar berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat masing-masing Pemeringkat Efek adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia sebanyak 60 perusahaan dan PT Fitch Ratings Indonesia sebanyak 80 perusahaan.

Grafik I - 24 Market Share Company Rating Triwulan I 2016



Selanjutnya, dari 140 Perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, sebanyak 137 Perusahaan masuk kategori *Investment Grade* dan sebanyak tiga Perusahaan masuk dalam kategori *Non Investment Grade*.

Tabel I - 21 Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori *Investment Grade* Dan *Non Investment Grade*

Pemeringkat Efek	<i>Investment Grade</i> (Perusahaan)		<i>Non Investment Grade</i> (Perusahaan)	
	Triwulan IV-2015	Triwulan I-2016	Triwulan IV-2015	Triwulan I-2016
PT Pemeringkat Efek Indonesia	45	58	1	2
PT Fitch Ratings Indonesia	79	79	1	1
Total	124	137	2	3

D. Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama periode laporan OJK menerbitkan 36 Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk Akuntan, enam STTD untuk Konsultan Hukum, empat STTD untuk Penilai dan satu STTD untuk Notaris. Di sisi lain, OJK menerima pengunduran diri sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dari satu Akuntan, dua Konsultan Hukum dan enam Notaris.

Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel I - 22 Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	Tidak Aktif Tetap	Total
Akuntan	581	201	782
Penilai	180	16	196
Konsultan Hukum	725	48	773
Notaris	1538	245	1783

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK selama triwulan I-2016 bekerjasama dengan asosiasi menyelenggarakan tiga Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dan satu kali Pendidikan Profesi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Akuntan

FAPM telah menyelenggarakan satu kali Pendidikan Profesi dan satu kali PPL Akuntan Pasar Modal sebagai berikut:

Tabel I - 23 Kegiatan Pendidikan Terkait Akuntan

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Isu Kritis Akuntansi & Audit terkait Penerapan Restrospektif PSAK Terkini terhadap Pelaporan Keuangan Emiten	16 Februari 2016
2	Pendidikan Profesi 30 SKP	29 Februari – 5 Maret 2016

a. Konsultan Hukum

HKHPM telah menyelenggarakan PPL sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut:

Tabel I - 24 Kegiatan Pendidikan Terkait Konsultan Hukum

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Seminar HKHPM & AKHI tentang Peran Konsultan Hukum Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penyempahan	16 Februari 2016
2	Diklat Transaksi Berbasis Syariah Untuk Konsultan Hukum Pasar Modal	12 Maret 2016

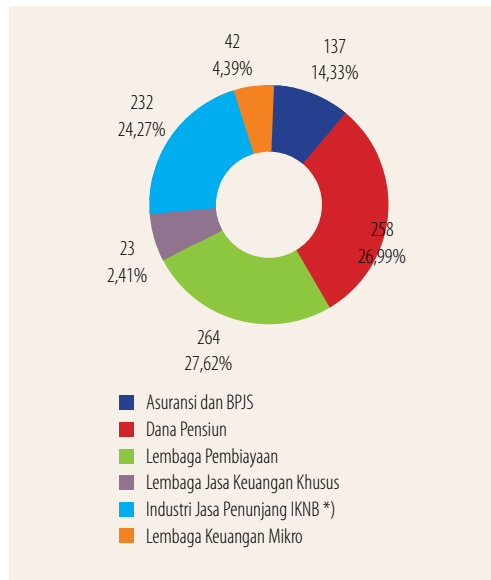
1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) selama triwulan I 2016 bergerak positif, hal ini tercermin dari peningkatan total aset IKNB sebesar 3,6% menjadi Rp1.695,7 triliun. Sektor IKNB yang mengalami peningkatan yaitu Asuransi, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Tabel I - 25 Total Aset IKNB (dalam Triliun Rupiah)

No	Industri	Triwulan I 2015	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016
1	Asuransi dan BPJS	787,56	777,29	765,69	803,72	842,29
2	Dana Pensiun	195,28	198,78	192,72	206,59	220,13
3	Lembaga Pembiayaan	446,07	453,99	469,90	472,94	472,52
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus	127,65	133,05	142,46	147,29	153,75
5	Industri Jasa Penunjang IKNB *)	5,42	6,04	6,04	6,04	6,81
6	Lembaga Keuangan Mikro					0,22
	Total Aset	1.561,98	1.569,15	1.576,80	1.636,57	1.695,71

Pelaku usaha pada industri Lembaga Pembiayaan merupakan jumlah pelaku IKNB yang terbesar yaitu sebanyak 264, diikuti oleh Dana Pensiun, industri Jasa Penunjang IKNB, Asuransi dan BPJS, Lembaga Keuangan Mikro, serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Grafik I - 25 Komposisi Jumlah Pelaku IKNB
Triwulan I-2016

1.4.1 Perkembangan Industri Asuransi dan BPJS

Sampai akhir periode laporan, aset industri Asuransi dan BPJS mengalami pertumbuhan sebesar 4,8% menjadi Rp842,3 triliun. Hal ini disebabkan oleh kenaikan nilai investasi karena iklim pasar modal yang membaik dan cenderung kondusif. Jumlah investasi asuransi mengalami kenaikan sebesar 6,6% menjadi Rp683,6 triliun. Dari sisi kinerja asuransi, premi bruto asuransi dan klaim bruto mengalami peningkatan secara yoy masing-masing sebesar 28,9% dan 8,5% menjadi Rp73,5 triliun dan Rp45,6 triliun. Komposisi premi bruto didominasi Asuransi Jiwa sebesar 37,3%, diikuti oleh BPJS sebesar 34,0%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 24,7%, dan Asuransi Wajib sebesar 4,0%.

Tabel I - 26 Indikator Perusahaan Perasuransian (dalam Triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan I 2015	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	336,96	328,00	316,41	329,68	347,86
	Asuransi Umum dan Reasuransi	122,76	127,26	129,49	132,56	137,67
	Asuransi Wajib	108,52	104,38	103,15	107,86	114,14
	BPJS	219,32	217,65	216,63	233,61	242,60
	Jumlah	787,56	777,29	765,69	803,72	842,29
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	288,90	280,18	268,15	283,20	297,60
	Asuransi Umum dan Reasuransi	63,89	63,16	64,44	66,15	69,00
	Asuransi Wajib	77,90	74,03	72,76	76,62	89,21
	BPJS	205,30	204,59	203,32	215,33	227,74
	Jumlah	635,99	621,96	608,67	641,29	683,55
3	Total Premi Bruto					
	Asuransi Jiwa	22,14	51,61	78,83	102,42	27,47
	Asuransi Umum dan Reasuransi	13,61	30,49	45,52	57,61	18,20
	Asuransi Wajib	2,50	5,15	8,14	11,02	2,85
	BPJS	18,80	40,25	72,32	90,03	25,03
	Jumlah	57,05	127,50	204,82	261,09	73,54
4	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	15,03	33,45	49,95	66,02	17,07
	Asuransi Umum dan Reasuransi	8,06	15,85	22,72	32,51	8,21
	Asuransi Wajib	1,54	3,19	4,92	6,36	2,07
	BPJS	17,36	35,17	53,56	74,99	18,24
	Jumlah	41,99	87,66	131,14	179,88	45,58
5	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	264,45	257,92	250,01	258,04	270,41
	Asuransi Umum dan Reasuransi	77,56	81,62	83,01	82,54	84,88
	Asuransi Wajib	84,00	85,40	87,59	89,54	92,21
	BPJS	29,67	30,10	29,62	30,03	32,52
	Jumlah	455,68	455,04	450,22	460,15	480,02

(dalam Triliun Rupiah)

Tabel I - 27 Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian

No	Perusahaan Perasuransian	Triwulan I 2015	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016
1	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	27	27	27	27	27
	c. Patungan	22	22	22	22	22
	Sub Total	50	50	50	50	50
2	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	3	3	3	3	3
	b. Swasta Nasional	61	59	58	58	58
	c. Patungan	17	17	15	15	15
	Sub Total	81	79	76	76	76
3	Reasuransi	5	5	5	6	6
4	BPJS	2	2	2	2	2
5	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	141	139	136	137	137

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

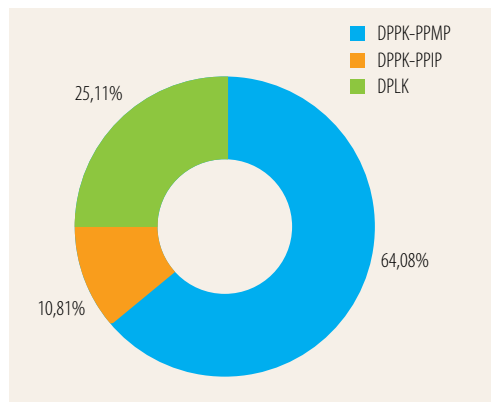
Perkembangan industri Dana Pensiun selama periode laporan mengalami peningkatan tercermin dari indikator pertumbuhan aset dan investasi dana pensiun. Sampai dengan periode laporan, terjadi peningkatan aset Dana Pensiun sebesar 6,5% menjadi Rp220,1 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan aset ini sejalan dengan peningkatan nilai investasi sebesar Rp211,6 triliun, atau naik 6,3%. Peningkatan aset dan investasi ini tidak terlepas dari membaiknya perekonomian nasional khususnya penguatan nilai IHSG di bursa pasar modal.

Tabel I - 28 Distribusi Aset Industri Dana Pensiun Periode Triwulan I 2015 s.d. Triwulan I 2016 (dalam triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan I 2015	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016
DPPK-PPMP	136,54	135,33	128,60	136,45	142,54
Growth	3,69%	-0,88%	-4,98%	6,11%	4,46%
DPPK-PIIP	21,17	21,46	20,84	22,12	23,36
Growth	5,02%	1,40%	-2,89%	6,12%	5,62%
DPLK	37,58	41,98	43,28	48,03	54,23
Growth	5,30%	11,71%	3,10%	10,97%	12,92%
TOTAL ASET (triliun rupiah)	195,28	198,78	192,72	206,59	220,13
Growth	4,14%	1,79%	-3,05%	7,20%	6,55%

Tabel I - 29 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Periode Triwulan I 2015 s.d. Triwulan I 2016 (dalam triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan I 2015	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016
DPPK-PPMP	129,93	129,05	122,26	130,02	135,60
Growth	3,42%	-0,68%	-5,26%	6,34%	4,29%
DPPK-PIIP	20,71	21,05	20,40	21,69	22,87
Growth	5,46%	1,66%	-3,07%	6,30%	5,44%
DPLK	36,93	40,48	42,62	47,36	53,14
Growth	5,18%	9,63%	5,29%	11,12%	12,22%
TOTAL INVESTASI (triliun rupiah)	187,57	190,59	185,28	199,06	211,61
Growth	3,99%	1,61%	-2,78%	7,44%	6,30%

Grafik I - 26 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan I 2016**Tabel I - 30** Portofolio Investasi Dana Pensiun Periode Triwulan I 2015 s.d. Triwulan I 2016 (dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan I 2015	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016
1	Surat Berharga Negara	31,24	31,48	32,48	35,60	43,98
2	Tabungan	0,27	0,14	0,22	0,15	0,17
3	Deposito on call	1,11	2,38	0,99	1,55	1,75
4	Deposito Berjangka	55,93	55,58	54,97	59,60	59,54
5	Sertifikat Deposito	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
6	Saham	29,75	28,54	24,09	27,17	28,43
7	Obligasi	39,04	40,54	41,57	42,92	44,54
8	Sukuk	1,15	1,54	1,61	1,78	1,75
9	Reksa Dana	12,08	12,68	11,71	13,01	13,41
10	KIK EBA	0,28	0,22	0,20	0,20	0,18
11	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK	0,04	0,12	0,14	0,15	0,16
12	Penempatan langsung pada Saham	6,72	6,71	6,80	6,65	6,86
13	Tanah	2,80	2,96	2,65	3,33	3,40
14	Bangunan	1,26	1,43	1,48	1,55	1,62
15	Tanah dan Bangunan	5,89	6,23	6,32	5,36	5,79

Di antara jenis investasi yang diperkenankan tersebut, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Deposito Berjangka, Obligasi, Surat Berharga Negara, dan Saham. Berikut detail portofolio investasi Dana Pensiun:

Tabel I - 31 Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan I 2015	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016
DPPK PPMP	194	192	192	190	188
DPPK PPIP	47	48	47	45	45
DPLK	25	25	25	25	25
JUMLAH	266	265	264	260	258

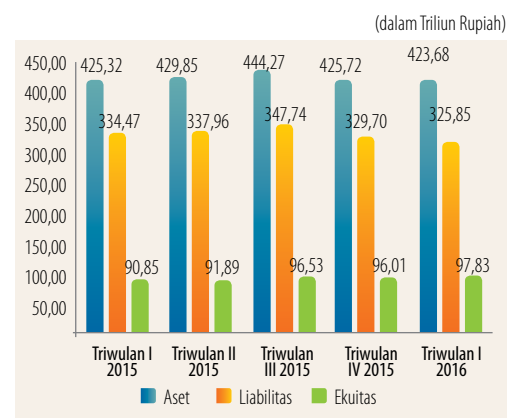
Sampai dengan periode laporan, terdapat satu pembubaran DPPK dan satu DPPK PPIP. Sementara itu, satu DPPK beralih dari PPMP ke PPIP, sehingga jumlahnya berkurang menjadi 258 Dana Pensiun.

1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan I 2016 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,5% dan 1,2%. Di sisi lain, ekuitas Perusahaan Pembiayaan naik sebesar 1,9%.

Grafik I - 27 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama periode laporan, OJK telah mencabut izin usaha kepada 2 perusahaan sehingga jumlahnya berkurang menjadi 201 perusahaan. Berdasarkan total aset, 72 Perusahaan Pembiayaan menguasai aset sebesar 92% dan sisanya sebanyak 129 Perusahaan Pembiayaan hanya menguasai aset industri sebesar 8%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan mengalami pertumbuhan, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya piutang pembiayaan sebesar Rp1,1 triliun atau naik 0,3% dibandingkan triwulan sebelumnya. Komposisi piutang pembiayaan pada triwulan I-2016 masih didominasi oleh Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha, masing-masing sebesar 69% dan 28%. Selain itu, sektor ekonomi yang mendominasi piutang pembiayaan pada Triwulan I-2016 adalah sektor Rumah Tangga sebesar 48%. Namun demikian, pertumbuhan piutang pembiayaan tersebut tidak mengakibatkan kenaikan aset Perusahaan Pembiayaan yang turun sebesar 0,5% dibandingkan triwulan sebelumnya.



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

D. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Labanya bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar 71,3% menjadi Rp3,1 triliun

E. Jenis Valuta Pinjaman

Jumlah pinjaman yang diterima industri pembiayaan sebesar Rp238 triliun dengan komposisi 53,2% berdenominasi Rupiah, diikuti US Dollar 28,8%, Yen Jepang 17,9%, dan Peso Filipina 0,01%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

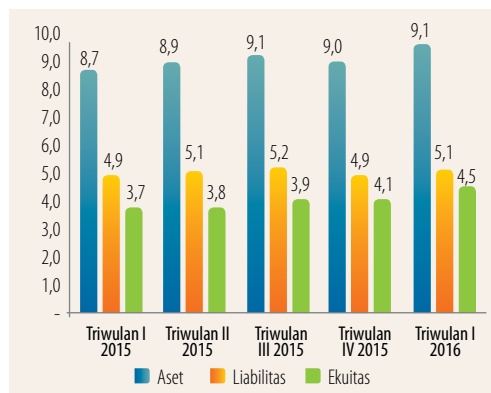
1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura merupakan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal ventura sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset, liabilitas dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura masing-masing mengalami kenaikan sebesar 7,3%, 3,9% dan 11,4% menjadi Rp9,6 triliun, Rp5,1 triliun, dan Rp4,5 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 29 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam Triliun Rupiah)



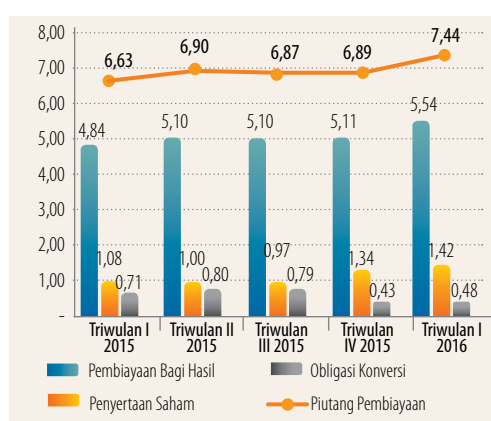
B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Selama periode laporan, tidak terdapat pencabutan izin maupun pemberian izin Perusahaan Modal Ventura sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura masih berjumlah 65 perusahaan, dengan 4 perusahaan menjalankan kegiatan dengan prinsip Syariah.

C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Selama periode laporan, total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura naik 8,0% menjadi Rp7,4 triliun. Pembiayaan/penyertaan dengan skema pembagian hasil usaha selama periode laporan memiliki pangsa sebesar 74,5% dengan nilai Rp5,5 triliun.

Grafik I - 30 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal (dalam Triliun Rupiah)



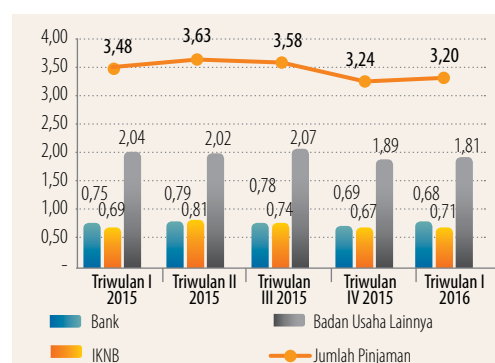
D. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 89,6%, 77,2%, 1,97%, dan 4,19%. Penurunan BOPO disebabkan turunnya pendapatan operasional sebesar 73,9% menjadi Rp0,3 triliun. Sedangkan beban operasional juga turun sebesar 74,9% menjadi Rp0,3 triliun. Kenaikan IFAR disebabkan jumlah pembiayaan/penyertaan yang naik 8,0% menjadi Rp7,4 triliun bila dibanding dengan jumlah aset yang naik sebesar 7,3% menjadi Rp9,6 triliun. Menurunnya ROA seiring dengan penurunan laba sebesar 78,96% menjadi Rp47 miliar dibanding dengan jumlah aset yang naik sebesar 7,3% menjadi Rp9,6 triliun. Menurunnya ROE seiring dengan penurunan laba sebesar 78,96% menjadi Rp47 miliar dibandingkan dengan kenaikan ekuitas sebesar 11,4% menjadi Rp4,5 triliun.

E. Sumber Pendanaan

Selain berasal dari modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada periode laporan adalah sebesar Rp3,20 triliun.

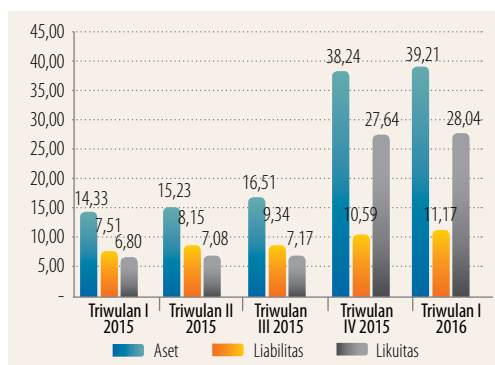
Grafik I - 31 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (dalam Triliun Rupiah)



1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Pada periode laporan, terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset Rp39,21 triliun naik 2,5% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan total liabilitas Rp11,17 triliun. Namun jika dibandingkan dengan triwulan I-2015 total aset meningkat peningkatan sebesar 173,6% menjadi Rp39,21 triliun. Peningkatan tersebut seiring dengan program pemerintah dalam mendukung percepatan pertumbuhan pembangunan pada sektor infrastruktur.

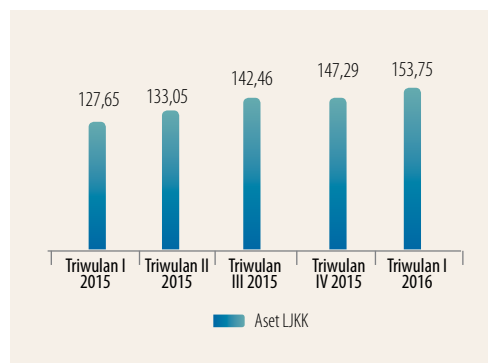
Grafik I - 32 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam Triliun Rupiah)



1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Total Aset LJKK naik 4,4% menjadi Rp153,8 triliun.

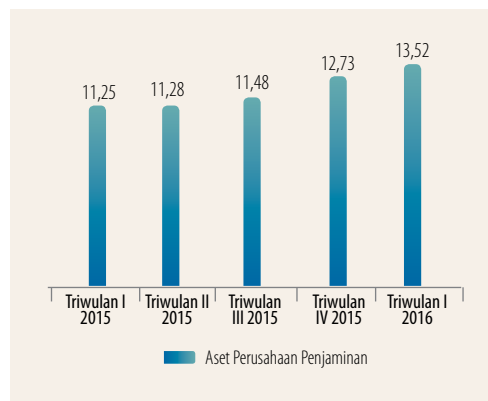
Grafik I - 33 Pertumbuhan Aset LJK (dalam Triliun Rupiah)



A. Perusahaan Penjaminan

Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM terhadap perbankan melalui penjaminan kredit. Pada periode laporan total aset perusahaan penjaminan naik 6,2% menjadi Rp13,5 triliun.

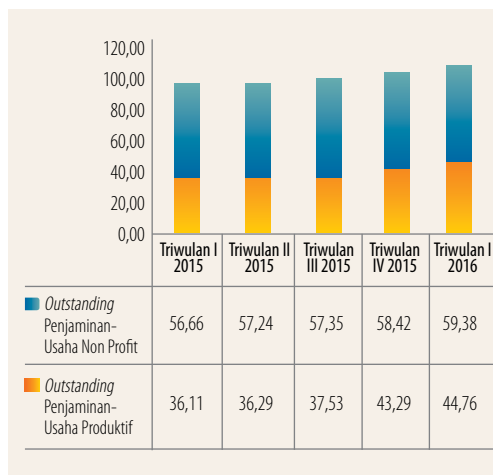
Grafik I - 34 Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan (dalam Triliun Rupiah)



Outstanding penjaminan selama triwulan I-2016 mengalami kenaikan sebesar 2,4% menjadi Rp104,1 triliun. Peningkatan tersebut didorong oleh nilai *outstanding* usaha produktif yang

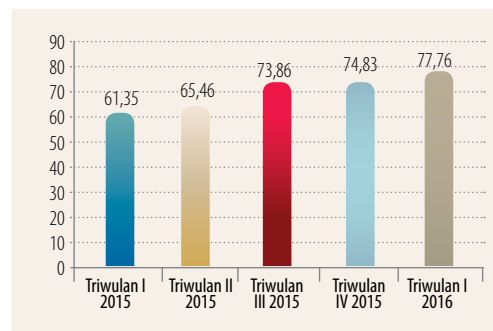
meningkat sebesar 3,4% sedangkan *outstanding* penjaminan usaha non-produktif naik sebesar 1,6%. Pertumbuhan *outstanding* penjaminan tersebut seiring dengan misi pemerintah untuk mendorong peningkatan kemampuan akses UMKM terhadap perbankan melalui penjaminan kredit.

Grafik I - 35 Outstanding Penjaminan (dalam Triliun Rupiah)



Kenaikan aset tersebut seiring dengan pertumbuhan pembiayaan dalam rangka peningkatan kegiatan program ekspor nasional. Sampai dengan periode laporan, LPEI mencatat total pembiayaan sebesar Rp77,76 triliun atau naik 3,9% (*qta*). Dari total pembiayaan tersebut, komposisi pembiayaan melalui sistem konvensional sebesar Rp65,62 triliun dan melalui sistem syariah sebesar Rp12,14 triliun.

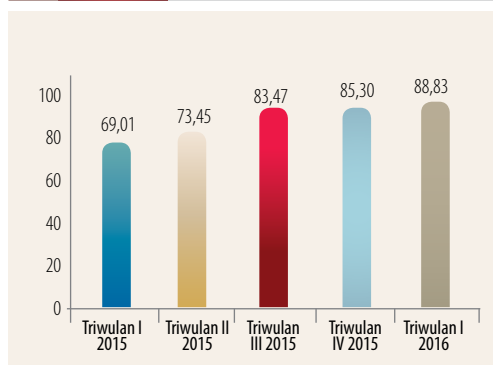
Grafik I - 37 Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam Triliun Rupiah)



B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional. Total aset LPEI naik 4,1% menjadi Rp88,83 triliun.

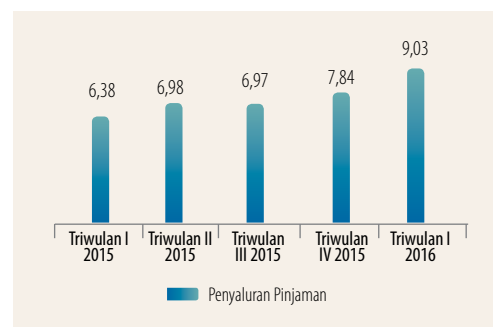
Grafik I - 36 Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam Triliun Rupiah)



C. Sarana Multigriya Finansial

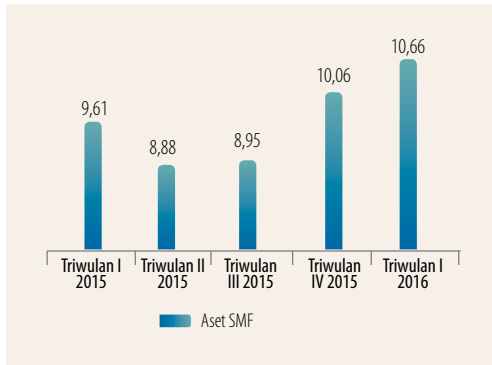
Sarana Multigriya Finansial (SMF) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta kesinambungan pembiayaan perumahan. Program peningkatan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan oleh SMF dalam bentuk penyaluran pinjaman mengalami pertumbuhan sebesar 15,1% menjadi Rp9,03 triliun

Grafik I - 38 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (dalam Triliun Rupiah)



Total aset PT SMF (Persero) naik 6,0% menjadi Rp10,66 triliun. Kenaikan aset tersebut seiring dengan kenaikan penyaluran pinjaman sebesar 12,7%.

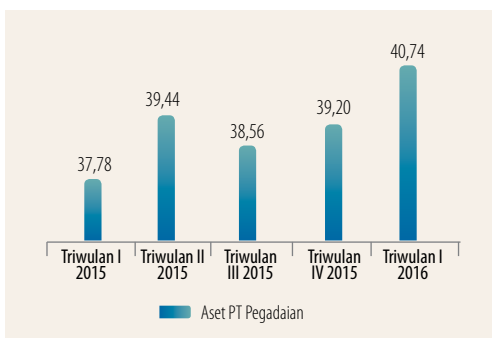
Grafik I - 39 Pertumbuhan Aset SMF
(dalam Triliun Rupiah)



D. Pegadaian

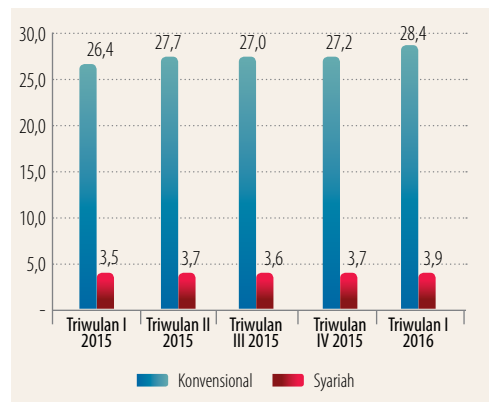
PT Pegadaian (Persero) bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro, kecil, dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia. Total aset PT Pegadaian (Persero) naik 3,9% menjadi Rp40,74 triliun.

Grafik I - 40 Pertumbuhan Aset PT Pegadaian
(dalam Triliun Rupiah)



Outstanding pinjaman yang disalurkan PT Pegadaian (Persero) pada triwulan I-2016 sebesar Rp32,3 triliun, mengalami kenaikan sebesar 4,5%. Kenaikan tersebut terjadi baik pada pinjaman konvensional maupun syariah. *Outstanding* konvensional naik sebesar 4,4%, sedangkan untuk *outstanding* syariah naik sebesar 5,4%.

Grafik I - 41 *Outstanding* Pinjaman PT Pegadaian
(Persero) (dalam Triliun Rupiah)



1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Industri Jasa Penunjang IKNB adalah industri yang mendukung kegiatan usaha perasuransian antara lain jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi, keperantaraan dalam penempatan reasuransi, serta penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

Mengingat industri Jasa Penunjang IKNB hanya berkewajiban menyampaikan laporan keuangan per semester, maka data keuangan disampaikan pada semester II-2015. Total aset meningkat dibandingkan semester II-2015, sebesar Rp0,77 triliun. Sementara total pendapatan jasa keperantaraan mengalami penurunan sebesar Rp0,13 triliun dibandingkan semester II-2015.

Tabel I - 32 Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB (dalam Triliun Rupiah)

No	Jenis Indikator	TRIWULAN I 2015	TRIWULAN II 2015	TRIWULAN III 2015	TRIWULAN IV 2015	TRIWULAN I 2016
1.	Total Aset	5,42	6,04	6,04	6,04	6,81
2.	Total Liabilitas	3,84	4,25	4,25	4,25	4,84
3.	Total Modal Sendiri	1,58	1,80	1,80	1,80	1,97
4.	Total Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,03	1,01	1,01	1,01	1,14
5.	Total Laba Rugi	0,25	0,34	0,34	0,34	0,24

Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian sampai akhir periode pelaporan adalah 235.

Tabel I - 33 Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No	Jenis Perusahaan	TRIWULAN I 2015	TRIWULAN II 2015	TRIWULAN III 2015	TRIWULAN IV 2015	TRIWULAN I 2016
1.	Pialang Asuransi	157	163	163	166	169
2.	Pialang Reasuransi	31	36	36	37	38
3.	Perusahaan Agen Asuransi	29	- *	- *	- *	- *
4.	Jasa Penilai Kerugian	26	28	28	28	28
5.	Konsultan Aktuaria	29	- *	- *	- *	- *
	Jumlah	272	227	227	231	232

*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sejak Januari 2015, OJK sudah tidak mengawasi perusahaan agen asuransi dan konsultan aktuaria.

14.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha melalui pengukuhan sampai akhir periode triwulan I-2016 adalah sebanyak 42 LKM dengan total aset sebesar Rp220,14 miliar.

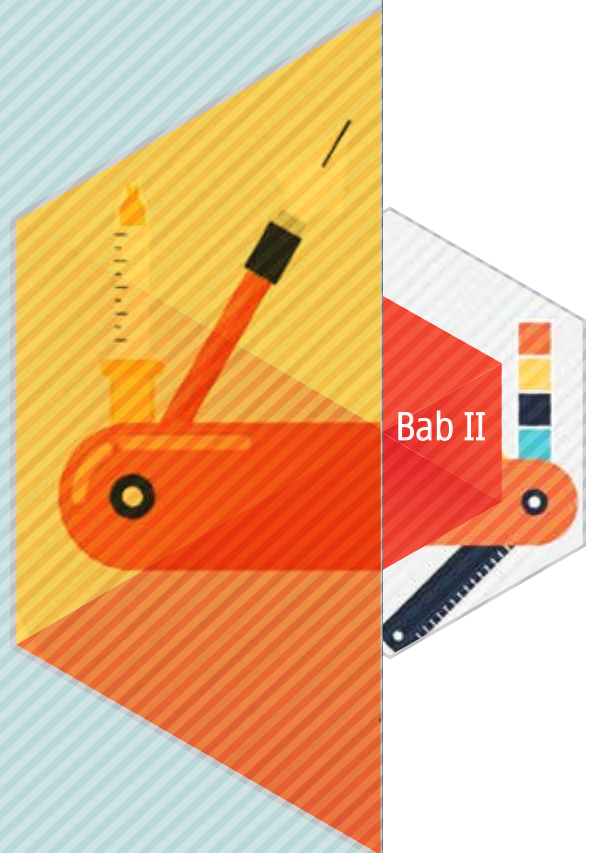
Tabel I - 34 Jumlah LKM

No.	Jenis Badan Usaha	TRIWULAN III 2015	TRIWULAN IV 2015	TRIWULAN I 2016
1.	Konvensional	8	15	31
	Koperasi	8	15	19
	PT	-	-	12
2.	Syariah	-	5	11
	Koperasi	-	5	11
	PT	-	0	0
	Jumlah	8	20	42

Tabel I - 35 Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (dalam Miliar Rupiah)

No.	Jenis Indikator	TRIWULAN III 2015	TRIWULAN IV 2015	TRIWULAN I 2016
1.	Aset	2,99	45,46	220,14
2.	Liabilitas	1,74	36,41	142,32
3.	Dana Syirkah Temporer	-	2,6	18,13
4.	Ekuitas	1,24	6,45	59,69
5.	Penempatan Dana	0,12	13,47	35,31
6.	Pinjaman Yang Diberikan	2,52	23,30	142,75
7.	Simpanan/Tabungan	1,74	31,78	123,70
8.	Pinjaman Yang Diterima	-	3,54	10,23
9.	Laba/Rugi	-	0,33	(21,50)

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan



Bab II

OJK menerbitkan **19 Peraturan OJK (POJK)** terkait dengan Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB.

OJK memberikan persetujuan izin untuk **82 Produk Perbankan** dan **356 Produk Asuransi**

OJK mencatat **Jumlah Dana** dan **Nasabah** yang berhasil dihimpun pada program **Laku Pandai** masing-masing sebesar **Rp50,5 miliar** dan **1.351.798 nasabah**.

OJK meluncurkan **Global Master Repurchase Agreement Indonesia** (GMRA Indonesia).

OJK membentuk **TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah)** di **tiga Provinsi** yaitu **Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Utara**

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

II

2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

2.1.1 Pengaturan Terintegrasi

Selama triwulan I-2016, OJK melakukan penyusunan dua Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) terkait dengan pengaturan terintegrasi yaitu: RSEDK mengenai Permodalan Terintegrasi & RSEDK Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi. RSEDK mengenai Permodalan Terintegrasi merupakan Petunjuk Teknis dari ketentuan POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi Pengawas Terintegrasi dalam melakukan penilaian dan/atau analisis terhadap pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Selain itu, RSEDK mengenai Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) merupakan piranti yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi pengawasan yang ada pada masing-masing sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB). Pedoman SIPT disusun sebagai panduan bagi pengawas terintegrasi dan/atau pihak-pihak pemangku kepentingan dalam menggunakan SIPT, yaitu untuk mendukung proses pengambilan

keputusan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, penelitian, pengaturan serta pengembangan Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan.

2.1.2 Pengaturan Bank

Penelitian dan penerbitan pengaturan perbankan di 2016 dilakukan untuk mendukung terwujudnya industri perbankan yang tangguh, kontributif dan inklusif dalam rangka menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, program kerja strategis penyusunan penelitian dan pengaturan pada sektor perbankan difokuskan untuk mencapai sasaran strategis berupa: i) peningkatan pengaturan Bank Umum dan BPR yang selaras dan terintegrasi; serta ii) pengembangan Bank Umum dan BPR yang stabil dan berdaya saing global.

A. Peraturan yang Telah Ditetapkan

Selama periode laporan, OJK menerbitkan dua POJK dan empat SEOJK terkait pengaturan Perbankan sebagai berikut:

1. POJK Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi BKD yang Diberikan Status Sebagai BPR.

Penerbitan peraturan ini bertujuan mendukung Badan Kredit Desa (BKD) dalam fungsi dan perannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan perkembangan perekonomian. Adapun pokok-pokok pengaturannya adalah: (i) BKD wajib memenuhi seluruh ketentuan BPR dengan diberikan masa transisi sampai dengan 31 Desember 2019; (ii) BKD yang tidak dapat memenuhi ketentuan BPR dapat memilih untuk bertransformasi menjadi bentuk usaha lain yaitu Lembaga Keuangan Mikro atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau unit usaha BUMDesa; (iii) BKD wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) termasuk revisinya atas pemenuhan ketentuan BPR atau pemenuhan persyaratan perizinan badan usaha yang dipilih paling lambat 31 Desember 2017; (iv) Dalam rangka transformasi menjadi BPR dapat dilakukan pengalihan atau penyatuan BKD serta (v) Pengaturan BKD dalam masa transisi.

2. POJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR berdasarkan Modal Inti

Penerbitan peraturan ini bertujuan meningkatkan peran dan kontribusi industri BPR terhadap ekonomi daerah sesuai dengan kapasitas permodalan BPR dengan penataan cakupan kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan modal inti. Pembedaan jenis kegiatan usaha dan pembatasan wilayah jaringan kantor berdasarkan modal inti bertujuan agar BPR fokus pada kegiatan usaha, produk dan layanan sesuai dengan kapasitas permodalan dan kemampuan pengelolaan risiko, sehingga mampu berkembang dan berkontribusi optimal menurut stratanya. Adapun pokok-pokok pengaturannya adalah: (i) Pembagian BPR berdasarkan modal inti yang dikelompokkan menjadi tiga BPRKU, (ii) Kegiatan usaha dan kegiatan lainnya untuk mendukung operasional, serta wilayah jaringan kantor BPR disesuaikan menurut kelompoknya serta (iii) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha BPR sesuai dengan kelompoknya, BPR wajib mengajukan persetujuan dan/atau pelaporan kepada OJK dan/atau Bank Indonesia, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh setiap lembaga.

Tabel II - 1

Kelompok BPR berdasarkan Modal Inti (BPRKU)

Kelompok	Jumlah Modal Inti	Kegiatan Usaha	Wilayah Jaringan Kantor
BPRKU 1	< 15 Miliar	penghimpunan, penyaluran dan penempatan dana, serta beberapa kegiatan keagenan dan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mereferensikan produk asuransi bagi nasabah BPR	satu wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kabupaten atau kota kantor pusat BPR
BPRKU 2	15 Miliar \leq x < 50 Miliar	kegiatan bagi BPRKU 1, ditambah dengan kegiatan berupa penukaran valuta asing, penerbitan kartu ATM dan/atau kartu debit dan penerbitan uang elektronik	beberapa wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dan dalam satu wilayah provinsi yang sama
BPRKU 3	Paling sedikit 50 Miliar	kegiatan bagi BPRKU 2, ditambah dengan kegiatan berupa layanan <i>electronic banking</i> , dan bank penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai)	satu wilayah provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR

3. **SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR**
Penerbitan SE ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
 2. **SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR**
Penerbitan SE ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
 3. **SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR**
SEOJK ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
 4. **SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang KPMM dan Pemenuhan MIM BPR**
SEOJK ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Selain, menerbitkan peraturan baru yang mengatur sektor Perbankan, OJK juga mengeluarkan delapan POJK yang merupakan konversi dari Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonesia. Adapun peraturan-peraturan yang dikonversi menjadi POJK adalah:
1. POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang merupakan konversi dari PBI Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
 2. POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank yang merupakan konversi dari PBI Nomor 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank.
 3. POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank yang merupakan konversi dari PBI Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
 4. POJK Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum yang merupakan konversi dari PBI Nomor 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum.
 5. POJK Nomor 8/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum yang merupakan konversi dari PBI Nomor 12/9/PBI/2010 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum.
 6. POJK Nomor 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain yang merupakan konversi dari PBI Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain.
 7. POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang merupakan konversi dari PBI Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

8. POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang merupakan konversi dari PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum; dan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

2.1.3 Pengaturan Pasar Modal

A. Pengaturan yang Telah Ditetapkan

Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu pengaturan terkait dengan pengawasan Pasar Modal, yaitu:

1. **POJK 19/POJK.04/2016 tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Yang Melakukan Pengelolaan DIRE KIK.**

Penyusunan peraturan ini merupakan tindak lanjut OJK dalam menjalankan Paket Kebijakan Ekonomi XI yang dikeluarkan oleh Pemerintah dimana salah satunya adalah memberikan insentif bagi produk DIRE. Adapun secara garis besar dari POJK tersebut adalah menambah keleluasaan pengelola DIRE untuk membeli aset *real estate* dengan melonggarkan batas pinjaman (*gearing ratio*) dari 20% menjadi 45% dari nilai aset yang akan dibeli.

2.1.4 Pengaturan IKNB

A. Peraturan yang Telah Ditetapkan

Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu POJK dan empat SEOJK terkait dengan pengawasan IKNB yaitu:

1) **POJK nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara di Lembaga Jasa Keuangan Non Bank**

Peraturan ini dimaksudkan untuk mendorong peranan investor domestik agar berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan berinvestasi dalam SBN, dimana secara garis besar peraturan ini mengatur batas minimum penempatan investasi dalam SBN. Adapun pokok-pokok materi pengaturan dalam peraturan ini antara lain mengatur: Landasan Hukum, Ketentuan Umum dan Batas Minimum Penempatan Investasi dalam SBN.

2) **SEOJK nomor 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan**

Surat Edaran ini berisi petunjuk bagaimana cara menghitung tingkat kesehatan keuangan bagi perusahaan pembiayaan. Surat Edaran ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

3) **SEOJK nomor 2/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah**

Surat Edaran ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam rangka memberikan petunjuk bagaimana cara menghitung tingkat kesehatan keuangan bagi perusahaan pembiayaan syariah.

4) **SEOJK nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan**

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan mekanisme penyampaian dan pengisian laporan bulanan bagi perusahaan pembiayaan, dimana Surat

Edaran tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

5) **SEOJK nomor 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah**

Surat Edaran ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dimana secara garis besar Surat Edaran ini berisi tentang mekanisme penyampaian dan pengisian laporan bulanan bagi perusahaan pembiayaan Syariah.

Selama periode laporan, OJK juga mengeluarkan lima POJK yang merupakan konversi dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dikeluarkan Kemenkeu. Adapun peraturan-peraturan yang dikonversi menjadi POJK adalah:

- 1) POJK nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- 2) POJK nomor 14/POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

- 3) POJK nomor 15/POJK.05/2016 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- 4) POJK nomor 16/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Dana Pensiun.
- 5) POJK nomor 17/POJK.05/2016 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun.

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

2.2.1 Pengawasan Perbankan

A. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

OJK wajib melakukan pemeriksaan umum setahun sekali secara berkala. Selama triwulan I-2016, telah direalisasikan pemeriksaan terhadap 526 kantor bank yang terdiri dari 421 Kantor Pusat dan 105 Kantor Cabang. Dari 526 kantor bank tersebut, 396 merupakan kantor BPR, 93 merupakan BUK dan 37 merupakan kantor BPRS.

Tabel II - 2 Pemeriksaan Bank Umum

Jenis Bank	Pemeriksaan Umum	
	KP	KC
BUK	16	77
BPR	368	28
BPRS	37	-
Total	421	105

Selain melakukan pemeriksaan umum, OJK melaksanakan pemeriksaan khusus yang dilakukan secara insidental dan berkaitan dengan aspek tertentu dari bank seperti produk bank, aktivitas atau kegiatan usaha tertentu, indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh bank, ataupun hal-hal lainnya yang dirasakan diperlukan untuk didalami dan diperiksa lebih jauh. Selama triwulan I-2016, OJK melakukan 115 subjek pemeriksaan khusus terhadap BUK dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan setoran modal, aktivitas operasional, aktivitas treasury, GCG, APU PPT, teknologi dan informasi serta *fraud*.

Tabel II - 3 Pemeriksaan Khusus Bank

Subjek Pemeriksaan	BUK
	Triwulan I-2016
APU PPT	6
Suku Bunga	-
Setoran Modal	45
Aktivitas Operasional	15
Teknologi dan Informasi	12
Aktivitas Treasury	5
Joint Audit	-
GCG	8
Fraud	3
Penetapan Pencabutan	-
Pemeriksaan Kesiapan Rencana Bank Devisa	-
Lainnya	21
TOTAL	115

B. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Selama triwulan I-2016, variasi produk dan aktifitas baru yang diterbitkan oleh bank dan disetujui OJK cukup beragam. Untuk bank umum konvensional, produk dan aktifitas baru yang diterbitkan mencapai 86 produk yang sebagian besar terkait dengan reksadana, *bancassurance*, dan *E-Banking*. Produk lainnya berupa surat berharga, APMK, pendanaan, *structure product*, perkreditan, *safe deposit box*, LC, bank devisa, *cash management*, dan *money remittance*.

Tabel II - 4 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan I-2016

Produk/Aktivitas Baru	Triwulan I-2016
Reksadana	22
bancassurance	25
E-banking	11
Pembiayaan	-
Surat berharga (Obligasi/MTN/Sukuk)	5
Pendanaan	5
APMK	2
Structured Product	3
Aktivitas Call Center	-
Money Remittance	1
Perkreditan	2
Safe Deposit Box	-
LC	1
Bank Devisa	1
Cash Management	1
Fitur SMS Notifikasi	-
e-Commerce	-
Kepemilikan Logam Mulia	-
Referral Retail Brokerage	-
Lainnya	7
TOTAL	86

Sumber: OJK

C. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)

Jumlah agen Laku Pandai pada akhir triwulan I-2016 mencapai 84.374 agen, yang terdiri dari 83.086 agen perorangan dan 1.288 *outlet* badan hukum dengan jumlah dana dan nasabah yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar Rp50,5 miliar dan 1.351.798 nasabah.

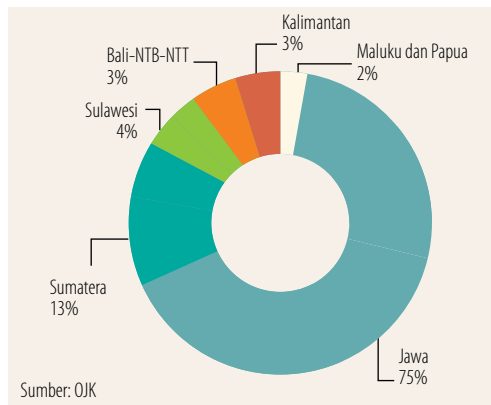
Terkait penyebaran agen LAKU PANDAI, OJK mencatat bahwa dari 84.374 agen 75% tersebar di wilayah pulau Jawa, 13% di pulau Sumatera, 4% di pulau Sulawesi, 3% di pulau Kalimantan, 2% di pulau Maluku dan Papua, dan sisanya 3% berada di pulau NTB-NTT-Bali.

Tabel II - 5 Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2016

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
83.086	1.288

Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Rekening	Outstanding Tabungan BSA (dalam rupiah)
1.351.798	50.529.810.120

Sumber: OJK

Grafik II - 1 Wilayah Penyebaran Agen LAKU PANDAI Triwulan I-2016

Sumber: OJK

Cakupan layanan yang disediakan pada agen adalah terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening. Selanjutnya, rencana pengembangan Laku Pandai yang dilakukan oleh bank penyelenggara antara lain, penggunaan media teknologi komunikasi dan pengadaan *call center*.

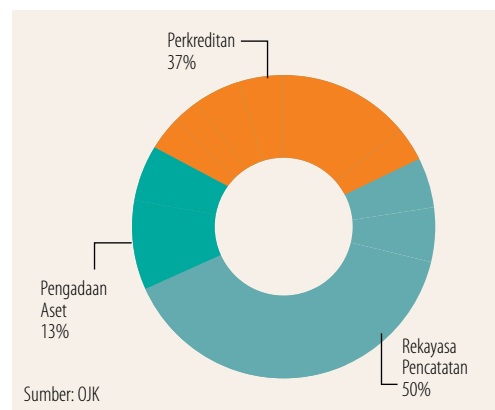
D. Penegakan Kepatuhan Bank

1) Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

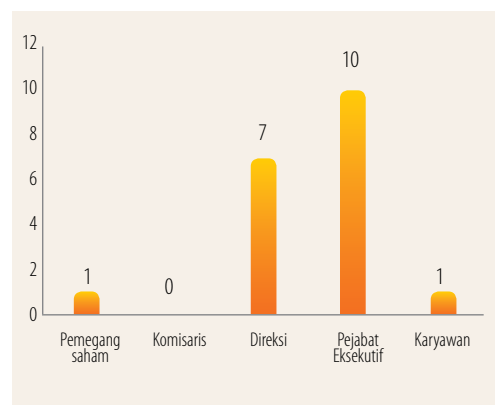
Selama periode laporan, OJK menindaklanjuti 31 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diduga *fraud* pada 12 kantor bank, termasuk *carry over* periode sebelumnya. Dari hasil tindak lanjut tersebut telah dilakukan investigasi

terhadap 14 PKP pada tujuh kantor bank (lima kantor BPR dan dua kantor Bank Umum) dan 17 PKP pada lima kantor bank (lima kantor BPR) dikembalikan kepada satuan kerja pengawasan bank untuk dilakukan pembinaan.

Pada periode yang sama, OJK menangani dugaan tindak pidana perbankan (*tipibank*) dengan sebaran dibidang perkreditan sebesar 37% dan pengadaan aset sebesar 13% serta rekayasa pencatatan sebesar 50%. Adapun jumlah pelaku yang diduga melakukan *Tipibank* sebanyak satu Pemegang Saham, tujuh Direksi, 10 Pejabat Eksekutif dan satu karyawan. Selanjutnya, OJK melakukan penyidikan terhadap 10 PKP pada delapan kantor bank.

Grafik II - 2 Sebaran Jenis Dugaan Tipibank Periode Triwulan I-2016

Sumber: OJK

Grafik II - 3 Pelaku Dugaan Tipibank Periode Triwulan I-2016

2) Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum, OJK memberikan 15 keterangan ahli dan/atau saksi kepada Kepolisian atau Kejaksaan yang sedang menangani proses penyelidikan atau penyidikan atau penuntutan suatu perkara yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan.

Tabel II - 6 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No	Jumlah Pegawai	Penugasan		Jenis Bank		Permintaan	
		SAKSI	AHLI	BPR	BU	Kejaksaan	Kepolisian
1	15	0	15	8	7	2	13

E. Kelembagaan Bank Umum

1) Perizinan

Berkaitan dengan perizinan kelembagaan, pada triwulan I-2016, OJK menyelesaikan perubahan nama izin usaha PT Bank Metro Express menjadi izin usaha PT Bank Shinhan Indonesia. Selain itu, OJK menyelesaikan 112 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri dari pembukaan, penutupan, perubahan status, pemindahan alamat, dan perubahan nama dimana sebesar 62,5% terkait dengan penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) (38 perizinan), pemindahan alamat KCP (21 perizinan), dan penutupan Kantor Fungsional (11 perizinan).

Tabel II - 7 Perizinan Perubahan Jaringan Kantor

NO.	JENIS KEGIATAN	Triwulan I-2016
1	Pembukaan Bank Umum	
a.	Kantor Wilayah (Kanwil)	2
b.	Kantor Cabang (KC)	5
c.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	5
d.	Kantor Fungsional (KF)	-
e.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	1

NO.	JENIS KEGIATAN	Triwulan I-2016
2	Penutupan Bank Umum	
a.	Izin Usaha	-
b.	Kantor Perwakilan	-
c.	Kantor Cabang (KC)	2
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	38
e.	Kantor Fungsional (KF)	11
3	Pemindahan Alamat Bank Umum	
a.	Kantor Pusat (KP)	5
b.	Kantor Wilayah (Kanwil)	1
c.	Kantor Cabang (KC)	8
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	21
e.	Kantor Fungsional (KF)	1
f.	Kantor Perwakilan Bank	-
4	Perubahan Status Bank Umum	
a.	Peningkatan Status	
	- KCP menjadi KC	2
	- KK menjadi KCP	7
	- KF menjadi KCP	-
	- KK menjadi KC	-
b.	Penurunan Status Bank Umum	
	- KP menjadi KC	-
	- KC menjadi KCP	2
	- KCP ke KF/KK	-
5	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	1
6	Perubahan Badan Hukum	-
7	Merger Bank Umum	-
8	Izin bank Devisa	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-
	Jumlah	112

2) Jaringan Kantor

Selama periode laporan, perkembangan jaringan kantor BUK mengalami peningkatan sebanyak 685 jaringan kantor menjadi 132.016 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada ATM/ADM sebanyak 634, yang diikuti dengan Kas Keliling (28), Kantor Kas (24), *Payment Point* (21), Kantor Cabang Bank Asing (10), Kantor Pusat Non Operasional (dua), Kantor Cabang Dalam Negeri (satu). Sementara itu, untuk Kantor Fungsional (konvensional dan syariah) berkurang sebanyak 22 kantor, Kantor Cabang Pembantu Dalam Negeri berkurang 10 kantor, Kantor Pusat Operasional

berkurang dua kantor dan Kantor Wilayah Bank Umum (konvensional dan syariah) berkurang satu kantor.

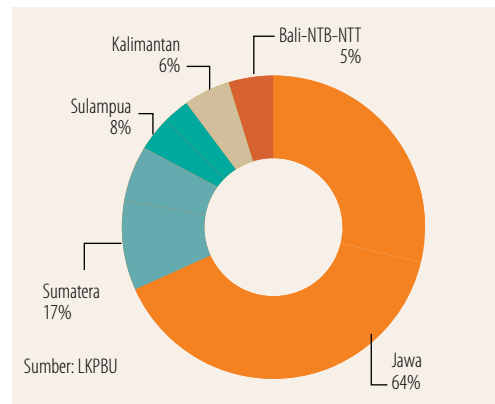
Tabel II - 8 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

STATUS KANTOR	Triwulan IV-2015	Triwulan I-2016	Perubahan
Kantor Pusat Operasional	56	54	(2)
Kantor Pusat Non Operasional	54	56	2
Kantor Cabang Bank Asing	-	10	10
Kantor Wilayah Bank Umum (Konvensional+Syariah)	157	156	(1)
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.833	2.834	1
Kantor Cabang (Luar Negeri)	-	-	-
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	32	32	-
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	17.158	17.148	(10)
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-	-
Kantor Kas	10.613	10.637	24
Kantor Fungsional (Konvensional+Syariah)	1.786	1.764	(22)
Payment Point	1.631	1.652	21
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	1.414	1.442	28
Kantor di bawah KCP KCBA yang Tidak Termasuk 11,12,13,14 *)	24	24	-
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	2	2	-
ATM/ADM	95.571	96.205	634
TOTAL	131.331	132.016	685

Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor BUK sebagian besar berada di Jawa dengan jumlah sebanyak 84.339 jaringan kantor (64%), diikuti oleh Sumatera 21.832 (17%), Sulampua sebanyak 10.682 (8%), Kalimantan 8.371 (6%), dan Bali-NTB-NTT 6.792 (5%). Peningkatan jumlah jaringan kantor terbesar pada triwulan I-2016 dibandingkan triwulan sebelumnya berada di pulau Jawa yaitu sebanyak 335 jaringan kantor, diikuti oleh Kalimantan bertambah 133 jaringan kantor, Sumatera bertambah 97 jaringan kantor, Sulampua bertambah 80 jaringan kantor, dan Bali-NTB-NTT bertambah 40 jaringan kantor.

Grafik II - 4 Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia Triwulan I-2016



3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Selama periode laporan, terdapat 37 pemohon *Fit & Proper Test New Entry* yang lulus mengikuti proses wawancara yang terdiri dari dua anggota Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSP/PSPT), 10 anggota Dewan Komisaris dan 25 anggota Direksi. Dari 37 yang lulus proses wawancara tersebut, 41 peserta mendapatkan Surat Keputusan Lulus, dimana empat diantaranya merupakan *carry over* dari triwulan sebelumnya.

Tabel II - 9 FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Selama Triwulan I-2016

New Entry	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Jumlah Tidak Ditindak-lanjuti	Tri wulan I-2016
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	2	0	0	0	0	2
Dewan Komisaris	10	0	12	0	8	30
Direksi	25	1	29	1	10	66
Total	37	1	41	1	18	98

F. Kelembagaan BPR

1) Perizinan

Pada triwulan I-2016, terdapat 25 permohonan yang diproses yang terdiri dari 17 BPR dalam pengawasan

husus, tiga proses pendirian BPR, tiga proses merger BPR, dan dua proses pencabutan izin usaha.

Tabel II - 10 Perizinan BPR

Perizinan BPR	Triwulan I-2016
Pendirian BPR	3
Merger BPR	3
Konsolidasi BPR	0
BPR dalam Pengawasan Khusus	17
Pencabutan Izin Usaha	2
Konversi Syariah	0
Total	25

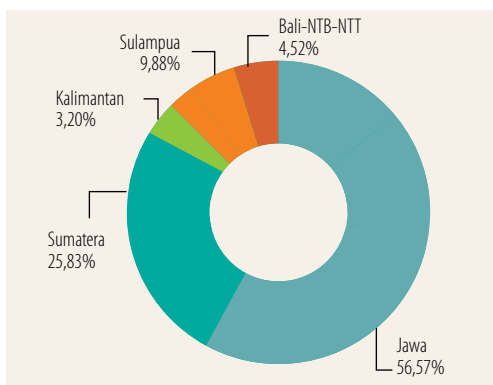
Sumber: SIMWAS BPR, Maret 2016

2) Jaringan Kantor

Jumlah BPR pada triwulan I-2016 masih sama dengan triwulan sebelumnya yaitu sebanyak 1.635 BPR. Adapun jumlah jaringan kantor dari 1.635 BPR tersebut berjumlah 6.024 kantor bertambah 924 kantor dibandingkan triwulan IV-2015. Penambahan jumlah kantor terdapat di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulampua.

Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih belum merata, yaitu masih terpusat di pulau Jawa (56,57% atau 3.408 kantor), diikuti pulau Sumatera (25,83% atau 1556 kantor), pulau Bali-NTB-NTT (4,52% atau 272 kantor), pulau Sulampua (9,88% atau 595 kantor), dan pulau Kalimantan (3,20% atau 193 kantor).

Grafik II - 5 Jaringan Kantor BPR



Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), Maret 2016

3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Pada triwulan I-2016, telah dilakukan *Fit and Proper Test New Entry* kepada 98 calon pengurus BPR dan PSP BPR dengan hasil 72 calon Pengurus/PSP BPR yang mendapatkan persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP dan 26 calon Pengurus/PSP BPR yang ditolak.

Tabel II - 11 Daftar Hasil *Fit and Proper Test New Entry* BPR

Perizinan BPR	Triwulan I-2016		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Pendirian BPR	35	15	50
Merger BPR	36	11	47
Konsolidasi BPR	1	0	1
Total	72	26	98

Sumber: SIMWAS BPR

2.2.2 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1) Pengawasan Transaksi Saham

Sampai akhir periode laporan, terkait Pengawasan Transaksi Efek, OJK melakukan *monitoring* terhadap 37 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar dengan hasil dua saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan dan 10 saham telah diputuskan untuk dicabut, serta 25 saham sedang dilakukan *monitoring*.

OJK juga melakukan penelaahan terhadap dua saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity*. Terkait dengan pemeriksaan teknis, OJK melakukan pemeriksaan terhadap satu saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan

adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam.

2) Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya.

Terkait dengan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya, selama periode laporan, OJK melakukan penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) bulan Januari, Februari dan Maret berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek masing-masing oleh 14, 18, dan 16 Partisipan. Total frekuensi keterlambatan pelaporan sebanyak 442 kali. OJK juga melakukan *review alert* pada bulan Januari dan Februari yang menghasilkan 6.966 alert obligasi pemerintah, 3.201 *alert* obligasi korporasi dan 172 *alert* waran. Saat ini sedang dilakukan *monitoring* terhadap tujuh obligasi pemerintah, 11 obligasi korporasi dan tiga waran.

OJK juga melakukan permintaan keterangan atas permohonan pembatalan pelaporan transaksi obligasi pada sistem PLTE oleh 15 Partisipan yang terdiri dari 461 transaksi. Jumlah pelaporan transaksi obligasi yang disetujui pembatalannya sebanyak 21 transaksi. Terkait dengan penelaahan, OJK melakukan penelaahan atas laporan bulanan mengenai kecenderungan Pasar Surat Utang dari *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA).

3) Pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE)

dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: melakukan analisis dan menyampaikan tanggapan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Rencana Kerja triwulan IV-2015 PT BEI, PT KPEI, PT KSEI dan PT P3IEI; dan melakukan analisis dan menyampaikan penetapan Apresiasi Kinerja bagi Direksi dan Komisaris PT BEI, dan PT KSEI.

Selama periode laporan, OJK juga melakukan analisis dan menyampaikan Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Jabatan Direktur PT KSEI; melakukan analisis dan menyampaikan Tanggapan atas Rencana Perubahan Struktur PT BEI; melakukan analisis dan menyampaikan Tanggapan terhadap Program Kerja *Quick Win* BEI serta penyampaian surat pemberitahuan pada PT KSEI untuk melakukan pelaporan harian secara elektronik melalui sistem *e-reporting*.

4 Pengawasan Perusahaan Efek

Terkait pelaksanaan pengawasan Perusahaan Efek, OJK memberi persetujuan terhadap 16 perubahan susunan direksi, tujuh perubahan susunan komisaris, dan satu perubahan pemegang saham. Selain itu, OJK juga memberi persetujuan terhadap satu persetujuan peningkatan modal dasar dan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek.

OJK melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 140 Perusahaan Efek dengan rata-rata total MKBD mengalami kenaikan sebesar 25,8% menjadi Rp16,9 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada kenaikan liabilitas industri.

OJK juga melakukan analisis dan pemantauan atas 11 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap tujuh Emiten. Terkait dengan kegiatan pemantauan terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) periode bulan Desember 2015 sampai dengan LKPPE periode bulan Februari 2016, terdapat 12 Perusahaan Efek (PE) yang belum menyampaikan LKPPE dan dua PE yang terlambat menyampaikan LKPPE.

5) Pemeriksaan Kepatuhan *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai Harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Sampai akhir periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana pemeriksaan difokuskan pada aspek perdagangan efek, pengembangan dan perencanaan strategis serta organisasi. OJK juga melakukan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan PT Bursa Efek Indonesia.

6) Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek

Pada periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap satu Perusahaan Efek Non Anggota Bursa dimana pemeriksaan tersebut untuk memastikan tingkat kepatuhan Perusahaan Efek terhadap ketentuan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku.

7) Pemeriksaan Teknis

Terkait dengan pemeriksaan teknis, OJK menerima empat pengaduan yang terkait dengan Pasar Modal dimana satu telah selesai dilakukan penelaahan, sedangkan tiga pengaduan lainnya dalam proses penanganan.

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku industri pengelolaan investasi, OJK melakukan aktivitas pengawasan baik berupa pemeriksaan kepatuhan dan pengawasan tindakan korporasi pelaku, dimana pemeriksaan dilakukan terhadap delapan kantor pusat Manajer Investasi (MI), satu Kantor Cabang MI, dan 16 kantor cabang APERD. Sampai akhir periode, terdapat satu MI dalam proses finalisasi LHP dan delapan MI masih dalam tahap proses permintaan konfirmasi ke MI.

Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan terhadap 16 kantor cabang APERD dimana enam APERD telah selesai LHP nya, enam APERD dalam proses finalisasi LHP, dan empat APERD masih dalam proses permintaan konfirmasi ke APERD. OJK juga melakukan pemantauan hasil tindak lanjut pemeriksaan terhadap LHP yang telah disampaikan kepada pelaku industri pengelolaan investasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelaku telah menindaklanjuti rekomendasi OJK atas hasil pemeriksaan selambat-lambatnya selama 90 hari kerja.

Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi, dimana terdapat dua MI yang tidak menyampaikan laporan. OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan dimana satu MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD.

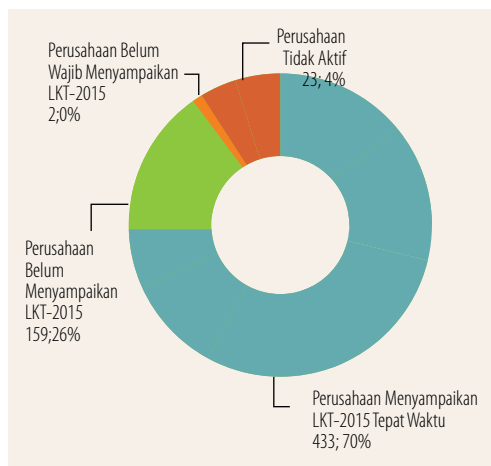
C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK melakukan Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik melalui pengawasan atas berbagai tindakan yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik atas 48 transaksi afiliasi dimana terdapat satu transaksi afiliasi bersamaan dengan

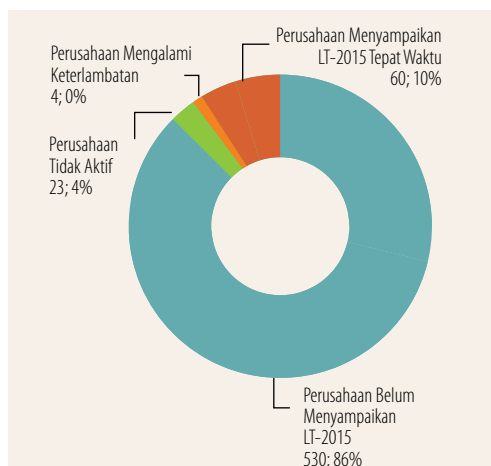
transaksi material, 11 transaksi material tidak memerlukan RUPS, satu transaksi material yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, dua pembagian dividen berpakas, delapan laporan *buyback* saham, 18 laporan *buyback* saham dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis, satu penelaahan atas penawaran tender, dan tiga penelaahan atas rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain pemantauan atas Laporan Keuangan Tahunan (LKT) dan Laporan Tahunan (LT) dengan detail penyampaian digambarkan pada grafik di bawah.

Grafik II - 6 Penyampaian LKT 2015



Grafik II - 7 Penyampaian LT 2015



Berdasarkan pengawasan OJK terdapat 109 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (LRPD) dimana dari LRPD tersebut terdapat delapan Emiten terlambat menyampaikan laporan. Selanjutnya, OJK melakukan pemantauan laporan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 175 laporan keterbukaan informasi material atau kejadian penting, 59 laporan hasil pemeringkatan efek, 62 hasil RUPS Emiten dan Perusahaan Publik, serta 10 laporan penajatan Penawaran Umum.

OJK juga melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah laporan pada triwulan ini sebanyak 605 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. Pada triwulan ini, OJK juga melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 10 Emiten yaitu:

- Lima Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum,
- Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama,
- Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama,
- Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik,
- Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Peraturan Nomor, Peraturan

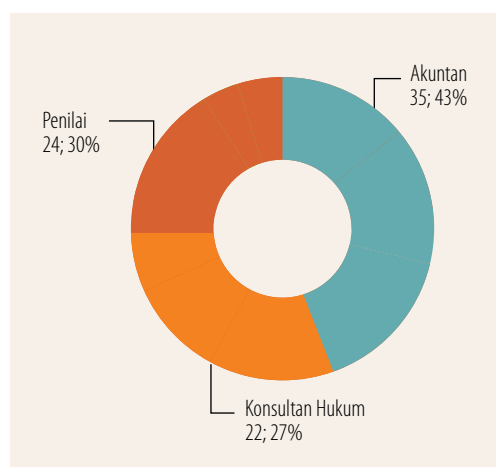
Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

- f. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Sampai akhir periode laporan, telah dilakukan penelaahan atas 81 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, sebagai berikut:

Grafik II - 8 Perubahan Data dan Informasi Profesi Penunjang Pasar Modal



Pada periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap terhadap tiga Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, terkait kegiatan *monitoring onsite*, OJK melakukan pemeriksaan terhadap satu Biro Administrasi Efek, dan pemeriksaan kepatuhan (*onsite*) terhadap dua profesi Penilai. Pemeriksaan Kepatuhan juga dilakukan terhadap 12 Kantor Akuntan Publik (KAP) dimana OJK menyelesaikan reviu bahan pemeriksaan dan menyampaikan berkas pemeriksaan kepada empat KAP.

Terkait dengan permohonan pengajuan OJK menerima satu permohonan pengajuan calon Dewan Komisaris baru Perusahaan Pemingkat Efek dan sedang dalam proses pelaksanaan *Fit and Proper Test*. Selanjutnya, OJK menelaah 15 permohonan izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal, dimana telah dikeluarkan tiga Surat Keputusan Pemberian Izin ASPM.

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1) Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas OJK adalah mengawasi kegiatan di Pasar Modal, baik melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kredibilitas OJK. Dari sisi industri, penegakan hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan serta kepastian hukum di sektor jasa keuangan.

Terkait dengan penegakan hukum dalam pemeriksaan Pasar Modal, OJK menangani Pemeriksaan sebanyak 13 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik; dan 33 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek; serta empat Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi

2) Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

1. Penetapan Sanksi Administratif

Selama periode laporan, OJK menetapkan sebanyak 227 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, dimana 50 sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis, 131 Sanksi Administratif Berupa Denda, 43 Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar, serta tiga Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin, dimana terkait dengan Sanksi berupa denda dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 127 Sanksi dikenakan kepada Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Partisipan *Centralized Trading Platform* Penerima Laporan Transaksi Efek (CTP PLTE), Emiten, Perusahaan Publik, Bank Kustodian, Konsultan Hukum, Penilai, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) karena keterlambatan penyampaian laporan dengan total nilai Denda Rp1.471.050.000,00 dan
- Empat Sanksi dikenakan kepada Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan pegawai Perusahaan Efek karena kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman dengan total nilai Denda Rp250.000.000,00.

OJK juga mengenakan satu Perintah Tertulis kepada pegawai Manajer Investasi karena kasus

pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman. Selain itu, OJK menetapkan 17 Surat Teguran Pertama, dan tujuh Surat Teguran Kedua karena keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dimaksud. Selanjutnya, OJK memproses pengenaan sanksi administratif karena keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak 30 rekomendasi sanksi administratif serta tujuh kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

2. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama periode laporan, OJK menindaklanjuti 18 permohonan keberatan, dimana empat permohonan keberatan telah ditanggapi dan 14 permohonan keberatan masih dalam proses. Dari permohonan keberatan yang sudah ditanggapi, tiga permohonan dinyatakan ditolak, satu permohonan keberatan dinyatakan diterima.

Permohonan keberatan yang dinyatakan ditolak meliputi permohonan keberatan terkait Sanksi Administratif Berupa Denda yang diajukan oleh Perusahaan Efek, dan Emiten. Permohonan keberatan yang dinyatakan diterima adalah permohonan keberatan yang diajukan oleh Emiten terkait Sanksi Administratif Berupa Denda.

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

Selama periode laporan, OJK melakukan analisis terhadap 39 laporan yang seluruhnya merupakan laporan keuangan perusahaan terdiri dari 33 laporan keuangan perusahaan asuransi umum, empat laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa serta dua laporan perusahaan reasuransi. OJK juga melakukan pemeriksaan terhadap delapan asuransi umum, dua perusahaan asuransi jiwa dan satu perusahaan asuransi sosial.

OJK juga menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak sembilan laporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari lima Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan empat Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF). Selama triwulan I-2016, OJK menerbitkan hasil kesimpulan pemeriksaan di kantor OJK terhadap dua perusahaan asuransi. OJK juga menerbitkan 22 surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi. Selain itu terkait permohonan/penambahan Dana Jaminan, OJK memproses 16 permohonan.

Terkait dengan sanksi peringatan, OJK memberikan 58 perusahaan asuransi berupa sanksi peringatan pertama dan enam perusahaan berupa sanksi peringatan kedua. Selain itu, OJK juga mencabut sanksi yang terdiri dari 13 surat pencabutan sanksi peringatan pertama dan empat surat pencabutan sanksi peringatan kedua karena perusahaan telah mengatasi penyebab dikenakannya sanksi.

Terkait dengan permohonan, OJK menyelesaikan 26 permohonan tingkat kesehatan keuangan, dan menganalisa dan menindaklanjuti empat permohonan

terkait pengesahan cadangan premi. OJK juga menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 77 tindak lanjut.

B. Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

Selama periode laporan OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap delapan Dana Pensiun dan melakukan pemantauan tindak lanjut secara langsung terhadap lima Dana Pensiun. Selain itu, OJK menerbitkan enam Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan 11 Laporan Hasil Pemeriksaan Final.

Sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan, OJK mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan periodik dan laporan lainnya, dimana OJK menerima sebanyak 59 Laporan Semester II-2015, tujuh Laporan Aktuaris, 146 Laporan Teknis Tahun 2015, 29 Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2015, 13 Daftar Investasi Bulanan, 18 Laporan Investasi *Unaudited* tahun 2015, 21 Laporan Investasi *Audited* Tahun 2015, dan 57 Laporan Keuangan Bulanan.

Terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, OJK menerima laporan berkala sebanyak 14 dokumen laporan berkala dengan rincian 10 laporan keuangan bulanan selama periode laporan dan empat laporan pengelolaan program.

C. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan langsung dengan menerapkan *risk based supervision* (RBS) terhadap 13 Perusahaan Pembiayaan. Terkait dengan penyampaian laporan *self assessment* atas tingkat risiko dengan batas waktu 28 Februari 2016, masih terdapat 18 Perusahaan Pembiayaan yang belum

menyampaikan laporan *self assessment* atas tingkat risiko.

Selain itu, terkait sanksi administratif, dimana sanksi tersebut dikenakan kepada setiap perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura yang tidak memenuhi ketentuan berupa sanksi administratif I, sanksi administratif II, sanksi administratif III, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. OJK mengenakan 183 sanksi administratif kepada lembaga pembiayaan dan saat ini masih terdapat 73 sanksi administratif yang masih dalam *monitoring*.

D. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Selama periode laporan, OJK memberikan izin usaha LKM kepada sebanyak 22 LKM, dimana terdapat tiga diantaranya adalah izin usaha penuh, sedangkan 19 sisanya adalah izin usaha bersyarat. Berdasarkan prinsip kegiatan usahanya, tujuh LKM menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan 15 LKM lainnya menjalankan kegiatan usaha secara konvensional.

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Sampai akhir periode laporan, OJK melakukan kegiatan pengawasan tidak langsung berupa analisis atas laporan bulanan tersebut yang mencakup 19 Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

F. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Terkait dengan pengawasan di Perusahaan Jasa Penunjang IKNB, OJK melakukan analisa

terhadap 142 laporan keuangan semester II-2015, dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap 12 perusahaan. Selain itu, OJK juga menerbitkan LHP sebanyak 10 LHPs dan enam LHPF. Selama periode laporan, OJK juga menerbitkan 27 sanksi peringatan.

G. Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

OJK melaksanakan fungsi perizinan kepada perusahaan dan profesi penunjang IKNB seperti perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi, berikut detail kegiatan yang telah dilakukan OJK:

a. Pemberian dan Pencabutan Izin Usaha

Sepanjang periode laporan, OJK menyelesaikan permohonan izin usaha perusahaan jasa penunjang IKNB sebanyak lima perusahaan dan terdapat tujuh perusahaan yang dalam proses menunggu kelengkapan dokumen. Selain itu, terdapat satu perusahaan yang dicabut izin usahanya dan dua perusahaan sedang dalam proses pencabutan izin usaha.

b. Perubahan Nama Perusahaan

Terkait dengan permohonan perubahan nama perusahaan jasa penunjang IKNB, OJK menerima berdasarkan data *outstanding* sebanyak tiga permohonan, dimana sebanyak satu permohonan telah diberikan izin perubahan nama dan dua permohonan sedang dalam proses kelengkapan dokumen perusahaan.

Tabel II - 12 Rekapitulasi Kegiatan Perizinan di Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan I - 2016

No	Jenis Layanan	Permohonan Triwulan I tahun 2016	Outstanding Triwulan IV 2015	Status		
				Selesai	Proses*	Batal
1	Pemberian Izin Usaha	9	3	5	7	-
2	Pencabutan Izin Usaha	2	1	1	2	-
3	Perubahan Kepemilikan	7	34	8	33	-
4	Penambahan Modal	7	8	4	11	-
5	Perubahan Pengurus	15	18	11	22	-
6	Perubahan Alamat	10	5	6	9	-
7	Pembukaan Kantor Cabang	2	1	3	0	-
8	Perubahan Nama	0	3	1	2	-
9	Pendaftaran Tenaga Ahli	13	10	12	11	-
10	Pendaftaran Tenaga Kerja Asing	2	0	1	1	-

* Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, menunggu penjadwalan fit & proper atau masih proses analisis.

Tabel II - 13 Pemberian Izin Usaha

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Status	Nomor Keputusan	Tanggal
1	PT Swadharna Jasa Pialang Asuransi	PA	Selesai	KEP-12/NB.1/2016	04/01/2016
2	PT Lintas Insan Karya Sejahtera Pialang Reasuransi	PR	Selesai	KEP-13/NB.1/2016	24/02/2016
3	PT Smartindo Pialang Reasuransi	PR	Selesai	KEP-17/NB.1/2016	25/02/2016
4	PT Bastama Mitra Persada	PA	Selesai	KEP-18/NB.1/2016	22/03/2016
5	PT Mitra Ibisnis Terapan	PA	Selesai	KEP-01/NB.1/2016	28/03/2016

Tabel II - 14 Pencabutan Izin Usaha

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Status
1	PT Fortice Adhitama	PR	Selesai

Tabel II - 15 Pemberian Izin Perubahan Nama Perusahaan

No	Perusahaan (d/h)	Nama Baru	Jenis Usaha	Status
1	PT Adi Pratama Asia	PT Asia Reinsurance Brokers Indonesia	PR	Selesai

c. Persetujuan Perubahan Kepemilikan dan Penambahan Modal

OJK juga menerima permohonan perubahan kepemilikan perusahaan sebanyak tujuh permohonan dan *outstanding* periode sebelumnya sebanyak 34 permohonan, dimana sebanyak delapan permohonan disetujui dan 33 permohonan masih dalam proses persetujuan.

Selain itu, OJK juga menerima tujuh permohonan penambahan modal

dan delapan *outstanding* dari periode sebelumnya dimana sebanyak empat permohonan telah disetujui dan 11 permohonan dalam proses menunggu kelengkapan dokumen.

d. Persetujuan Perubahan Pengurus

Perubahan pengurus perusahaan harus dilaporkan kepada OJK untuk diadministrasikan setelah memenuhi persyaratan termasuk akta perubahan anggaran dasar dan Pihak Utama yang baru menjabat telah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Sepanjang triwulan I-2016, OJK menyetujui 11 Perubahan Pengurus dan 22 permohonan sedang dalam proses.

e. Pencatatan Perubahan Alamat dan Pembukaan Kantor Cabang

Sepanjang periode laporan, OJK menerima 10 permohonan perubahan alamat dan *outstanding* periode sebelumnya sebanyak lima

permohonan, dimana sebanyak enam permohonan telah selesai diadministrasikan dan sembilan permohonan sedang dalam proses melengkapi dokumen. Selain itu, sepanjang triwulan I-2016 OJK menerima permohonan pembukaan kantor cabang sebanyak dua permohonan dan *outstanding* triwulan IV-2015 sebanyak satu permohonan.

f. Pendaftaran Tenaga Ahli

OJK menerima permohonan pendaftaran tenaga ahli jasa penunjang IKNB sebanyak 13 orang dan menindaklanjuti *outstanding* periode sebelumnya sebanyak 10 permohonan. Jumlah tenaga ahli yang didaftarkan oleh perusahaan dan diberikan nomor registrasi adalah sebanyak 12 orang. Selain itu, permohonan pendaftaran dengan status menunggu kelengkapan dokumen sebanyak 11 orang.

g. Pendaftaran Tenaga Kerja Asing

Sampai akhir periode laporan, OJK menerima dua permohonan pendaftaran tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan jasa penunjang IKNB dimana sebanyak satu orang tenaga kerja asing telah diadministrasikan, dan satu permohonan sedang dalam proses.

h. Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) bagi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, dan Tenaga Ahli

PKK dilaksanakan untuk direksi, komisaris, pemegang saham pengendali, tenaga ahli, dan tenaga kerja asing di perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. Penetapan hasil PKK

sepanjang triwulan I-2016 terlampir sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel II - 16 Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) selama Triwulan I 2016

Jabatan	Pelaksanaan PKK Triwulan I 2016		Jumlah
	Lulus	Tidak Lulus	
Pemegang Saham Pengendali	11	4	15
Komisaris	22	1	23
Direksi	17	2	19
Tenaga Ahli	15	1	16
Tenaga Kerja Asing	-	1	1
Jumlah	65	9	74

i. Kinerja Industri dan pengaturan

Selama periode laporan, OJK memberikan izin usaha terhadap tiga Perusahaan Pialang Asuransi dan dua Perusahaan Pialang Reasuransi, dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel II - 17 Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Perusahaan	s.d. Triwulan IV - 2015	Triwulan I 2016		Jumlah
			Pemberian Izin	Pencabutan Izin	
1.	Pialang Asuransi	166	+3	0	169
2.	Pialang Reasuransi	37	+2	(1)	38
3.	Jasa Penilai Kerugian	28	0	(1)	27
	Jumlah	231	+5	(2)	234

H. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Selama triwulan I-2016, OJK memproses 1.730 permohonan/pelaporan, dimana sejumlah 932 permohonan/pelaporan telah diselesaikan serta 798 permohonan telah ditanggapi dan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan perizinan kelembagaan Industri Keuangan Non Bank sepanjang triwulan I-2016 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II - 18 Rincian Permohonan Perizinan Kelembagaan IKNB

Kegiatan	Permohonan TWI - 2016	Selesai
<i>Fit and Proper Test</i>	318	233
Produk	620	356
Izin usaha	7	3
Pencabutan Izin Usaha	6	4
Proses Likuidasi	9	5
Perubahan AD/Perubahan Kepemilikan/ Perubahan Nama/ Perubahan PDP	274	77
Kantor Cabang	347	166
Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang	149	88
Jumlah	1.730	932

Rincian kegiatan untuk setiap kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Selama triwulan I-2016, OJK memproses 318 permohonan uji kemampuan dan kepatutan Pihak Utama IKNB dimana sebanyak 233 permohonan telah dilaksanakan dan 85 permohonan masih dalam proses penjadwalan dan kelengkapan dokumen.

Tabel berikut adalah rincian kegiatan *fit and proper test* untuk setiap sektor di IKNB:

Tabel II - 19 Rincian *Fit and proper test* untuk setiap sektor di IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi	Dalam proses analisis
	s.d. Desember 2015	Triwulan I - 2016				
Asuransi	15	94	109	75	34	0
Dana Pensiun	13	58	71	64	7	0
Perusahaan Pembiayaan dan LJK Khusus	39	95	134	79	16	39
Jumlah	67	251	318	233	46	39

Berkaitan dengan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi 233 pihak utama IKNB tersebut, OJK menetapkan kelulusan bagi 196 pihak utama IKNB, berikut rincian penetapan kelulusan berdasarkan pihak utama dan sektor IKNB:

Tabel II - 20 Rincian Penetapan Kelulusan Berdasarkan Pihak Utama dan Sektor IKNB

IKNB	Direktur	Komisaris	Komisaris Independen	PSP	Tenaga Ahli	TKA	Total	Lulus	Tidak Lulus	Grand Total
Asuransi	24	13	13	4	0	4	58	52	6	58
Dana Pensiun	21	12	20	5	10	7	75	71	4	75
Pembiayaan	37	20	0	0	0	0	57	51	6	57
Penjaminan	3	3	0	0	0	0	6	6	0	6
Jumlah	85	48	33	9	10	11	196	180	16	196

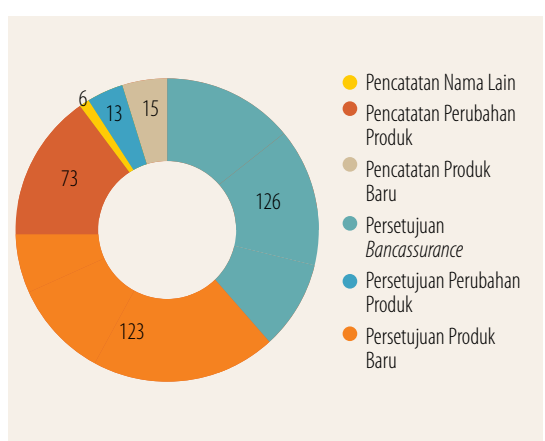
2. Produk Asuransi

Selama triwulan I-2016, OJK menerima 620 permohonan/pelaporan dimana 356 permohonan produk/*bancassurance* telah selesai dicatat/ditetujui dan 264 permohonan masih dalam proses kelengkapan.

Tabel II - 21 Rincian Kegiatan Terkait Pencatatan, pelaporan, dan persetujuan produk asuransi

Uraian	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi	Dalam proses analisis
	s.d. Desember 2015	Triwulan I - 2016				
Pencatatan Nama Lain	2	10	12	6	6	0
Pencatatan Perubahan Produk	40	69	109	73	35	1
Pencatatan Produk Baru	6	13	19	15	4	0
Persetujuan Bancassurance	102	87	189	126	63	0
Persetujuan Perubahan Produk	5	40	45	13	32	0
Persetujuan Produk Baru	91	155	246	123	121	2
Jumlah	246	374	620	356	261	3

Selanjutnya, berikut diagram penyelesaian permohonan/ pelaporan produk asuransi berdasarkan jenis permohonan triwulan I-2016:

Grafik II - 9 Penyelesaian Permohonan Produk Asuransi Triwulan I-2016

3. Izin Usaha

Permohonan yang diterima adalah permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dan izin usaha Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus. Selama triwulan I-2016, terdapat tujuh permohonan pemberian izin usaha IKNB, dimana dua permohonan berasal dari tahun sebelumnya dan lima permohonan diterima pada triwulan I-2016, dengan rincian berikut:

Tabel II - 22 Rincian Permohonan Izin Usaha

IKNB	Permohonan		Total	Selesai		Telah diproses dan ditanggapi	Dalam proses analisis
	s.d. Desember 2015	Triwulan I - 2016		Izin	Batal		
Asuransi	1	1	2	0	1	0	1
Dana Pensiun	0	0	0	0	0	0	0
LP & LJK Khusus	1	4	5	1	1	2	1
Jumlah	2	5	7	1	2	2	2

Adapun satu izin usaha diberikan kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak.

4. Pencabutan Izin Usaha

Kegiatan ini merupakan kegiatan pencabutan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, izin usaha Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan pembubaran Dana Pensiun. Pencabutan izin usaha ini dapat terjadi karena penerapan sanksi maupun atas inisiatif IKNB atau pendiri IKNB tersebut. Selama triwulan I-2016, OJK memproses enam permohonan pencabutan izin usaha, dimana tiga permohonan disampaikan di 2015, dan tiga permohonan disampaikan di triwulan I-2016, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 23 Rincian Pencabutan Izin Usaha

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi	Dalam proses analisis
	s.d. Desember 2015	Triwulan I - 2016				
Asuransi	0	0	0	0	0	0
Dana Pensiun	1	2	3	2	0	1
LP & LJK Khusus	2	1	3	2	0	1
Jumlah	1	3	6	4	0	2

Dari enam permohonan dimaksud, empat permohonan telah ditetapkan keputusan pencabutan izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan dua permohonan masih dalam proses analisis.

Tabel II - 24 Penyelesaian Pencabutan Izin Usaha

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha
1	Koperasi Pembiayaan Indonesia	Perusahaan Pembiayaan
2	Kencana Internusa Artha Finance (merger)	Perusahaan Pembiayaan
3	Dana Pensiun PT Maskapai Reasuransi Indonesia	Dana Pensiun
4	Dana Pensiun Electrolux Indonesia	Dana Pensiun

5. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan / Perubahan Kepemilikan Perusahaan / Perubahan Nama / Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP)

Permohonan perubahan kepemilikan perusahaan, perubahan modal, dan perubahan nama yang diterima dari Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dan Lembaga Pembiayaan serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus berikut perubahan Peraturan Dana Pensiun selama triwulan I-2016 adalah berjumlah 274 permohonan dimana 198 diantaranya merupakan permohonan yang disampaikan di 2015 namun masih dalam proses menunggu kelengkapan atau sedang dianalisis.

Dari jumlah tersebut, 77 permohonan telah selesai, 122 telah ditanggapi untuk meminta kelengkapan dokumen dan 75 permohonan masih dalam proses analisis.

Berikut rincian kegiatan terkait perubahan kepemilikan perusahaan, perubahan modal, dan perubahan nama untuk Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dan Lembaga Pembiayaan serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus berikut perubahan Peraturan Dana Pensiun:

Tabel II - 25 Rincian Kegiatan Terkait Perubahan Kepemilikan Perusahaan, Perubahan Modal, dan Perubahan Nama

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi*)	Dalam proses analisis
	s.d. Desember 2015	Triwulan I – 2016				
Asuransi						
• Perubahan kepemilikan	8	3	11	6	4	1
• Perubahan Modal/Anggaran Dasar	14	7	21	10	8	3
• Perubahan Nama	2	2	4	1	3	0
• Pengambilalihan	1	1	2	0	1	1
Dana Pensiun						
• Perubahan PDP	20	6	26	8	16	2
Lembaga Pembiayaan & LJK Khusus						
• Perubahan AD/Pemegang Saham	151	51	202	47	88	67
• Perubahan Nama	0	2	2	2	0	0
• Pengambilalihan	2	4	6	3	2	1
Jumlah	198	76	274	77	122	75

Selama triwulan I-2016, terdapat tiga perusahaan yang melaporkan perubahan nama dan telah ditetapkan keputusannya yaitu :

- a. Perubahan nama PT Swadharna Surya Finance menjadi PT Swadharna Nusantara Pembiayaan;
- b. Perubahan nama PT BII Finance Center menjadi PT Maybank Indonesia Finance; dan
- c. Perubahan nama PT Asuransi Dayin Mitra menjadi PT Asuransi Dayin Mitra, Tbk.

Dari 274 permohonan yang diterima, permohonan terbanyak adalah dari perusahaan pembiayaan terkait dengan penyesuaian maksud dan tujuan perusahaan dalam anggaran dasar sesuai dengan amanat Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

6. Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang

Selama triwulan I-2016, terdapat 347 pelaporan kantor cabang yang meliputi pembukaan, pemindahan dan penutupan kantor cabang perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, di mana 166 permohonan telah dicatat/disetujui.

Sementara itu, untuk pencatatan kantor pemasaran dan kantor selain kantor cabang, selama triwulan I-2016 telah diproses 149 permohonan di mana 88 permohonan telah selesai dan sisanya masih dalam proses atau menunggu kelengkapan dokumen.

Berikut rincian kegiatan terkait kantor cabang dan kantor pemasaran Perusahaan Asuransi serta Kantor Selain Kantor Cabang Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus:

Tabel II - 26

Rincian Kegiatan Terkait Kantor Cabang Dan Kantor Pemasaran Perusahaan Asuransi Serta Kantor Selain Kantor Cabang Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi	Dalam proses analisis
	s.d. Desember 2015	Triwulan I - 2016				
Kantor Cabang Perusahaan Asuransi						
• Pembukaan Kantor Cabang	6	2	8	8	0	0
• Penutupan Kantor Cabang	0	0	0	0	0	0
• Perubahan Alamat Kantor Pusat	0	3	3	3	0	0
• Pencatatan Perubahan Alamat	8	6	14	11	1	2
Kantor Cabang Lembaga Pembiayaan dan LJK Khusus						
• Pembukaan Kantor Cabang	37	61	98	51	25	22
• Penutupan Kantor Cabang	11	34	45	11	5	29
• Pencatatan Perubahan Alamat	53	126	179	82	16	81
Jumlah KC	115	232	347	166	47	134
Kantor Cabang Lembaga Pembiayaan dan LJK Khusus						
• KP Perusahaan Asuransi	5	92	97	59	12	26
• KSKC LP dan LJK Khusus	27	25	52	29	7	16
Jumlah	32	117	149	88	19	42

2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

1) Pengembangan Pengawasan Bank Umum

Pada periode laporan, OJK menerbitkan satu pedoman dan sedang menyusun lima pedoman. Pedoman yang diterbitkan adalah Pedoman Analisis Kelayakan Bank Umum sebagai Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menggambarkan alur proses bisnis dan skala kewenangan untuk memutuskan kelayakan bank sebagai penyalur KUR. Pokok-pokok pengaturan dalam pedoman mencakup kriteria-kriteria yang dijadikan pedoman Pengawas untuk melakukan analisis kelayakan Bank Umum sebagai penyalur KUR. Kriteria-kriteria tersebut antara lain meliputi persyaratan tingkat kesehatan, GCG, dan kinerja bank (CAR, LDR/LFR, ROA).

Selanjutnya, lima pedoman pengawasan yang masih dalam proses penyusunan pada triwulan I-2016 adalah:

- RSE DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Rentabilitas.
- RSE DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Permodalan.
- RSE DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan *Good Corporate Governance* (GCG).
- RSE DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
- Pedoman Perhitungan Pemenuhan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)

B. Pengembangan BPR/BPRS

1) Kajian Pengembangan BPR

OJK menerbitkan satu kajian yaitu Kajian Pengawasan Bank Perkreditan

Rakyat Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision-RBS*). Kajian ditujukan untuk mengembangkan metode pengawasan BPR yang efektif dan efisien sehingga BPR dapat tumbuh dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian rakyat, terutama di wilayah regional tempat BPR tersebut berada.

2) Pengembangan Pengawasan BPR

Terkait dengan pengembangan pengawasan BPR, OJK sedang menyusun satu RPDK, satu RSEDK, dan satu pedoman, yaitu:

- a. RPDK Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision-RBS*).

RPDK ini merupakan pedoman bagi Pengawas BPR dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

- b. RSE DK Pemahaman Terhadap BPR (*Know Your BPR/KYBPR*).

RSEDK ini merupakan turunan dari PDK Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko yang merupakan acuan pengawas BPR dalam pelaksanaan tugasnya.

- c. Pedoman Pengawasan Badan Kredit Desa (BKD).

Badan Kredit Desa (BKD) adalah Bank Desa, Lumbung Desa, atau Badan Kredit Desa yang mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dan diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka semua jenis Lembaga Jasa Keuangan (LJK) diawasi oleh OJK sebagai satu-

satunya institusi yang melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap LJK termasuk BKD sebagai bagian dari LJK.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan BKD dimaksud serta sejalan dengan terbitnya POJK No.10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa Yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat, maka disusun Pedoman Pengawasan BKD sebagai acuan pengawas di Kantor Regional/ Kantor OJK yang memiliki BKD melaksanakan pengawasan pada masa transisi yaitu akhir 2019.

C. Pengembangan Bank Terintegrasi

1) Kajian Terkait Pengawasan Terintegrasi

Selama periode laporan OJK mengkaji beberapa isu terkait dengan pengaturan terintegrasi, antara lain: (i) Kajian definisi dan penetapan kriteria Konglomerasi Keuangan (ii) Kajian *Gap Analysis* Ketentuan Pengawasan Terintegrasi OJK terhadap Prinsip-Prinsip Pengawasan Konglomerasi Keuangan *Joint Forum*.

2) Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Pada periode laporan total grup konglomerasi menjadi 98, dimana terdapat 36 grup yang memiliki jenis Konglomerasi Keuangan vertikal, 48 grup yang memiliki jenis Konglomerasi Keuangan horizontal dan 14 grup yang memiliki struktur campuran (*mixed group*). Total aset dari 98 Grup Konglomerasi Keuangan pada posisi Desember 2015 adalah sebesar Rp5.916 Triliun, sedangkan total aset industri perbankan dan industri jasa keuangan Indonesia masing-masing

adalah sebesar Rp6.234 triliun dan Rp7.948 triliun, sehingga persentase perbandingan total aset 98 Grup Konglomerasi Keuangan terhadap total aset industri perbankan dan industri jasa keuangan cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 94,9 % dan 74,4%.

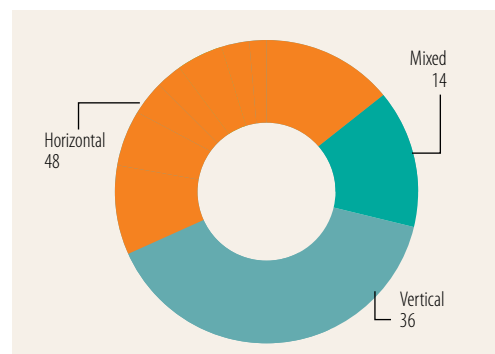
Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan, maka sesuai dengan Pasal 7 PDK No. 1/ PDK.03/2013 Tentang Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan, dibentuk fungsi, tugas, kewenangan, dan perangkat organisasi yang salah satunya adalah Unit Kerja Pengawasan Terintegrasi (UKPT). Pada triwulan I-2016, pembentukan UKPT ditetapkan akan efektif sejak 1 Mei 2016. Berkaitan dengan hal tersebut, pada triwulan I-2016 telah dimulai penyusunan ketentuan internal OJK terkait pengawasan terintegrasi.

3) Implementasi Pengawasan Terintegrasi

Selama triwulan I-2016, terdapat beberapa hal yang dilakukan berkaitan dengan implementasi Pengawasan Terintegrasi antara lain:

- Pengkinian *Know Your Financial Conglomerate* (KYFC) dari lima Grup Konglomerasi Keuangan.
- Persetujuan Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi terhadap *Integrated Risk Rating* (IRR) dan Perencanaan Pengawasan Terintegrasi (*Integrated Supervisory Plan*) untuk empat Grup konglomerasi keuangan dengan Entitas Utama Bank BUKU 4.

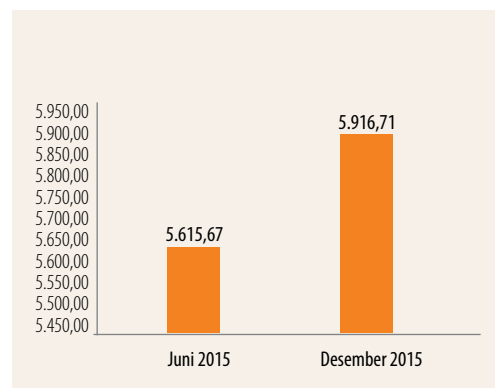
Grafik II - 10 Jenis Konglomerasi Keuangan



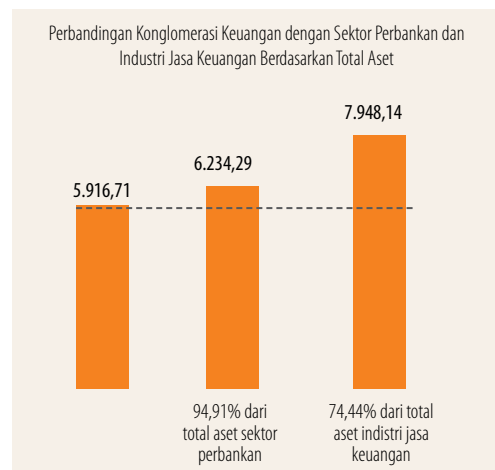
Tabel II - 27 Total Aset Konglomerasi

Total Aset (Rp Triliun)		△ Rp	△ %
Juni 2015	Desember 2015		
5.615,67	5.916,71	301,04	5,36%

Grafik II - 11 Trend Total Aset Konglomerasi Keuangan (dalam triliun rupiah)



Grafik II - 12 Perbandingan Konglomerasi Keuangan dengan SJK (dalam triliun rupiah)



- c. Diskusi dengan Grup konglomerasi mengenai penetapan cakupan struktur Konglomerasi Keuangan, penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola terintegrasi serta pelaksanaan koordinasi pemeriksaan terintegrasi.
- d. Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) Tahap II (*enhancement*), pada triwulan I-2016 telah dilakukan:
 - 1) Penerapan aplikasi SIPT sejak bulan Februari 2016. Aplikasi SIPT dapat diakses dengan alamat: spt.ojk.go.id
 - 2) Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIPT kepada Pengawas pada tanggal 17 - 18 Maret 2016 di Yogyakarta.
 - 3) Penyempurnaan SIPT yang telah dibangun selama 2015, melalui penyusunan dokumen *User Requirement* (UR) penyempurnaan fitur-fitur Aplikasi SIPT yang meliputi:
 - i. Fitur Manajemen Konten (Taksonomi Dokumen).
 - ii. Penyempurnaan pada Modul Data Grup.
 - iii. Penambahan Modul Asisten Pribadi untuk para Pengawas.
 - iv. Penyediaan akses *Single Sign On* (SSO) antara aplikasi SIPT dengan aplikasi Pengawasan Sektor (SIP, SIRIBAS, dan SIPM).

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK melakukan penyusunan beberapa kajian dalam rangka mengembangkan industri pasar modal antara lain:

- **Penyusunan Kajian Mengenai *Clawback-Bookbuilding***

ClawBack merupakan perubahan alokasi porsi penjatahan dari penjatahan pasti menjadi penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perdana Saham (IPO). Kajian ini dilatarbelakangi tindak lanjut program kerja kajian penerapan *bookbuilding* secara elektronik. *Clawback* diperlukan untuk menarik minat investor retail untuk ikut serta dalam Pasar Perdana dengan menyesuaikan alokasi *pool allotment* ketika terjadi kelebihan pemesanan, serta untuk mendorong peningkatan jumlah investor.

- **Penyusunan Kajian Penawaran Umum oleh Perusahaan Asing**

Memasuki 2016, Masyarakat Ekonomi ASEAN ("MEA") mulai diberlakukan termasuk di Indonesia. Dengan diberlakukannya MEA, perusahaan asing dapat melakukan perdagangan, bisnis, maupun investasinya di Indonesia. OJK sebagai regulator di pasar modal melakukan segala persiapan agar dapat bersaing dengan pasar modal regional, salah satu hal yang akan dilakukan OJK adalah mendorong realisasi aturan *cross border offering*, yakni penawaran saham perdana (*Initial Public Offering/IPO*) oleh perusahaan Indonesia di luar negeri dan sebaliknya.

- **Penyusunan kajian terkait Pengendalian Internal Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.**

Penyusunan kajian ini bertujuan merekomendasikan kebutuhan atas pengaturan pengendalian internal Internal Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang sesuai tuntutan saat ini guna mendukung kebutuhan pengawasan dan kepatuhan oleh OJK sehingga pada

akhirnya akan berimplikasi positif bagi operasional Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sendiri.

- **Penyusunan Kajian Penugasan Konsultan Hukum di Pasar Modal.**

Kajian ini bertujuan memetakan kegiatan di Pasar Modal Indonesia yang melibatkan penugasan kepada Konsultan Hukum, memetakan kesesuaian antara hasil penugasan Konsultan Hukum dengan standar yang berlaku, memetakan bentuk kegiatan Pasar Modal di luar negeri yang mensyaratkan penugasan kepada Konsultan Hukum dan risiko yang mungkin terjadi.

- **Penyusunan Kajian Pengukuran Nilai Wajar Portofolio Efek Reksa Dana.**

Kajian ini bertujuan untuk mempelajari implementasi penerapan PSAK 68: Nilai Wajar yang efektif pada 1 Januari 2015 terhadap pengukuran nilai wajar Portofolio Efek Reksa Dana. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan Reksa Dana dalam penerapan ketentuan tersebut.

- **Penyusunan Kajian Pendapat Akuntan atas Aspek Akuntansi Penerbitan Efek Beragun Aset Surat Partisipatif (EBA-SP).**

Kajian bertujuan untuk menganalisis jasa-jasa yang dapat diberikan Akuntan terkait dengan aspek akuntansi EBA-SP, dan memberikan rekomendasi untuk menyusun peraturan terkait aspek akuntansi penerbitan EBA-SP.

- **Penyusunan Kajian *Re-Asurans* Laporan Keuangan dan Penarikan Diri dari Penugasan oleh Akuntan Publik.**

Kajian ini bertujuan mendefinisikan *re-asurans* dan penarikan diri, mengidentifikasi kondisi yang dimungkinkan melakukan *re-asurans* dan penarikan diri, mempelajari praktik dan pengaturan tersebut di negara

lain, dan menganalisis perlu tidaknya pengaturan terkait *re-asurans* dan penarikan diri dari penugasan.

- **Penyusunan Kajian kewenangan OJK untuk mengeluarkan peraturan yang diperkenankan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).**

Kajian bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan OJK untuk menerbitkan peraturan yang dimungkinkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), mempelajari pengaturan oleh *regulatory body* di negara lain terkait SPAP dan Jasa Akuntan Publik; dan menganalisis kemungkinan pengaturan yang sebaiknya dilakukan OJK.

- **Penyusunan Kajian *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik.**

Kajian ini bermaksud untuk memetakan aspek dan kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.

- **Penyusunan Kajian Tata Kelola Perusahaan Efek yang Menjalankan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi.**

Kajian ini dilakukan dalam rangka penyusunan RPOJK Tata Kelola Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

- **Penyusunan Kajian Relaksasi Kewajiban Pasca IPO untuk Emiten UKM**

Tujuan dilakukan kajian relaksasi kewajiban pasca IPO bagi Emiten menengah-kecil dan Perusahaan Publik adalah untuk mengkaji kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Emiten menengah-kecil untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis dan atau standar internasional, dan memberikan kemudahan bagi Perusahaan kecil dan menengah untuk mencari pendanaan di Pasar Modal.



IOSCO Growth and Emerging Markets Committee (GEM-C) Meeting and Conference 2016

OJK menyelenggarakan *IOSCO Growth and Emerging Markets Committee (IOSCO GEM-C) Meeting and Conference 2016* dengan agenda utama yang dilakukan dalam pelaksanaan event ini antara lain :

1. *IOSCO GEM Regulatory Workshop dan Welcome Gala Dinner.*

IOSCO GEM Regulatory Workshop dihadiri 77 peserta (69 dari 77 peserta merupakan peserta internasional yang berasal dari 31 negara) dengan materi antara lain membahas dan simulasi penanganan *cyber attack* terhadap entitas-entitas yang diawasi regulator Pasar Modal dalam menghadapi serangan *cyber* yang berpotensi sistemik.

2. *IOSCO GEM-C Steering Committee Session*

IOSCO GEM-C Steering Committee Session membahas topik antara lain *future cyber security awareness efforts*, penunjukan PIC *cyber security* di *general secretariat*, keterlibatan anggota GEMC dalam sembilan *technical committee* di IOSCO, isu mengenai kesulitan dalam mencari ahli *IFRS implementation* oleh *Monitoring Board*, *plenary meeting*, dan pemilihan *GEM-C Chairman*.

3. *IOSCO GEM-C Plenary Meeting Session*

IOSCO GEM-C Plenary Meeting Session membahas topik yaitu digitalisasi di Pasar Modal dan *Corporate Governance*.

4. *Public Conference*

Penyelenggaraan *public conference* dengan tema *Optimising Innovation and Strengthening Governance in Emerging Market* dan sub topic i) "*SMEs as engines of growth in emerging markets*", ii) "*Digitisation—transforming financial products, services and markets*", dan iii) "*Strengthening Corporate Governance In Emerging Markets*" yang dihadiri 91 peserta internasional dan 132 peserta nasional.

2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank

a. Pengembangan Sistem Informasi LKM

OJK membangun Sistem Informasi LKM (SI LKM) yang berbasis *web* dalam rangka mendukung aktivitas terkait pembinaan dan pengawasan LKM. SI LKM memiliki beberapa fitur yaitu: (i) *E-licensing* adalah fitur aplikasi untuk membantu pihak OJK dalam memproses permohonan izin usaha, baik perizinan usaha baru dan pengukuhan; (ii) *E-reporting* yaitu fitur aplikasi yang digunakan oleh LKM untuk menyampaikan laporan keuangan dan digunakan oleh pembina dan pengawas untuk melakukan analisis laporan keuangan tersebut; (iii) Fitur perubahan kelembagaan digunakan oleh pembina dan pengawas untuk memperbarui data kelembagaan LKM apabila terjadi perubahan data; (iv) Fitur *monitoring* digunakan oleh pembina dan pengawas LKM untuk memantau perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan; serta (v) Sistem Informasi Geografis LKM yang digunakan untuk memetakan hasil inventarisasi LKM di tiap wilayah provinsi hingga ke desa secara nasional.

Pada periode laporan, OJK melakukan pengembangan SI LKM dikarenakan terdapat perubahan ketentuan perizinan usaha LKM berdasarkan Peraturan OJK nomor 61/POJK.05/2015 yang mengubah Peraturan OJK nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM.

b. OJK Proksi

Pada periode laporan, OJK meluncurkan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK Proksi) sebagai pusat pengembangan keuangan mikro dan inklusi keuangan di Indonesia. Tujuan OJK Proksi antara lain memperkuat koordinasi diantara lembaga-lembaga pemerintah, menyediakan forum pembelajaran bagi para pemangku kepentingan dan sebagai pusat

pembelajaran bagi penyusunan kebijakan mengenai keuangan mikro dan keuangan inklusif.

Dalam pembentukannya, OJK menyusun program dan kegiatan OJK Proksi antara lain: riset tematik, pembentukan pusat data dan pengembangan sistem informasi LKM, penerbitan publikasi, pelatihan, serta kajian peraturan dan kebijakan, pelaksanaan seminar, pemberian penghargaan, bimbingan teknis, pertukaran kunjungan, dan berbagai kegiatan lainnya.

c. Pokja Program Pembiayaan Perumahan Sederhana

OJK melakukan diskusi awal yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Para Pelaku Industri Keuangan (APPI dan ASIPPINDO). Selain itu OJK juga melakukan inventarisasi regulasi internal IKNB khususnya dari sisi Keterlibatan Industri Asuransi dan Dana Pensiun sebagai investor jangka panjang.

d. Pokja Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan PP pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM, OJK membentuk Pokja Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif. Selain itu, OJK juga menandatangani Perjanjian Pembiayaan Ekonomi Kreatif kepada UMKM pengrajin jaket dan tas kulit di daerah Garut dengan Pelaku Ekonomi Kreatif dan Koperasi yang disaksikan oleh Bupati Garut dan OJK.

e. Kajian Awal Penyusunan RPOJK tentang Perusahaan Modal Ventura *Start-Up*

Dalam rangka menumbuhkembangkan Perusahaan *Tech Start-up* OJK melakukan kajian atas penyusunan peraturan terkait dengan Perusahaan Modal Ventura *Start-Up*. Beberapa diskusi telah dilakukan dengan pelaku untuk meminta masukan dan saran atas RPOJK.

2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Di tengah berlanjutnya perlambatan ekonomi global pada triwulan I-2016, stabilitas sistem keuangan domestik secara keseluruhan masih terpantau dengan baik. Kinerja industri jasa keuangan masih memadai didukung kinerja keuangan dan profil risiko yang tetap terjaga. Sejalan dengan sentimen positif global dan prospek perekonomian domestik yang membaik, pasar saham dan pasar Surat Berharga Negara juga menunjukkan penguatan. OJK, sebagai bagian dari Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) terus berperan aktif menjaga dan memperkuat stabilitas sistem keuangan.

2.4.1 Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan

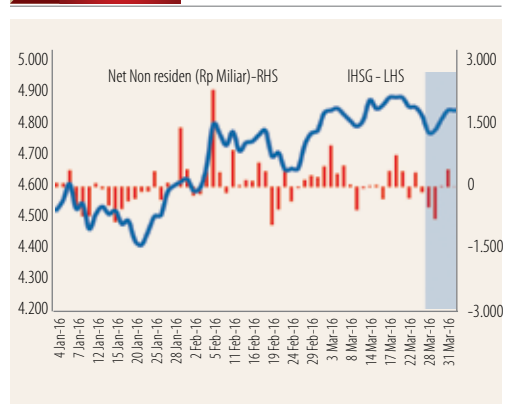
1. Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

Secara umum OJK menilai kondisi sektor jasa keuangan dalam negeri pada periode laporan masih terjaga, di tengah perlambatan ekonomi global dan pasar keuangan global yang masih beresiko. Berkurangnya ketidakpastian global terkait kenaikan *Fed Funds Rate* dan kebijakan suku bunga negatif di Eropa dan Jepang turut berpengaruh terhadap berlanjutnya tren penurunan volatilitas pasar saham yang sudah terjadi dari periode sebelumnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan 5,49% (qtq). Kinerja investor nonresiden juga berhasil membukukan *net buy* di pasar saham domestik (Rp4,2 triliun). Hal ini sejalan dengan penguatan kinerja pasar saham regional seiring pelonggaran kebijakan moneter beberapa negara maju yang berimbang positif terhadap *attractiveness* pasar saham *emerging market* termasuk Indonesia.

Sentimen positif global juga berpengaruh terhadap pasar SBN yang membukukan penguatan tercermin dari imbal hasil (*yield*) SBN yang mencatat penurunan rata-rata sebesar 101 *basis point*. Penurunan terdalem terjadi pada tenor jangka pendek seiring perbaikan

Grafik II - 13 IHSG dan Arus Modal Nonresiden di Pasar Saham



prospek perekonomian domestik. Penguatan pasar SBN sejalan dengan kinerja investor nonresiden yang membukukan *net buy* sebesar Rp36,5 triliun.

Ketahanan industri perbankan dan kesehatan IKNB terpantau masih memadai. Risiko likuiditas, kredit, dan pasar perbankan masih terjaga, ditopang oleh permodalan yang memadai. Pada periode laporan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada pada level 21,9%, jauh di atas ketentuan minimum 8%. *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi juga terjaga pada level yang memadai dan di atas ketentuan yang berlaku (539% untuk asuransi jiwa dan 253% untuk asuransi umum).

Pada perusahaan pembiayaan, *gearing ratio* perusahaan pembiayaan stabil pada level 3,06 kali, dan masih jauh di bawah ketentuan maksimum (10 kali). Tingkat *gearing ratio* tersebut dinilai masih menyediakan banyak ruang untuk pertumbuhan.

Risiko likuiditas di sektor perbankan relatif rendah, tercermin dari alat likuid yang cukup memadai untuk mengantisipasi potensi penarikan Dana Pihak Ketiga. Pada akhir periode, rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat masih cukup tinggi, masing-masing sebesar 94,4% dan 19,4%

Memasuki periode laporan, risiko kredit terpantau sedikit meningkat. Meski demikian,

pada tengah periode *Non-Performing Loan* (NPL) industri perbankan masih terjaga pada level rendah, yaitu 2,5% *gross* dan 1,4% *net*. Sedangkan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan juga terjaga pada level yang rendah, yaitu 1,56%. NPL maupun NPF sedikit meningkat pada periode laporan namun masih terjaga jauh di bawah *threshold* (5%).

Persepsi risiko yang membaik berpengaruh terhadap risiko pasar keuangan domestik yang *manageable*. Di sektor perbankan, Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) tercatat sebesar 1,45%. Nilai investasi industri asuransi dan dana pensiun juga menunjukkan peningkatan seiring kinerja pasar saham dan obligasi yang menguat. Sementara itu, Utang Luar Negeri (ULN) perusahaan pembiayaan melanjutkan penurunan, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan piutang pembiayaan serta penguatan nilai tukar Rupiah.

2. Respons Kebijakan di Sektor Jasa Keuangan

OJK memantau perkembangan terkini pasar dan perekonomian global maupun domestik yang berpotensi mempengaruhi kondisi sektor jasa keuangan nasional. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga diperkuat agar kinerja industri keuangan dan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga. OJK melanjutkan respons kebijakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional. OJK memastikan bahwa lembaga jasa keuangan telah melakukan langkah-langkah antisipasi yang memadai dalam menjaga agar risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar tetap *manageable*.

Sebagai bagian dari upaya nasional menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif, OJK mendorong terlaksananya Program Percepatan Akses Keuangan Daerah dengan berperan aktif dalam pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait lainnya. Tim ini nantinya akan menggalang kerja sama di antara berbagai elemen di daerah untuk mencari terobosan dalam membuka akses keuangan

yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah. Potensi sumber dana di daerah akan dioptimalkan untuk memperluas penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangnya UMKM dan pengusaha pemula di daerah.

Selain fokus untuk mendorong percepatan akses keuangan daerah, OJK juga melakukan upaya pengembangan dan pendalaman pasar dengan meluncurkan *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia (GMRA Indonesia). Peluncuran ini disertai acara penandatanganan perjanjian Transaksi Repo menggunakan GMRA Indonesia oleh empat bank nasional. Melalui penerapan GMRA Indonesia ini diharapkan praktek Transaksi Repo yang dilaksanakan oleh seluruh sektor jasa keuangan terstandarisasi dan memperdalam Repo di Indonesia sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai alternatif sumber pembiayaan.

Sebagai bagian dari pendekatan pengawasan (*supervisory action*) di sektor perbankan, OJK juga memberlakukan kebijakan pembatasan suku bunga simpanan (*capping policy*) untuk bank-bank umum yang termasuk BUKU 3 dan BUKU 4. Kebijakan tersebut diberlakukan dalam rangka mendorong peningkatan efisiensi industri perbankan, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan, mengurangi tingkat kredit bermasalah, dan meningkatkan daya saing industri jasa keuangan nasional dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.5.1 Inklusi Keuangan

Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)

Sebagai bentuk implementasi pilar 2 SLNKI, yaitu Memperkuat Infrastruktur yang Mendukung Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, pada periode sebelumnya, OJK meresmikan

Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU) secara nasional. PELAKU merupakan gerai informasi yang ada di kantor OJK di daerah sebagai sarana penyampaian informasi keuangan, dan penanganan pengaduan, serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM.

Pada periode laporan, OJK bersama dengan Gubernur Jawa Tengah melakukan aktivasi gerai PELAKU untuk pertama kalinya di Solo bersamaan dengan peresmian Kantor OJK Solo. Keberadaan gerai PELAKU di KOJK Solo tersebut diharapkan dapat semakin mendorong percepatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sehingga pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

Gambar II - 1 Launching SimPel/SimPel iB Bank Papua



SimPel/SimPel iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Pada periode laporan, OJK meluncurkan SimPel/SimPel iB Bank Papua. Selain itu, terdapat penambahan Bank peserta SimPel/SimPel iB dengan rincian 7 Bank Umum dan 11 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sehingga jumlah peserta bank menjadi sebanyak 52. Jumlah rekening SimPel/SimPel iB mencapai 1.001.465 dengan volume Rp394,24 Miliar. perjanjian kerjasama yang sudah terjalin antara bank dan sekolah sebanyak 1.206.

Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)

Gambar II - 2 Laku Mikro



Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) merupakan layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses mudah, dan harga terjangkau yang terdiri atas Layanan SiPINTAR, produk dan jasa keuangan mikro, dan Layanan Edukasi dan Konsultasi kepada masyarakat. Layanan SiPINTAR adalah suatu layanan keuangan mikro terpadu yang terdiri atas produk simpanan, investasi, dan asuransi mikro.

Pada periode pelaporan, terdapat 11 lembaga jasa keuangan yang menjadi *entry gate* dan 14 mitra bisnis dengan total rekening SiPINTAR tercatat sebanyak 9.366.455 dengan nominal Rp216,0 miliar. Adapun jumlah outlet yang melayani Laku Mikro adalah sebanyak 8.305.

Dalam rangka mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat, lembaga jasa keuangan dapat memodifikasi produk SiPINTAR sehingga sekarang lembaga jasa keuangan dapat membuat kombinasi produk sesuai kebutuhan masyarakat, misalnya satu produk simpanan dan dua produk asuransi mikro. Selain itu, akan dikembangkan pula skim pembiayaan mikro.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan diperlukan ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan khususnya berskala mikro yang membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam meningkatkan kualitas hidup melalui

pemanfaatan produk keuangan seperti kredit usaha berskala mikro atau tabungan untuk berinvestasi dalam bentuk aset produktif. Program percepatan akses keuangan di daerah perlu menjadi prioritas bagi seluruh pemangku kepentingan. Seluruh elemen di daerah, mulai dari pemerintah daerah, industri keuangan daerah, dan instansi terkait lainnya perlu bersama-sama mencari terobosan untuk membuka akses keuangan yang lebih efektif dan memanfaatkan sumber dana yang ada untuk mendukung kegiatan yang produktif.

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK bersama Kementerian Dalam Negeri serta institusi terkait lainnya membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. TPAKD dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah;
2. Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah;
3. Mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah;
4. Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan; dan
5. Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (*start-up business*) dan membiayai pembangunan sektor prioritas.

Penyusunan program-program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama seperti karakteristik dan kebutuhan daerah, potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan usaha sektor produktif, pengembangan UMKM serta usaha pemula (*start-up business*) lainnya.

Dalam rangka mencapai program kerja TPAKD yang ditetapkan, perlu diperhatikan mengenai kualitas, kondisi dan kemampuan dari suatu daerah. Pada periode laporan, OJK melaksanakan *launching* tiga TPAKD di daerah, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan TPAKD diharapkan mampu mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.5.2 Edukasi dan Literasi Keuangan

Parade Nusantara (Persatuan Desa Rakyat Nusantara)

Pada periode laporan, OJK bekerjasama dengan Bank dan Paguyuban Pejuang Desa Solo Raya melaksanakan acara Parade Nusantara (Persatuan Desa Rakyat Nusantara) Se-Solo Raya. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mensosialisasikan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sekaligus mensosialisasikan program *Financial Inclusion* dan pembentukan agen Laku Pandai bagi masyarakat pedesaan. Kegiatan ini dihadiri oleh 276 peserta yang terdiri atas para perangkat desa dari lima desa yang terdapat di kecamatan Solo Raya. Dalam acara tersebut dibahas tentang Implementasi dari UU no.6 Tahun 2014, Pengenalan OJK, waspada Investasi dan materi pengenalan lembaga jasa keuangan (Perbankan, Perasuransian,

Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian serta produk dan layanannya) serta materi mengenai perencanaan dan pengelolaan jasa keuangan.

Training of Trainers Bagi Penyuluh Lapangan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara

Selama periode laporan, OJK menyelenggarakan *Training of Trainers* (ToT) bagi para penyuluh. Pada ToT tersebut, OJK bekerjasama dengan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan ToT kepada 151 penyuluh lapangan keluarga berencana, penyuluh pertanian, UPPKS dan kader di wilayah Kendari. Melalui kegiatan ToT ini diharapkan para penyuluh mampu memiliki tingkat literasi yang baik dan mengajarkan kembali kepada masyarakat khususnya mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan.

Materi ToT antara lain mencakup pengenalan OJK, Waspada Investasi, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Selain itu juga diberikan materi pengenalan lembaga jasa keuangan Perbankan, Perasuransian, Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian beserta produk dan layanannya serta materi mengenai perencanaan dan pengelolaan jasa keuangan.

Penyusunan Materi Literasi Keuangan Perguruan Tinggi

Dalam rangka melakukan edukasi dan kampanye literasi keuangan serta penguatan infrastruktur literasi keuangan, OJK melakukan penyusunan buku formal. Pada periode laporan, OJK menyusun serial buku serupa untuk tingkat perguruan tinggi yang saat ini telah memasuki tahap finalisasi.

Penyusunan materi buku perguruan tinggi dilakukan dengan berkoordinasi bersama Pokja literasi dan inklusi keuangan yang berasal dari perwakilan satuan kerja pengawas dan perwakilan industri di masing-masing sektor jasa keuangan. Seri buku formal perguruan tinggi tersebut terdiri dari delapan buku dan satu buku suplemen, yaitu:

- a. Seri 1: OJK dan Pengawasan Mikro Prudensial
- b. Seri 2: Perbankan
- c. Seri 3: Pasar Modal
- d. Seri 4: Perasuransian
- e. Seri 5: Pembiayaan
- f. Seri 6: Dana Pensiun
- g. Seri 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
- h. Seri 8: Industri Jasa Keuangan Syariah
- i. Suplemen: Perencanaan Keuangan

Penyusunan Materi Edukasi Non-Formal

Selain penyusunan buku formal, OJK juga menyusun materi edukasi non-formal untuk lima sektor jasa keuangan. Penyusunan materi edukasi non-formal tersebut disesuaikan dengan SNLKI, yaitu fokus utama kegiatan literasi dan edukasi 2016 kepada segmen Profesional dan Pensiunan. Pada periode laporan, OJK menyusun *draft* kerangka materi buku seri edukasi non-formal untuk segmen profesional. Selanjutnya *draft* tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama dengan Pokja penyusun materi edukasi.

Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan melalui Training of Trainers kepada Guru

Dalam rangka mempersiapkan tenaga pengajar edukasi keuangan di sekolah, pada periode laporan, OJK menyelenggarakan *Training of Trainers* (ToT) kepada guru SD dari Kota dan Kabupaten Kupang. Berdasarkan isian rencana pembelajaran yang diisi oleh guru, secara umum seluruh peserta berkomitmen untuk mengajarkan materi yang diterima kepada siswa dan guru-guru lainnya.

Evaluasi Pemanfaatan Buku Mengenal OJK dan IJK tingkat SMP dan SMA

OJK melakukan evaluasi pemanfaatan buku "Mengenal OJK dan Industri Jasa Keuangan (IJK)" tingkat SMP dan SMA kepada sekolah yang menjadi *pilot project* buku tersebut dalam rangka implementasi SNLKI khususnya pilar 1. Pada periode laporan ini, OJK melakukan

kunjungan evaluasi ke 3 SMA dan 3 SMP yang berada di Kupang dan Jakarta.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diketahui bahwa terdapat sekolah yang belum memanfaatkan buku yang disampaikan oleh OJK. Materi mengenai OJK dan IJK telah mulai diperkenalkan melalui pembelajaran di kelas pada mata pelajaran Ekonomi untuk tingkat SMA dan mata pelajaran IPS untuk tingkat SMP. Namun demikian, terdapat SMP yang memanfaatkan buku tersebut melalui mata pelajaran muatan lokal Keterampilan Jasa karena dinilai relevan dengan kebutuhan siswa untuk mengetahui berbagai produk dan jasa keuangan.

Majalah Edukasi Konsumen

Majalah Edukasi Konsumen merupakan produk OJK yang secara regular diterbitkan setiap triwulan dan didistribusikan kepada internal OJK dan pihak eksternal OJK, yaitu perwakilan PUJK, Tim Pokja, Kementerian terkait, Instansi terkait, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, dan narasumber majalah. Tema Majalah Edukasi Konsumen pada periode laporan adalah Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM atau disingkat PELAKU. Informasi yang disajikan pada majalah tersebut bervariasi dari mengenai PELAKU, industri jasa keuangan, UMKM, perbankan syariah, waspada investasi, dan masih banyak yang lainnya.

Kegiatan Edukasi Si Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK)

Sampai akhir periode laporan, OJK memiliki 41 unit kendaraan Si Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK) yang tersebar di seluruh KR dan KOJK seluruh Indonesia. Kendaraan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan oleh OJK dalam rangka melaksanakan kegiatan edukasi keuangan guna meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia.

Selama periode laporan, SiMOLEK digunakan oleh 167 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK)

untuk melakukan kegiatan edukasi. Dari jumlah tersebut masih didominasi dari sektor Perbankan sebanyak 114 PUJK (68%) disusul kemudian sektor Perasuransian (30%), Pergadaian (11%), Pasar Modal (7%) dan Pembiayaan (4%).

Dari data penggunaan SiMOLEK, jumlah pengunjung yang mendatangi SiMOLEK sebanyak 53.939 orang yang didominasi dari kalangan umum dan pelajar/akademisi. Selain itu, jumlah lokasi yang dikunjungi SiMOLEK sebanyak 1.870 lokasi dengan dominasi dari pasar/mall. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi banyak PUJK melaksanakan kegiatan edukasi di pasar/mall dengan pertimbangan lokasi tersebut dapat menjangkau banyak orang.

Melalui pelaksanaan kegiatan edukasi yang dilakukan melalui SiMOLEK, tingkat inklusi masyarakat khususnya pengunjung telah meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya transaksi sebesar Rp4,9 Miliar selama pelaksanaan kegiatan.

2.5.3 Pengaturan dan Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan

Revisi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia

SNLKI merupakan cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia dalam mengembangkan masyarakat Indonesia yang *well literate*. Melalui cetak biru dimaksud diharapkan semua program literasi keuangan dapat dikonsolidasikan ke dalam suatu wadah yang bersifat nasional, komprehensif dan terukur pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pencapaian target masyarakat yang *well literate*. Dalam rangka memastikan relevansi, OJK melakukan revisi untuk memastikan bahwa strategi dimaksud sesuai dengan perkembangan kekinian di sektor jasa keuangan. Revisi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep literasi keuangan dan *financial well-being* sebagai berikut:
 - a. Komponen literasi keuangan meliputi *knowledge and skill, confidence, personality and attitudes, behaviour*;
 - b. Komponen *financial well-being* meliputi *ability to grow, manage liquidity, weather downturns/resilience, secure wealth*;
2. Perkembangan konsep mengenai *financial well-being* sehingga definisi literasi keuangan pun perlu dilakukan penyesuaian dengan usulan sebagai berikut:

"Literasi keuangan adalah Pengetahuan (knowledge), keyakinan (confidence), keterampilan (skill), yang mempengaruhi sikap (attitude) dan perilaku (behaviour) seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan"

3. Kegiatan edukasi dalam rangka literasi diarahkan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan perbedaan karakteristik di setiap wilayah provinsi, sehingga perlu adanya pendekatan yang berbeda dalam melakukan edukasi keuangan melalui pendekatan sektoral, target segmen dan geografis dengan memperhatikan kebutuhan di masing-masing wilayah.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016

Pasca implementasi SNLKI selama tiga tahun, OJK perlu melakukan evaluasi dan upaya perbaikan terhadap program literasi dan inklusi keuangan agar kegiatan literasi dan inklusi keuangan lebih baik dan efektif. Selain itu, dalam rangka pengembangan kebijakan literasi dan inklusi keuangan, diperlukan pemetaan informasi terkini mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia berdasarkan berbagai perkembangan zaman (baik dari segi kependudukan, sektor jasa keuangan, dan

Information and Communication Technology). Untuk mendukung kebijakan tersebut, akan diselenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan di 2016 (SNLIK-2016) dengan berbagai rujukan survei, yaitu:

1. Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2013 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. *Financial Capability Survei 2013* dan *Global Financial Inclusion Index* tahun 2014 oleh World Bank; dan
3. *OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion 2015* oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD).

SNLIK-2016 diharapkan dapat menghasilkan *Baseline Survey* Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2013 (SNLKI 2013) dan *Enhancement Survey* SNLIK 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perkembangan Definisi Literasi Keuangan

Pada *baseline survey* SNLKI 2013, definisi literasi keuangan adalah serangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), keyakinan (*confidence*) konsumen dan masyarakat luas, sehingga mampu mengelola keuangan pribadinya dengan baik. Namun pada SNLIK-2016 terdapat *enhancement* pada definisi literasi menjadi "Pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), keterampilan (*skill*), yang membentuk sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) keuangan sehingga mampu mengelola keuangan lebih baik dan menentukan produk dan/ atau layanan keuangan yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan."

2. Indikator Perhitungan Literasi dan Inklusi

Selain definisi, terdapat juga *enhancement* pada indikator perhitungan literasi keuangan dari yang sebelumnya terdiri dari tiga

indikator, yaitu Pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan keterampilan (*skill*) pada *baseline survey* SNLKI 2013 menjadi lima indikator pada SNLIK-2016, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), keterampilan (*skill*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) keuangan.

Selain itu, terjadi peningkatan pada indikator perhitungan inklusi keuangan dari yang sebelumnya hanya ditentukan oleh penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan menjadi empat indikator yaitu: penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, penggunaan *delivery channel*, frekuensi penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan dan frekuensi penggunaan *delivery channel*.

Sebagai prognosis kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, telah dilakukan pre survei literasi dan inklusi keuangan terhadap 400 responden di Medan, Semarang, Banjarmasin, dan Makassar pada Maret 2016 dengan hasil, yaitu (1) tingkat literasi keuangan sebesar 28,2% (2) tingkat inklusi keuangan sebesar 75,8%. Angka tersebut menunjukkan ketercapaian target peningkatan literasi keuangan sebesar 2% per tahun dan inklusi keuangan sebesar 5% dari indeks inklusi keuangan 2013.

Wilayah sampel SNLIK-2016 adalah 64 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia terhadap 9.680 responden dari berbagai klaster, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, serta strata wilayah dan sosial. Jumlah

sampel responden ini ditargetkan agar memiliki *confidence level* yang tinggi secara nasional dengan selang kepercayaan 95%.

2.5.4 Perlindungan Konsumen

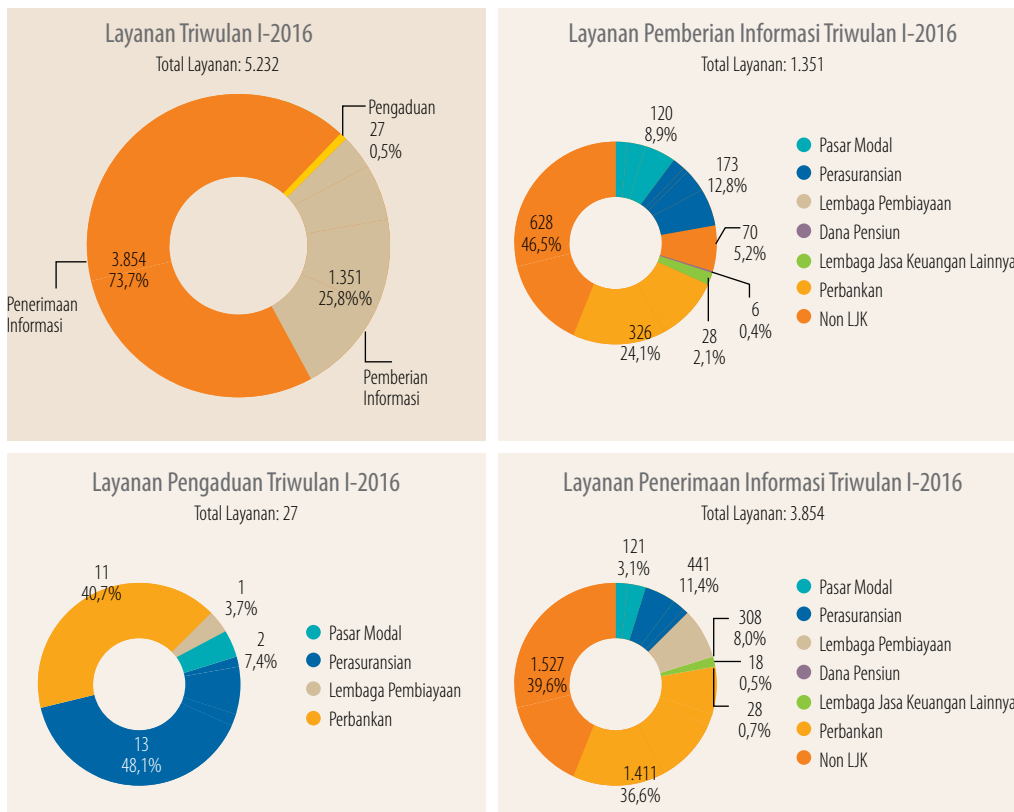
Layanan Konsumen OJK

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, salah satu kewenangan yang diberikan adalah melaksanakan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi penyiapan perangkat dan mekanisme yang memadai untuk pengaduan Konsumen serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen.

Sebagai bentuk perwujudan atas kewenangan tersebut, OJK menyediakan Layanan Konsumen OJK dan Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi (*Integrated Financial Customer Care* – iFCC) yang menyediakan tiga layanan utama, yaitu Layanan Penerimaan Informasi (laporan), Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan) dan Layanan Pengaduan dalam rangka agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Selama periode laporan, berdasarkan data yang dikelola dalam iFCC, Layanan Konsumen OJK menerima 5.232 layanan yang terdiri dari 3.854 laporan, 1.351 pertanyaan dan 27 pengaduan.

Grafik II - 14 Layanan Per Sektor



Layanan Pemberian Informasi yang disampaikan masyarakat paling banyak adalah pertanyaan yang tidak berkaitan dengan Lembaga Jasa Keuangan (Non LJK) yaitu sebesar 46,5% atau sebanyak 628 layanan dengan pertanyaan terbanyak mengenai peraturan sebesar 32% (202 pertanyaan).

Terkait dengan layanan Penerimaan Informasi laporan yang paling banyak disampaikan oleh Konsumen dan/atau masyarakat adalah laporan yang tidak berkaitan dengan LJK (Non LJK) yaitu sebesar 39,6% atau sebanyak 1.527 layanan. Secara substansi, laporan yang paling banyak diterima terkait dengan Non LJK adalah mengenai Legalitas Perusahaan Non LJK yaitu sebesar 14% atau sebanyak 207 layanan dari seluruh sub kategori Non LJK.

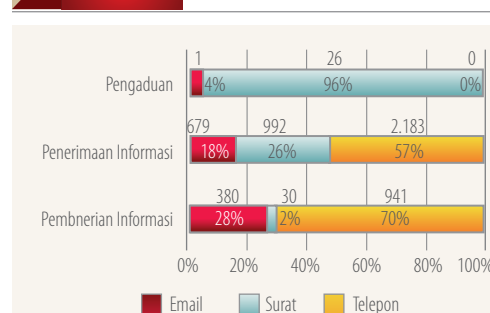
Selanjutnya pada Layanan Pengaduan, pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen pada sektor Perasuransian adalah yang terbesar, yaitu sebesar 48,1% (13 pengaduan), diikuti oleh sektor Perbankan yaitu sebesar 40,7%

(11 pengaduan). Secara substansi yang paling banyak diadukan adalah terkait penolakan klaim dan adanya dugaan pelanggaran pada perbankan.

A. Media Penerimaan Layanan Konsumen

Dalam rangka mempermudah Konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses Layanan Konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media *email*, telepon maupun surat.

Grafik II - 15 Kanal Layanan



Selama periode laporan, penggunaan kanal *email* dan Surat pada Layanan Penerimaan Informasi memiliki perbandingan yang tidak jauh berbeda, yaitu sebesar 18% dan 26%. Sedangkan untuk Layanan Pengaduan, kanal yang paling banyak dipergunakan adalah Surat yaitu sebesar 96%.

B. Satuan Kerja yang Menerima Layanan

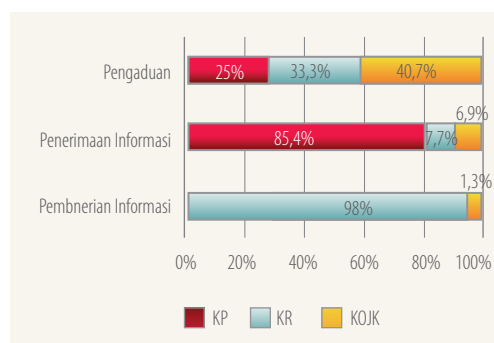
Selain itu, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Layanan Konsumen, OJK memberikan tugas dan kewenangan kepada seluruh Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) yang tersebar diseluruh Indonesia untuk menerima dan menangani Layanan Konsumen.

Tabel II - 28 Penerimaan Layanan Triwulan 1 - 2016

Business Unit	Pemberian Informasi	Penerimaan Informasi	Pengaduan	Total
KP	1.324	3.291	7	4.622
KR	9	297	9	315
KOJK	18	266	11	295
Total	1.351	3.854	27	5.232

Secara total satuan kerja di Kantor Pusat menerima Layanan Konsumen terbanyak yaitu sebesar 88% dari total penerimaan Layanan.

Grafik II - 16 Layanan Berdasarkan satuan Kerja yang Menerima dan Melakukan Pencatatan



Pada periode laporan, Layanan Penerimaan Informasi dan Layanan Pemberian Informasi paling banyak diterima oleh Kantor Pusat (KP) yaitu sebesar 85,4% dan 98%. Sedangkan Layanan Pengaduan paling banyak diterima oleh KOJK yaitu sebesar 40,7%.

C. Domisili Pelapor

Dengan dibukanya akses diseluruh KR dan KOJK, persebaran domisili dari Konsumen dan/atau masyarakat yang memanfaatkan Layanan Konsumen OJK juga sangat bervariasi.

Tabel II - 29 Domisili Pelapor Layanan Triwulan 1 - 2016

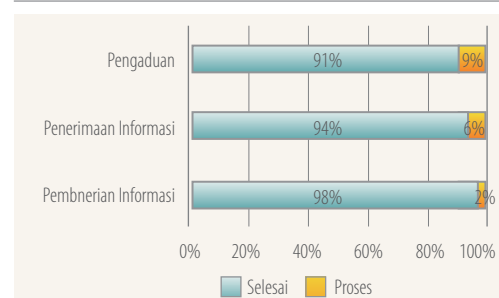
Wilayah	Pemberian Informasi	Penerimaan Informasi	Pengaduan	Total
Jawa	906	2.106	7	3.019
Bali & Nusa Tenggara	21	51	4	76
Sumatera	57	294	10	361
Kalimantan	13	91	3	107
Sulawesi & Maluku	16	129	2	147
Papua	1	12	0	13
Lainnya & LN	337	1.171	1	1.509
Total	1.351	3.854	27	5.232

Layanan Pemberian Informasi dan Penerimaan Informasi didominasi oleh Konsumen dan/atau masyarakat yang berdomisili di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 67% (906 pertanyaan) dan 55% (2.106 laporan). Sementara itu, untuk Layanan Pengaduan, dominasi Konsumen yang paling banyak menyampaikan pengaduannya berasal dari Pulau Sumatera, yaitu sebanyak 10 pengaduan atau sebesar 37%.

D. Penyelesaian Layanan Konsumen

Secara akumulatif sampai akhir periode laporan, OJK menyelesaikan 38.851 Layanan Pemberian Informasi, 16.368 Layanan Penerimaan Informasi dan 3.430 Layanan Pengaduan. Secara rata-rata tingkat penyelesaian ketiga layanan tersebut mencapai 94%.

Grafik II - 17 Tingkat Penyelesaian Akumulatif s.d. Triwulan 1 - 2016



Adapun selama periode laporan, OJK menyelesaikan 2.677 Layanan Pemberian Informasi, 3.790 Layanan Penerimaan Informasi dan 147 Layanan Pengaduan. Penyelesaian tersebut, terdiri dari layanan yang diterima pada periode laporan dan *carry over* dari periode sebelumnya.

Asistensi Perlindungan Konsumen

Sehubungan dengan pelaksanaan pengembangan (*enhancement*) Sistem Layanan Konsumen OJK terdapat beberapa fasilitas dan fungsi yang disempurnakan dan ditambahkan pada sistem tersebut. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka mengakomodir perubahan pengaturan *Service Level Agreement* penanganan Layanan Konsumen OJK yang saat ini perubahannya akan diatur pada rancangan perubahan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) No.1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.

Mempertimbangkan hal tersebut, OJK melakukan asistensi kepada Kantor Regional maupun Kantor OJK sebagai satuan kerja yang menjadi ujung tombak dalam menerima dan menangani Layanan Konsumen OJK dari Konsumen dan/atau masyarakat. Pada periode laporan, asistensi dilakukan di Kantor Regional 7 OJK Sumatera Bagian Selatan. Selain pelaksanaan asistensi, pada kesempatan tersebut sekaligus dilaksanakan sosialisasi kepada Pelaku Jasa Keuangan di wilayah kerja Kantor Regional 7 OJK Sumatera Bagian Selatan dan audiensi kepada Media Cetak Sumatera terkait dengan Perlindungan Konsumen dan mengikuti acara *talkshow* di radio lokal Trijaya FM Palembang mengenai Waspada Investasi. Sosialisasi dan audiensi diikuti oleh 160 peserta dari 39 perusahaan pembiayaan, enam perusahaan sekuritas, 25 perusahaan asuransi, 43 bank umum, 22 BPR, lima dana pensiun, satu perusahaan pegadaian, dan dihadiri pula oleh empat wartawan lokal.

Sosialisasi Peraturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen dengan tema “Peningkatan Perlindungan Konsumen Melalui Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan”

Sebagai upaya meningkatkan pemahaman PUJK dan masyarakat mengenai edukasi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, OJK melakukan sosialisasi Peraturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen dengan tema “Peningkatan Perlindungan Konsumen Melalui Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan”. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 196 peserta yang terdiri dari PUJK di wilayah Kalimantan Timur, Instansi Pemerintah Daerah, Media, Akademisi dan masyarakat. Narasumber sosialisasi berasal dari internal OJK dan perwakilan dari lembaga jasa keuangan. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan *awareness* masyarakat sekaligus mendorong PUJK untuk lebih baik dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.

2.5.5 Market Conduct

Pelaksanaan Kegiatan Thematic Surveillance dan Operasi Intelijen Pasar

Dalam pelaksanaan pemantauan dan analisis perlindungan konsumen, OJK menggunakan instrumen *thematic surveillance* dan kegiatan intelijen pasar dalam upaya identifikasi awal kerawanan produk dan layanan sektor jasa keuangan yang berpotensi menimbulkan kerugian konsumen dan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, digunakan berbagai macam teknik pengumpulan data dan informasi antara lain meliputi *open source intelligence (OSINT)*, *mystery shopping (MS)*, *customer testimony (CT)*, *undercover (UC)*, *indepth interview (IDI)*, *forum group discussion (FGD)* maupun survei.

Pada periode laporan, satu kegiatan intelijen pasar telah dilaksanakan dengan mengambil *sampling* di tiga kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta dan Semarang. Cakupan kegiatan intelijen

pasar memetakan isu perlindungan konsumen terkait dengan gadai swasta mulai dari tahapan *pre sales* hingga *after sales*. Hal ini dalam kerangka mendukung rencana pengaturan bisnis gadai swasta oleh OJK dalam waktu dekat. Pertimbangan lainnya adalah produk-produk dimaksud digunakan secara luas oleh masyarakat.

Pemantauan Iklan Triwulanan

Salah satu sumber data dan informasi untuk mendukung kegiatan market intelijen adalah pemantauan iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI). Sementara ini, cakupan *monitoring* iklan dan penawaran yang dilakukan secara triwulanan tersebut meliputi iklan yang dimuat di media cetak nasional dan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

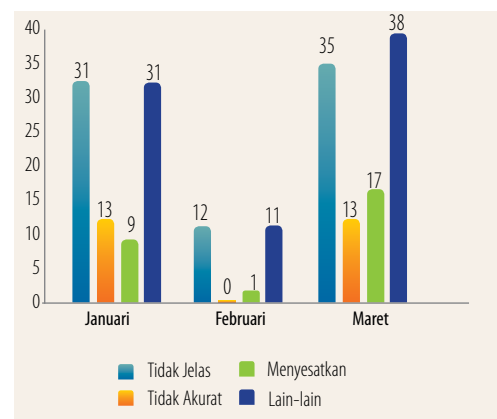
Kriteria iklan yang baik meliputi akurat, jelas, jujur dan tidak menyesatkan diatur berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.

Selama periode laporan, OJK mencatat sebanyak 363 iklan berkaitan dengan produk/jasa keuangan, yang terdiri dari 308 iklan dari sektor perbankan, 40 iklan dari sektor IKNB, dan 5 iklan sektor Pasar Modal. Berdasarkan sebaran iklan per bulan terlihat bahwa produk yang diduga melakukan pelanggaran terbanyak

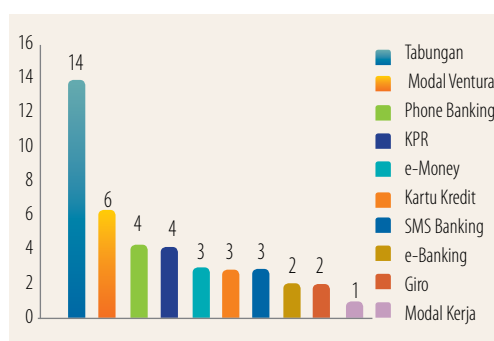
sepanjang triwulan I-2016 adalah tabungan, modal ventura, *phone banking* serta KPR.

Dari seluruh iklan tersebut, 32% nya (116 iklan) diduga melanggar POJK dan SEOJK terkait. Sesuai dengan peraturan terkait, pelanggaran dikategorikan sebagai tidak jelas, menyesatkan, tidak akurat, dan lain-lain. Kriteria yang paling banyak dilanggar berturut-turut adalah lain-lain, tidak jelas, , menyesatkan, dan tidak akurat.

Grafik II - 19 Jumlah Pelanggaran Iklan Berdasarkan Bulan



Grafik II - 18 Jumlah Pelanggaran Iklan Berdasarkan Jenis Produk



Dapat dilihat bahwa kategori yang paling banyak dilanggar adalah kategori “lain-lain” dan “tidak jelas”. Masih banyak PUJK uang tidak memberikan informasi lengkap terkait penawaran yang dilakukan melalui iklan di media massa. Apabila diamati secara seksama, pola dugaan pelanggaran iklan menunjukkan kecenderungan melakukan kesalahan yang sama secara berulang. Hal ini bisa jadi mengindikasikan keterbatasan pemahaman PUJK terkait *beleid* yang mengatur produk dan/atau layanan jasa keuangan, ataupun terdapat unsur kesengajaan untuk menyembunyikan sebagian informasi. Bahkan kategori “lain-lain” yang harus mencantumkan bahwa lembaga keuangan terkait terdaftar dan diawasi oleh OJK juga menjadi salah satu kategori dengan dugaan pelanggaran terbanyak. Padahal, hal ini menjadi salah satu tolok ukur masyarakat dalam memilih produk keuangan resmi.

2.5.6 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

OJK telah mengatur penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan diselesaikan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah penyelesaian pengaduan konsumen di lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*). Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui *internal dispute resolution*, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan (*external dispute resolution*).

Layanan penyelesaian sengketa yang disediakan di LAPS meliputi mediasi, adjudikasi, dan arbitrase dengan biaya yang terjangkau. Khusus untuk *small claim* dan *retail claim*, LAPS memberi layanan penyelesaian sengketa tanpa biaya. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, LAPS menerapkan prinsip aksesibilitas, prinsip independensi, prinsip keadilan, serta prinsip efisiensi dan efektifitas.

Pembaruan dan Pengumuman Daftar LAPS di Sektor Jasa Keuangan

Pada periode laporan, OJK memperbarui Daftar LAPS sehingga Daftar LAPS berisi enam LAPS, yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPPI).

Workshop Uji Coba Mediasi dan Adjudikasi

Sebagai langkah awal untuk pematangan operasionalisasi LAPS di sektor jasa keuangan, OJK menyelenggarakan *workshop* uji coba mediasi dan adjudikasi. *Workshop* uji coba diperuntukkan bagi LAPS yang baru berdiri dan/atau belum pernah menangani sengketa, yaitu

BMDP, LAPSPI, BAMPPI dan BMPPI. *Workshop* uji coba tersebut dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu uji coba mediasi dan uji coba adjudikasi di Jakarta. *Workshop* uji coba tersebut masing-masing diikuti oleh 25 orang yang akan menjalankan kegiatan penyelesaian sengketa di LAPS. Pada *Workshop* uji coba tersebut, OJK menghadirkan perwakilan dari LAPS yang telah berpengalaman menangani sengketa sebagai *observer* dan *sharing knowledge* kepada para peserta dengan harapan LAPS memperoleh gambaran mengenai proses pelaksanaan mediasi dan adjudikasi yang ideal

Working Group Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka mendukung pengembangan LAPS di sektor jasa keuangan serta mempermudah koordinasi antara OJK dengan LAPS, OJK membentuk *Working Group* Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (WG LAPS) dalam rangka mendukung pengembangan LAPS di sektor jasa keuangan serta mempermudah koordinasi antara OJK dengan LAPS WG. LAPS tersebut bertugas antara lain menyusun materi sosialisasi, melakukan sosialisasi dan membahas hal-hal terkait LAPS.

Selama periode laporan, WG LAPS telah melakukan dua kali pertemuan, yaitu untuk menyusun format standar laporan LAPS kepada OJK sebagaimana amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa; dan materi sosialisasi mengenai LAPS.

Seminar Pengenalan LAPS

Sebagai salah satu bentuk dukungan OJK terhadap pengembangan LAPS, OJK menyelenggarakan Seminar Pengenalan LAPS kepada PUJK dan asosiasi sektor jasa keuangan sebagai bentuk dukungan OJK terhadap pengembangan LAPS. Seminar ini bertujuan untuk mensosialisasikan keberadaan dan mekanisme kerja LAPS. Bersama dengan seminar tersebut, OJK menyelenggarakan

konferensi pers tentang pengenalan LAPS kepada para wartawan. Di samping itu, pada awal pelaksanaan seminar, OJK memberikan penghargaan kepada para pemenang *Market Conduct Award*. Penghargaan *Market Conduct Award* diberikan kepada 35 PUJK dari masing-masing sektor, yaitu sektor perbankan, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan, dan asuransi.

FGD Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS

OJK menyelenggarakan FGD Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS dengan narasumber praktisi hukum dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). FGD diselenggarakan untuk memperoleh masukan mengenai pencantuman klausula baku mengenai penunjukan LAPS sebagai *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. FGD tersebut dihadiri oleh perwakilan LAPS dan asosiasi sektor jasa keuangan, serta internal OJK. Para narasumber berpendapat bahwa penunjukan LAPS sebagai *choice of forum* dalam perjanjian antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.5.7 Pengaturan dan Pengembangan Perlindungan Konsumen

Pengembangan *Market Conduct*

1. Kajian *Market Conduct*

OJK bekerjasama dengan Tim Peneliti Universitas Indonesia melaksanakan kegiatan pembahasan lanjutan mengenai kajian *framework* pengawasan *market conduct* diantaranya mempersiapkan penyusunan *framework* pengawasan *market conduct* dengan perencanaan perubahan kertas kerja *self assessment* dan SIPMI. Tujuan perubahan dilakukan agar memperkuat *framework* pengawasan *market conduct* sebagai sumber data dan informasi untuk

memperoleh *market conduct wide risk assessment*. Disamping itu, OJK bersama dengan Praktisi Sektor Jasa Keuangan juga melaksanakan kajian pengawasan *Market Conduct* Berdasarkan Risiko sebagai salah satu aspek persyaratan dalam menerbitkan Peraturan Dewan Komisiner tentang Pengawasan *Market Conduct* Berdasarkan Risiko Terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Kajian tersebut disusun bersama dengan Praktisi sektor jasa keuangan guna mempercepat pembahasan dan penerbitan Peraturan Dewan Komisiner.

2. Roadmap *Market Conduct*

a. Rencana Pengaturan (*regulatory supervision*)

Penyusunan *regulatory framework* yang mendukung kegiatan pengawasan *market conduct* adalah:

- 1) Penyusunan kajian dan Peraturan Dewan Komisiner mengenai Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen/Pengawasan *Market Conduct* Berdasarkan Risiko.
- 2) Penyusunan Surat Edaran Dewan Komisiner mengenai Kertas Kerja *Self-Assessment* dan Pedoman Tata Cara Pengisian serta Pelaporan *Self Assessment*.
- 3) Penyusunan SE DK mengenai pedoman:
 - a) Pelaksanaan pemantauan tematik (*thematic surveillance*) termasuk mekanisme koordinasi dengan Satuan Kerja yang membawahi Bidang Pengawasan.
 - b) Pelaksanaan OIP
 - c) Petunjuk pelaksanaan pengoperasian SIPMI (Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen), OSINT (*Open Source Intelligence*), dan sebagainya.

b. Rencana Penyusunan *Supervisory Tools* yang Mendukung Kebijakan *Market Conduct*

Tahapan penyusunan *supervisory tools* untuk mendukung kebijakan *market conduct* adalah:

- 1) Surat Edaran Dewan Komisiner mengenai Pedoman Penyusunan *Know Your Financial Institution* Terkait Dengan Aspek Perlindungan Konsumen (Tahap I)
- 2) Surat Edaran Dewan Komisiner mengenai Pedoman Penyusunan Penetapan *Market Conduct Risk Assessment* (Tahap II)
- 3) Surat Edaran Dewan Komisiner mengenai Pedoman Penyusunan *Supervisory Plan* Dalam Rangka Pengawasan *Market Conduct* (Tahap III)
- 4) Surat Edaran Dewan Komisiner mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan *Market Conduct* Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Tahap IV)
- 5) Surat Edaran Dewan Komisiner mengenai Tata Cara atau Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi dengan Satuan Kerja yang Membawahi Bidang Pengawasan (Tahap V)
- 6) Surat Edaran Dewan Komisiner mengenai Pengendalian Kualitas Pengawasan *Market Conduct* (Tahap VI)

Penyusunan Regulasi Monitoring LAPS

OJK mewajibkan LAPS menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Hal tersebut dilaksanakan sebagai salah satu bentuk *monitoring* LAPS. Untuk itu, OJK sedang menyusun regulasi mengenai *monitoring* LAPS, baik yang mengatur secara internal maupun eksternal. Ruang lingkup *monitoring* LAPS mencakup mencakup *monitoring* laporan LAPS dan *monitoring* pemenuhan prinsip-prinsip LAPS, yaitu prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas. Dengan *monitoring* LAPS, OJK memastikan bahwa LAPS yang masuk dalam Daftar LAPS memenuhi prinsip-prinsip LAPS.

Regulasi mengenai *monitoring* LAPS tersebut akan memuat standarisasi format laporan LAPS, kertas kerja analisis, parameter prinsip-prinsip LAPS dan pembobotan nilai dari masing-masing parameter LAPS. Hasil *monitoring* terhadap prinsip-prinsip LAPS dapat berupa rekomendasi dikeluarkannya LAPS dari Daftar LAPS yang ditetapkan OJK.

Pada periode laporan OJK menyelenggarakan FGD Penyusunan Regulasi *monitoring* LAPS dalam rangka memperoleh masukan yang komprehensif untuk penyusunan regulasi tersebut. FGD tersebut telah menghasilkan pembobotan, nilai, dan parameter prinsip-prinsip LAPS, sehingga hasil *monitoring* LAPS lebih terukur.

2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAAN PENDANAAN TERORISME

2.6.1 Penyidikan Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka mewujudkan kegiatan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK telah mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung kegiatan penyidikan. Terkait dengan penguatan Infrastruktur untuk Sumber Daya Manusia, OJK menerima enam perwira menengah dari Kepolisian Republik Indonesia dan satu orang Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi formasi penyidik di OJK. Selain itu, OJK mempersiapkan perangkat peraturan untuk mendukung efektifnya pelaksanaan fungsi penyidikan antara lain piranti lunak, perangkat regulasi, maupun standar operasional prosedur. Salah satu produk peraturan tersebut adalah Surat Edaran (SE) Nomor: 1/SEDK.01/2016 2016 tentang Mekanisme Koordinasi Pemeriksaan dan/atau Investigasi dengan penyidik OJK. SE tersebut merupakan pedoman dalam melakukan pemeriksaan bersama antar satuan kerja

Selanjutnya, OJK melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Polri, dan Kejaksaan Agung dalam rangka untuk mewujudkan kerjasama pencegahan, penegakan hukum, dan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang efektif. OJK juga melakukan sosialisasi dengan instansi penegak hukum terkait maupun internal OJK di daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan fungsi penyidikan oleh OJK. Selama periode laporan, OJK juga melakukan koordinasi dengan enam kepolisian daerah, yaitu dengan Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, dan Kepolisian Daerah Metro Jaya, Polres Pati, dan Kepolisian Daerah Yogyakarta. Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk koordinasi penanganan kasus maupun sosialisasi mengenai tindak pidana di sektor jasa keuangan dan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum.

Selama periode laporan, OJK menangani sejumlah 14 kasus perbankan dari delapan bank dan dua kasus pasar modal dari satu entitas pasar modal, dan sedang melakukan penyidikan sejumlah lima kasus yaitu tiga kasus perbankan dan dua kasus pasar modal serta telah melakukan penyelidikan terhadap sembilan kasus. OJK juga menindaklanjuti atas laporan dari masyarakat sejumlah tujuh kasus dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

2.6.2 Penangan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Penguatan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

Pada periode laporan, OJK membentuk Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang secara terintegrasi menangani TPPU dan TPPT terhadap tiga sektor jasa keuangan. Penanganan TPPU dan TPPT difokuskan pada tiga tugas dan fungsi utama yaitu: (1) pengendalian kualitas dan *monitoring* pengawasan di sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank);

(2) pengaturan, pengembangan, dan penelitian terkait pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan; dan (3) koordinasi dan kerjasama antar lembaga, baik di dalam maupun luar negeri, terkait pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Penanganan TPPU dan TPPT, OJK bersinergi dengan lembaga lain, antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta dengan pelaku industri jasa keuangan melalui seluruh asosiasi di sektor jasa keuangan. Untuk itu telah dibentuk Forum Komunikasi dan Kerjasama Sektor Jasa Keuangan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (FKK-SJK APU PPT).

Pada periode laporan, OJK melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat dan industri jasa keuangan untuk memberikan *awareness* dan mengingatkan kembali pentingnya menjaga kredibilitas sektor jasa keuangan melalui penanganan APU PPT, sehingga industri jasa keuangan tidak mudah dijadikan sebagai wahana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bekerjasama dengan Kantor Regional OJK di daerah, OJK telah melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penerapan program APU PPT kepada masyarakat di Kendaridan kepada BPR dan BPRS di Medan.

Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan terhadap penerapan program APU-PPT di sektor jasa keuangan, OJK juga sedang membangun sistem *database* pengawasan penerapan program APU-PPT yang akan mengintegrasikan hasil pengawasan program APU PPT di seluruh sektor jasa keuangan, OJK juga menyiapkan modul dan silabus untuk mendukung program *capacity building* kepada para pengawas sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB, serta melakukan pemetaan dan menyusun kajian mengenai pengaturan program APU PPT di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank, dalam

rangka mengharmonisasikan pengaturan program APU-PPT di sektor jasa keuangan.

2.7 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Sesuai dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan OJK sebagai lembaga negara tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedudukan OJK juga tidak sama dengan Kementerian, mengingat kedudukan OJK yang berada di luar pemerintahan. Adapun status dan kedudukan khusus tersebut diperlukan agar OJK dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai

lembaga yang independen. Walau demikian, OJK tetap memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang baik antar lembaga dengan DPR, BPK, Pemerintah, BI, LPS, serta pihak lainnya. Hubungan baik dan koordinasi antar lembaga tentunya tidak dapat dihindari demi tercapainya tujuan OJK secara optimal.

2.7.1 Kerjasama Domestik

OJK secara aktif mengadakan koordinasi antar lembaga dengan tujuan menjalin kerjasama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang. OJK melakukan empat penandatanganan kerjasama domestik sebagai berikut:

No.	Kerjasama Domestik	Ringkasan Kerjasama
1	<p>Penandatanganan nota kesepahaman OJK dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai program Percepatan Pengembangan Energi Baru, Energi Terbarukan Dan Konservasi Energi Melalui Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan.</p> 	<p>Pelaksanaan koordinasi teknis dalam rangka meningkatkan peran Lembaga Jasa Keuangan dalam pengembangan Energi Baru, Energi Terbarukan, dan Konservasi Energi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan dan mendorong kebijakan; Melakukan pertukaran informasi dan data; Mengkoordinasikan badan usaha dan pengelola yang bergerak di bidang Energi Baru, Energi Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan Lembaga Jasa Keuangan; Melaksanakan edukasi dan sosialisasi; dan Melaksanakan kegiatan dan koordinasi lainnya.
2	<p>Penandatanganan nota kesepahaman BI, MA dan OJK mengenai Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Peningkatan Wawasan Hakim.</p> 	<p>Kerjasama untuk saling bertukar informasi, sosialisasi dan fasilitasi terkait aspek aspek hukum yang bersinggungan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun OJK. Koordinasi dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan temu wicara kepada para hakim.</p>

No.	Kerjasama Domestik	Ringkasan Kerjasama
3	<p>Penandatanganan nota kesepahaman OJK Dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengenai Kerjasama pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan, dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah.</p> 	<p>Pelaksanaan koordinasi teknis yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan literasi produk dan layanan keuangan; 2. Peningkatan akses dan distribusi produk-produk keuangan; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor jasa keuangan; 4. Asistensi perizinan LKM syariah; dan 5. Pengembangan jasa keuangan syariah.
4	<p>Penandatanganan nota kesepahaman OJK dan KPK mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Jasa Keuangan.</p> 	<p>Pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertukaran data dan/atau informasi; 2. kerjasama dalam penerapan program pencegahan tindak pidana korupsi serta bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing, 3. Bantuan OJK sebagai ahli dalam Penanganan perkara tindak Pidana korupsi di sektor jasa keuangan.

Disamping penandatanganan kerjasama antar lembaga, OJK juga menjalin hubungan kelembangan dengan menyelenggarakan 42 kegiatan kelembagaan bersama yang melibatkan beberapa lembaga negara, antara lain:

1. Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Kementerian Keuangan;
3. Bank Indonesia;
4. Lembaga Penjamin Simpanan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Pemerintah Daerah; dan
7. Industri Jasa Keuangan.

Kegiatan kelembagaan yang telah dilakukan mencakup antara lain *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Protokol Pelaksanaan Di Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN, FGD mengenai Rancangan

Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), pendampingan kunjungan kerja DPR, sosialisasi mengenai peran, fungsi, dan kinerja OJK bekerja sama dengan lembaga lain, serta tatap muka dan diskusi dengan para pelaku Industri Jasa Keuangan melalui acara *Financial Executive Gathering* (FEG).

2.7.2 Kerjasama Internasional

Peningkatan Kerjasama Kelembagaan dengan Pengawas Industri Jasa Keuangan Asing

Pada triwulan I-2016, OJK berkomitmen untuk menjalin kerjasama dalam rangka penyusunan *Bilateral Agreement* dalam rangka penerapan *ASEAN Banking Integration Framework*, melalui

penandatanganan *Letter of Intent* dengan Bank of Thailand pada 31 Maret 2016.

Sebelumnya, OJK memperluas kerja sama internasional dengan menyepakati Nota Kesepahaman dengan Bank Sentral Timor Leste -Banco Central de Timor-Leste (BCTL) di Dili, Timor Leste, pada 22 Maret 2016 mengenai pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pengawasan di bidang sektor jasa keuangan, pengawasan operasional lintas batas serta pengembangan inklusi keuangan.

Untuk meningkatkan kapasitas pengawasan industri jasa keuangan, OJK memperluas kerja sama dengan Australia di sektor jasa keuangan, dengan menggandeng Australian Centre for Financial Studies - Monash University (ACFS) dan Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia. Kerja sama dengan dua institusi itu dilakukan untuk peningkatan kapasitas kemampuan pegawai OJK dan industri jasa keuangan Indonesia serta untuk meningkatkan kemudahan lembaga keuangan Indonesia membuka kantor di Victoria.

Untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan, OJK menyambut baik penandatanganan *Letter of Intent (LOI)* dalam bidang keuangan antara Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan dengan Taiwan Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta. Hal ini akan mendukung koordinasi antara OJK dengan Financial Supervisory Commission Taiwan, yang diperlukan karena sudah ada kehadiran institusi perbankan Taiwan di Indonesia, dan terdapat potensi ekonomi yang besar yang perlu difasilitasi oleh lembaga keuangan di kedua negara.

Kerjasama Regional

Pada kawasan ASEAN, OJK berpartisipasi aktif dalam penyusunan Protokol 7 dalam Implementasi Komitmen Sektor Jasa Keuangan ASEAN (*ASEAN Framework Agreement on Services*), di mana terdapat peningkatan komitmen Indonesia, khususnya pada industri perasuransian.

Pembentukan OJK PROKSI - Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi

OJK meluncurkan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi atau OJK PROKSI sebagai pusat pengembangan keuangan mikro dan inklusi keuangan di Indonesia, Jakarta, pada 15 Maret 2016. Peluncuran "OJK PROKSI" diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D. Hadad, dan jajaran Dewan Komisiner OJK lainnya. Peresmian OJK PROKSI juga dirangkaikan dengan Seminar Internasional Keuangan Mikro dan Inklusi Keuangan bertajuk Keuangan Mikro dan Inklusi Keuangan Indonesia untuk Dunia. OJK PROKSI akan mengembangkan pengetahuan dan menyediakan terobosan-terobosan model bisnis di bidang keuangan mikro dan inklusi keuangan yang tidak hanya ditataran konsep tetapi benar-benar implementatif yang dapat digunakan baik oleh para pelaku industri, ahli keuangan, akademisi, dan komunitas global.

Pelaksanaan workshop Internasional Pengawasan Terintegrasi - kerjasama antara OJK, APRA, AIPEG, dan Toronto Center

OJK menyelenggarakan program pelatihan pengawasan terintegrasi yang merupakan kerjasama antara OJK, APRA, AIPEG dan Toronto Center.

Program pelatihan ini juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan APRA dan OJK pada tanggal 10 September 2015 terkait GPF Program Tahun 2016 dimana salah satu program yang disepakati adalah penyelenggaraan program pelatihan pengawasan terintegrasi.

Penerimaan Kunjungan Delegasi Bank Sentral Mesir dan Etiopia. Kunjungan Delegasi Bank Sentral Mesir (Central bank of Egypt/CBE) kepada OJK dalam rangka studi banding mengenai upaya penanggulangan penghindaran bea masuk produk impor dan *Undervative Invoice*.

Selain itu, *Central Bank of Ethiopia* melakukan studi banding ke OJK pada 26 – 29 Januari 2016 dengan topik mengenai pengaturan, pengawasan, dan perizinan perbankan, pasar modal syariah, Lembaga Keuangan Mikro, dan IKNB syariah, serta kunjungan ke BRI.

2.7.3 Isu-Isu Internasional

1. Financial Sector Assessment Program (FSAP)

Financial Sector Assessment Program (FSAP) merupakan *joint program* yang dikembangkan oleh IMF dan World Bank pada tahun 1990 sebagai suatu mekanisme untuk menilai stabilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu negara secara komprehensif dengan fokus pada kepatuhan kerangka peraturan di suatu negara terhadap berbagai prinsip internasional, seperti *Basel Core Principles* (BCP), *IOSCO Principles* dan *Insurance Core Principles* (ICPs). Berdasarkan hasil FSAP tersebut, IMF-World Bank akan mengeluarkan penilaian sebagai berikut:

Tabel II - 30 Penilaian Stabilitas dan Pengembangan Sistem Keuangan dalam FSAP

Principles	Grading
BCP	<i>compliant, largely compliant, materially non-compliant, bon compliant, dan not applicable</i>
IOSCO Principles	<i>fully implemented, broadly implemented, partly implemented, not implemented, dan not applicable</i>
ICPs	<i>observed, largely observed, partly observed, not observed, dan not applicable</i>

FSAP pertama di Indonesia telah dilakukan pada tahun 2009-2010. Pelaksanaan FSAP dilakukan secara periodik setiap lima tahun (FSAP *updates*). FSAP *updates* Indonesia berikutnya direncanakan akan dilakukan pada 2016 dengan

tentative jadwal *mission* FSAP di bulan Oktober 2016 dan publikasi laporan FSAP di triwulan I-2017.

Selanjutnya, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisiner yang terkait dengan seluruh kegiatan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan FSAP baik internal OJK maupun nasional, termasuk bekerja sama dengan lembaga/pihak lain dalam rangka pelaksanaan pra-FSAP (*self assessment*), telah dibentuk *Task Force Financial Sector Assessment Program* (FSAP) OJK. *Task Force* FSAP OJK terdiri dari Tim Pelaksana yang beranggotakan Satuan Kerja terkait dari masing-masing bidang Pengawasan Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB. *Timeline* dan program kerja *self assessment* FSAP untuk Perbankan dimulai bertahap sejak Maret 2015 sampai dengan Februari 2016.

Sampai akhir triwulan I-2016, *task force* FSAP OJK terus menyempurnakan argumentasi *self-assessment* untuk setiap *Essential Criteria* (EC) dan *Additional Criteria* (AC) dari seluruh *Core Principle* (CP), termasuk menambahkan beberapa informasi terkait implementasi di pengawasan maupun di perbankan. Pelaksanaan penyempurnaan argumentasi *self-assessment* antara lain diskusi dengan *resident advisor* IMF mengenai isu-isu dan ekspetasi asesor atas EC/CP dari BCP.

Selain itu, di level OJK *wide* telah dilakukan sosialisasi persiapan FSAP kepada seluruh industri di sektor perbankan, pasar modal dan IKNB. Tujuannya adalah untuk meningkatkan *awareness* industri atas proses FSAP yang akan dihadapi di semester II 2016 serta untuk memperoleh dukungan dari industri sehingga akan tercipta keselarasan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapi pada saat FSAP. Sosialisasi ataupun diskusi dengan industri tersebut akan terus dilakukan dengan pembahasan yang lebih mendetail.

2. Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP)

RCAP merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh BCBS dengan tujuan untuk melihat konsistensi dari regulasi yang dikeluarkan oleh Indonesia terhadap kerangka Basel baik Basel II, Basel 2.5 maupun Basel III, yang dilakukan paragraf per paragraf.

Berdasarkan hasil RCAP tersebut, BCBS akan mengeluarkan penilaian yang terdiri atas *compliant*, *largely compliant*, *materially non-compliant* dan *non-compliant*. Untuk dapat memperoleh penilaian umum (*grading compliant*), tidak boleh terdapat *grading materially non-compliant* untuk seluruh cakupan penilaian.

Pelaksanaan RCAP untuk Indonesia akan dimulai dengan penyampaian hasil *self-assessment* kepada BCBS pada Desember 2015, dan akan berakhir pada publikasi laporan RCAP pada September 2016.

Pada triwulan I-2016, telah disampaikan *self-assessment questionnaire* kepada BCBS. Selain itu, telah dilakukan *Conference Call* pada 23-24 Februari 2016 dengan pimpinan BI, OJK, perwakilan bank, *consulting firm* dan RCAP *Task Force*.

2. Mutual Evaluation

Untuk mengetahui kepatuhan suatu negara terhadap penerapan 40 rekomendasi FATF yang dikeluarkan oleh FATF pada Februari 2012, FATF melakukan *Mutual Evaluation* (ME) pada setiap negara anggota. Proses penilaian ME saat ini menggunakan metodologi yang dikeluarkan FATF pada Februari 2013, dimana penilaian mencakup selain *technical compliance* seperti halnya penilaian ME sebelumnya juga mencakup penilaian *effectiveness*.

Untuk *technical compliance rating*, penilaian sebagai berikut:

Tabel II - 31 *Technical Compliance Rating / TCR**

<i>Compliant</i>	C	Tidak terdapat kelemahan
<i>Largely Compliant</i>	LC	Hanya terdapat kelemahan yang sangat kecil
<i>Partially Compliant</i>	PC	Terdapat kelemahan yang bersifat moderat
<i>Non Compliant</i>	NC	Terdapat kelemahan yang bersifat major
<i>Not Applicable</i>	NA	Persyaratan tidak berlaku karena pertimbangan struktural, hukum, dan keberadaan lembaga suatu negara.

*) TCR mencerminkan telah dipatuhinya ketentuan yang berlaku dan pemahaman terhadap suatu kewajiban.

Sedangkan untuk penilaian *effectiveness*, penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel II - 32 *Effectiveness Rating/ER*

<i>Level of Effectiveness</i>	<i>Meaning</i>
<i>High</i>	<i>The immediate outcome is achieved to a very large extent.</i> Dibutuhkan perbaikan yang bersifat minor
<i>Substantial</i>	<i>The immediate outcome is achieved to a large extent.</i> Dibutuhkan perbaikan yang bersifat minor
<i>Moderate</i>	<i>The immediate outcome is achieved to some extent.</i> Dibutuhkan perbaikan yang bersifat major
<i>Low</i>	<i>The immediate outcome is not achieved or achieved to a negligible extent.</i> Dibutuhkan perbaikan yang mendasar.

Selanjutnya, untuk membantu kelancaran pelaksanaan penerapan *Mutual Evaluation* tahun 2017, PPATK telah membentuk Satgas *Mutual Evaluation* dengan anggota Satgas dari seluruh instansi terkait di Indonesia termasuk OJK.

Persiapan OJK menghadapi *Mutual Evaluation* pada triwulan I-2016 antara lain mengidentifikasi potensial *gap* melalui penyusunan argumentasi *self-assessment* dengan berpedoman pada "*Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and The Effectiveness of AML/CFT Systems*". Penyusunan argumen juga dilakukan dengan menambahkan beberapa informasi terkait implementasi di

pengawasan maupun di industri keuangan sektor perbankan, pasar modal dan IKNB.

4. FATCA (*Foreign Account Tax Compliant Act*)

Salah satu upaya Pemerintah Amerika untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak adalah dengan menerbitkan FATCA pada 18 Maret 2010. Ketentuan ini dibuat oleh pemerintah AS dengan tujuan untuk menanggulangi penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh warga negara AS yang melakukan *direct investment* melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun *indirect investment* melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri.

Melalui FATCA, pemerintah AS mengharuskan lembaga keuangan asing (*Foreign Financial Institution* atau FFI) dan lembaga non-keuangan (*Non-Financial Foreign Entities* atau NFFE) tertentu untuk melakukan perjanjian dengan IRS. Perjanjian dimaksud berupa kesepakatan kewajiban FFI dan NFFE terhadap IRS untuk mengidentifikasi rekening milik warga negara AS, memberikan informasi mengenai rekening tersebut, dan memberikan informasi mengenai warga negara AS yang memiliki rekening atas perusahaan asing (umumnya lebih dari 10%). Apabila perjanjian tersebut tidak dilakukan, IRS akan mengenakan 30% *withholding tax* terhadap FFI dan NFFE atas penerimaan yang mereka peroleh dari investasi di AS.

Dalam rangka memenuhi ketentuan FATCA ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh model pelaporan dengan dasar perjanjian yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat (*intergovernmental agreement/IGA*) berupa IGA 1B. Dalam perjanjian tersebut Pemerintah Indonesia telah berkomitmen kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan data wajib pajak Amerika Serikat.

Dalam rangka mendukung program pencegahan penghindaran pajak, pada akhir 2015 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015 tanggal 7 Juli 2015 dan POJK No.25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (POJK Pajak). Ketentuan ini menjadi landasan hukum bagi LJK dalam rangka pelaporan data dan informasi nasabahnya kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Selanjutnya, dalam proses pelaporan data FATCA, OJK akan menyediakan sistem pelaporan penyampaian informasi nasabah US Person dari LJK kepada OJK dan kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Otoritas yang berwenang di Indonesia. Selanjutnya data tersebut akan disampaikan oleh DJP kepada *Internal Revenue Service* sebagai Otoritas pajak di negara Amerika Serikat.

Dalam rangka pengembangan sistem pelaporan tersebut, pada triwulan I-2016 telah mulai dilakukan pengembangan awal sistem informasi pelaporan FATCA. Sistem yang dikembangkan di OJK memiliki format pelaporan data berupa XML.

2.8 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan domestik, sepanjang triwulan I-2016, OJK bersama institusi-institusi yang tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) telah melaksanakan beberapa agenda sebagai berikut:

1. Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK). Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR 17 Maret 2016. Titik berat RUU ini terletak pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan nasional.
2. Melaksanakan *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) 2016 dengan membentuk Tim Kerja Nasional FSAP. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar global dan domestik terhadap industri jasa keuangan Indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi di dalam negeri serta memperkuat peran Indonesia di pasar keuangan global.

Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah



Bab III

OJK menerbitkan **2 Peraturan OJK (POJK)** yang mengatur SJK Syariah.

OJK menyetujui permohonan terkait **Permohonan Fit and Proper Test** sebanyak Tujuh Permohonan dan permohonan terkait **Pengembangan Jaringan Kantor** sebanyak **53 Permohonan.**

Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah

III

3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Secara umum kondisi perbankan syariah selama triwulan I-2016 masih mengalami tantangan dalam menjaga pertumbuhan dan kinerjanya. Kondisi tersebut tercermin dari bervariasinya kinerja pertumbuhan dan indikator rasio-rasio Keuangan, dimana terdapat beberapa indikator mengalami penurunan meskipun di sisi lain juga terdapat peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari dinamika perekonomian yang masih dalam proses pemulihan, siklus bisnis tahunan industri serta situasi industri perbankan syariah yang masih menghadapi tantangan internal maupun eksternal.

Pada periode laporan, jumlah aset BUS dan UUS tercatat mengalami penurunan sebesar 1,9% menjadi Rp290,4 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembiayaan yang mengalami penurunan 0,7% (*qtq*) menjadi sebesar Rp211,6 triliun. Penurunan pertumbuhan pembiayaan tersebut diikuti dengan menurunnya kualitas pembiayaan dimana rasio *Non Performing*

Financing (NPF) BUS dan UUS pada triwulan I-2016 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,6% (*qtq*) menjadi sebesar 4,9, kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa sektor antara lain sektor pertambangan, energi, transportasi dan *airlines*. Di sisi lain Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan sebesar 0,3% (*qtq*) menjadi sebesar Rp231,8 triliun. Kenaikan juga terjadi pada indikator kinerja Keuangan seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Assets* (ROA) dimana masing-masing mengalami peningkatan menjadi 15,4% dan 1,2%. Selain itu terdapat perbaikan efisiensi yang tercermin dari menurunnya Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 3,4% menjadi sebesar 90,97% yang bersumber antara lain dari menurunnya biaya operasional jaringan kantor yang terlihat dari menurunnya jumlah jaringan kantor sebesar 63 kantor menjadi 2.238.

Sampai dengan triwulan I-2016, *share* aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya menjadi 4,79%, dengan proporsi aset BUS dan UUS masih mendominasi total aset perbankan syariah (BUS+UUS+BPRS) dengan presentase sebesar ±98%.

Tabel III - 1 Indikator Perbankan Syariah

Indikator Utama	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Pertumbuhan (qtq)	
	I-2015	II-2015	III-2015	IV-2015	I-2016*	Nominal	%
SHARE TOTAL ASET (BUS + UUS + BPRS)							
Total Aset BUS + UUS (dalam triliun rupiah)	268,36	273,49	282,16	296,26	290,43	-5,83	-1,97
Total Aset BPRS (dalam triliun rupiah)	6,73	6,85	7,17	7,74	7,87	0,13	1,67
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	4,68	4,65	4,63	4,87	4,79		-0,08
BUS + UUS							
DPK (dalam triliun rupiah)	212,99	213,48	219,31	231,18	231,82	0,64	0,28
- Giro	20,28	21,94	20,68	21,19	19,37	-1,83	-8,62
- Tabungan	61,19	61,03	63,93	68,65	69,07	0,42	0,61
- Deposito	131,52	130,51	134,71	141,33	143,38	2,05	1,45
Pembiayaan (dalam triliun rupiah)	200,71	206,06	208,14	213,00	211,57	-1,43	-0,67
Jumlah NPF (dalam triliun rupiah)	9,65	9,76	9,85	9,25	10,48	1,23	13,29
CAR (%) – BUS	14,43	14,09	15,15	15,02	15,44		0,42
NPF Gross (%)	4,81	4,73	4,73	4,34	4,95		0,61
ROA (%)	1,13	0,89	0,93	0,84	1,24		0,40
BOPO (%)	92,78	94,22	93,59	94,38	90,97		-3,42
FDR (%)	94,24	96,52	94,91	92,14	91,27		-0,87
Jumlah Bank							
- BUS	12	12	12	12	12	-	-
- UUS	22	22	22	22	22	-	-
Jumlah Kantor	2.475	2.454	2.367	2.301	2.238	-63	-2,74
BPRS							
DPK (dalam triliun rupiah)	4,15	4,10	4,38	4,80	4,88	0,08	1,72
Pembiayaan (dalam triliun rupiah)	5,22	5,56	5,66	5,77	5,86	0,09	1,60
Jumlah NPF (dalam triliun rupiah)	0,49	0,51	0,56	0,47	0,55	0,08	16,50
CAR (%)	23,04	21,73	20,71	21,47	23,17		1,69
NPF Gross (%)	10,36	9,25	9,86	8,20	9,41		1,20
ROA (%)	2,07	2,3	2,22	2,20	2,32		0,12
BOPO (%)	88,66	88,13	89,55	88,09	90,18		2,09
FDR (%)	125,6	135,68	129,01	120,06	119,92		-0,14
Jumlah Bank	162	161	162	163	164	1	0,61
Jumlah Kantor	471	433	443	446	448	2	0,45

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan Syariah, Februari 2016

3.1.2 Perkembangan Pasar Modal Syariah

Pada periode laporan, industri pasar modal syariah tercatat mengalami peningkatan tercermin dari indeks ISSI dan JII baik indeks dan kapitalisasi serta pada jumlah Reksa Dana Syariah. Selain itu juga terdapat peningkatan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari sisi nilai *outstanding* dan jumlah sukuk beredar.

A. Perkembangan Saham Syariah

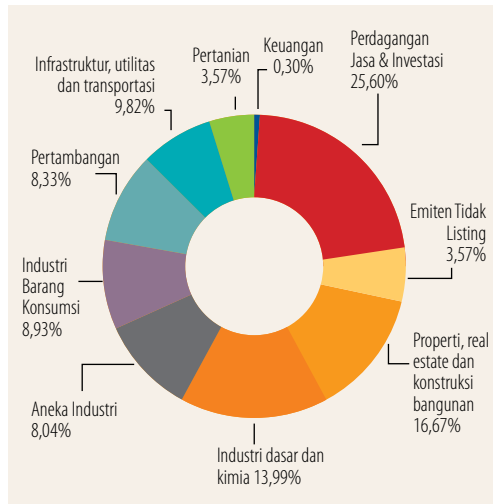
OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) untuk periode II melalui Surat Keputusan

Dewan Komisiner OJK nomor Kep-63/D.04/2015. Efek syariah yang termuat dalam DES periode II meliputi 331 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. Selama periode laporan terdapat penambahan lima saham yang masuk dalam DES sehingga pada akhir periode laporan saham yang masuk dalam DES berjumlah 336 saham.

Mayoritas Saham Syariah masih bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (25,6%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (16,7%), sektor Industri Dasar

dan Kimia (13,9%), dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Grafik III - 1 Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



Sejalan dengan peningkatan pada indeks IHSG, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tercatat mengalami peningkatan sebesar 7,5% menjadi 155,9. Selain itu, nilai kapitalisasi pasar saham juga meningkat 7,5% menjadi Rp2.796,0 triliun dengan *market share* sekitar 54,4% dari total kapitalisasi pasar saham.

Jakarta Islamic Index (JII) mengalami peningkatan sebesar 8,2% menjadi 652,7. Nilai kapitalisasi pasar saham JII juga meningkat sebesar 8,2% menjadi Rp1.879,4 triliun dengan *market share* sebesar 36,5% dari total kapitalisasi pasar saham.

Tabel III - 2 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan
2010	1.134.632,00	-	3.247.096,78
2011	1.414.983,81	1.968.091,37	3.537.294,21
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	4.126.994,93
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	4.219.020,24
2014	1.944.531,70	2.946.892,79	5.228.043,48
2015	1.737.290,98	2.600.850,72	4.872.701,66
2016 Triwulan I	1.879.354,35	2.796.012,59	5.143.453,35

Tabel III - 3 Perkembangan Indeks Saham Syariah

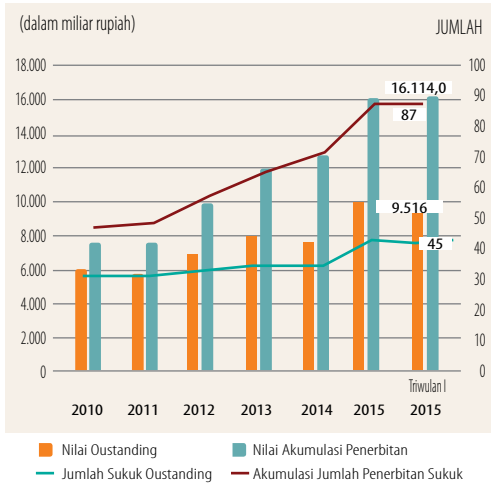
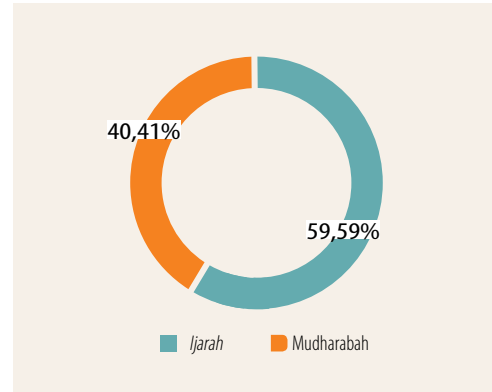
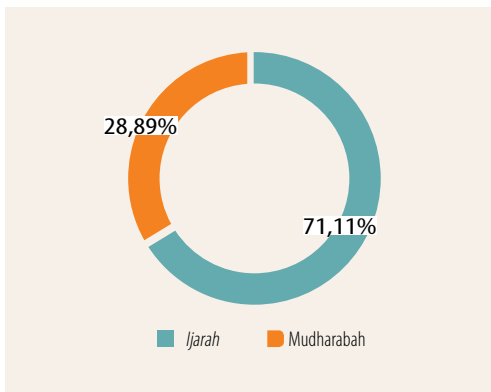
Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan
2010	532,90	-	3.703,51
2011	537,03	125,36	3.821,99
2012	594,78	144,99	4.316,69
2013	585,11	143,71	4.274,18
2014	691,04	168,64	5.226,95
2015	603,35	145,06	4.593,01
2016 Triwulan I	652,687	155,912	4.845,37

B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode laporan, belum terdapat penerbitan, namun terdapat dua seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan masing-masing senilai Rp100 miliar dan Rp286 miliar. Dengan demikian, jumlah *outstanding* Sukuk korporasi menjadi sebanyak 45 seri atau menurun 4,26% dengan nilai *outstanding* sebesar Rp9,5 triliun. Dari 45 seri tersebut 32 seri merupakan sukuk korporasi (71,1%) yang menggunakan akad *ijarah* dengan nilai Rp5,7 triliun (59,6%) dan 13 sukuk korporasi (28,9%) menggunakan akad *mudharabah* dengan Rp3,8 triliun (40,4%).

Tabel III - 4 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah
2010	7.815	47	6.121	32
2011	7.915	48	5.876	31
2012	9.790	54	6.883	32
2013	11.994	64	7.553	36
2014	12.956	71	7.105	35
2015	16.114	87	9.902	47
2016 Triwulan I	16.114	87	9.516	45

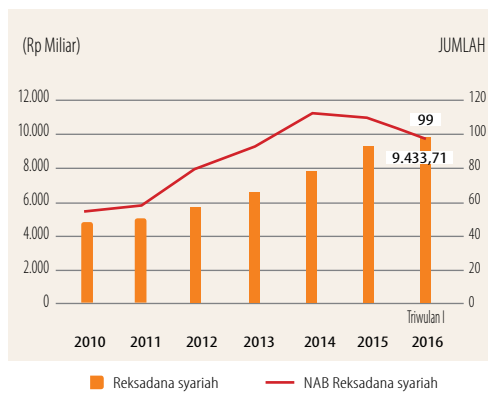
Grafik III - 2 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding**Grafik III - 4** Perbandingan Nilai Sukuk Outstanding**Grafik III - 3** Perbandingan Jumlah Sukuk Outstanding

C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama periode laporan, terdapat tujuh Reksa Dana Syariah yang mendapatkan pernyataan efektif terbit dan terdapat satu Reksa Dana Syariah yang dibubarkan sehingga sampai akhir periode laporan total Reksa Dana Syariah meningkat 6,5% menjadi sebanyak 99. Namun demikian total NAB mengalami penurunan 14,4% menjadi Rp9,4 triliun. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 8,6% dari total 1.150 Reksa Dana dan 3,2% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp293,3 triliun.

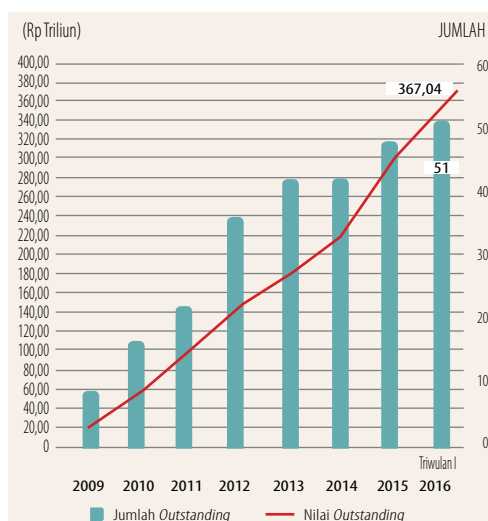
Tabel III - 5 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (dalam miliar rupiah)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%
2010	48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%
2011	50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%
2014	74	820	894	8,31%	11.236,00	230.225,59	241.462,09	4,65%
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%
2016 Triwulan I	99	1.051	1.150	8,61%	9.433,71	283.879,95	293.313,66	3,22%

Grafik III - 5 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah

D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai akhir periode laporan jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 51 seri dengan nilai sebesar Rp367,04 triliun.

Grafik III - 6 Perkembangan Sukuk Negara Outstanding**Tabel III - 6** Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*

Tahun	Nilai Outstanding (triliun)	Total Jumlah Outstanding
2010	44,34	16
2011	77,73	22
2012	124,44	36
2013	169,29	42
2014	206,10	42
2015	296,07	47
2016 Triwulan I	367,04	51

E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Sampai dengan akhir periode laporan, pihak yang terlibat dalam jasa pelayanan syariah meliputi 21 Penjamin Emisi Efek, 34 Manajer Investasi, lima Pihak Penerbit DES, 11 Bank Kustodian, delapan Wali Amanat, sembilan Perusahaan Efek serta dua administrator rekening syariah.

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

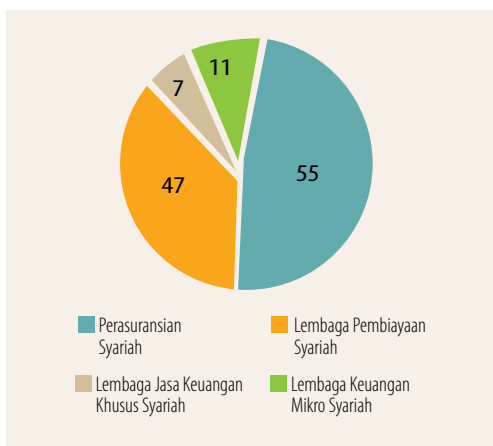
Selama periode laporan, Aset IKNB Syariah mengalami kenaikan sebesar 10,1% dimana Industri perasuransian syariah masih mendominasi dengan porsi aset sebesar 40,6%.

Tabel III - 7 Aset IKNB Syariah (dalam triliun rupiah)

No.	Industri	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015	Triwulan I-2016
1	Perasuransian Syariah	23,8	24,21	23,64	26,52	28,97
2	Lembaga Pembiayaan Syariah	20	20,03	21,31	22,83	25,91
3	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya	12,83	13,86	14,94	15,5	16,47
4	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	0,03	0,06
	Total Aset	56,63	58,10	59,89	64,88	71,41

Sampai dengan akhir periode, terdapat 55 perusahaan perasuransian syariah, 47 lembaga pembiayaan syariah (termasuk tujuh perusahaan modal ventura syariah), tujuh lembaga jasa keuangan khusus syariah, dan 11 lembaga keuangan mikro syariah. Selama periode laporan, jumlah entitas IKNB Syariah mengalami kenaikan sebanyak 10 perusahaan.

Grafik III - 7 Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan I-2016



A. Industri Perasuransian Syariah

Industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset, investasi, kontribusi bruto, klaim bruto, dan kewajiban masing-masing sebesar 21,7% menjadi Rp28,97 triliun, 19,6% menjadi Rp24,9 triliun, 10,1% menjadi 2,75 triliun; 4,1% menjadi Rp0,9 triliun; dan 38,7% menjadi Rp6,12 triliun

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledge* dan unit syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 55 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah yang terdiri dari sembilan perusahaan asuransi syariah, 43 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

B. Industri Pembiayaan Syariah

Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada periode pelaporan mengalami kenaikan sebesar 13,9% dari triwulan sebelumnya.

Tabel III - 8 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)

No	Jenis Indikator	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015	Triwulan I-2016
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	19,39	19,6	18,93	21,61	23,62
	Asuransi Umum Syariah	3,39	3,55	3,65	3,79	4,17
	Reasuransi Syariah	1,02	1,06	1,06	1,12	1,18
	Jumlah	23,8	24,21	23,64	26,52	28,97
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	17,7	17,7	17,28	19,58	21,23
	Asuransi Umum Syariah	2,24	2,24	2,41	2,54	2,69
	Reasuransi Syariah	0,87	0,87	0,91	0,95	0,98
	Jumlah	20,81	20,81	20,6	23,07	24,90
3	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	7,88	2,12	4,36	6,48	2,17
	Asuransi Umum Syariah	1,17	0,29	0,62	0,98	0,49
	Reasuransi Syariah	0,23	0,09	0,15	0,2	0,10
	Jumlah	9,28	2,5	5,13	7,66	2,75
4	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	2,22	0,66	1,32	1,93	0,69
	Asuransi Umum Syariah	0,61	0,13	0,27	0,39	0,15
	Reasuransi Syariah	0,16	0,07	0,12	0,15	0,06
	Jumlah	2,99	0,86	1,71	2,47	0,90
5	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	2,55	2,48	2,48	2,74	3,69
	Asuransi Umum Syariah	1,68	1,66	1,74	1,78	2,10
	Reasuransi Syariah	0,27	0,27	0,27	0,27	0,32
	Jumlah	4,50	4,41	4,77	4,79	6,12

Tabel III - 9 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar rupiah)

No	Komponen	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015	Triwulan I-2016
1	Kas dan Setara Kas	429,16	1.071,21	430,45	482,83	488,85
2	Efek Syariah yang Dimiliki	5,5	5,5	7,5	0	0,50
3	Piutang	15.092,33	14.992,46	16.271,82	18.401,20	21.446,60
4	Jjarah	2.051,12	2.071,30	2.080,75	1.832,50	1.787,17
5	Penyertaan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Persediaan	20,62	17,51	18,4	22,46	23,05
7	Aktiva Tetap dan Inventaris	66,48	71,83	70,26	86,12	83,00
8	Aktiva Lain-lain	1.964,42	1.384,37	2.010,97	1.525,27	1.623,49
	TOTAL AKTIVA	19.629,63	19.614,18	20.890,15	22.350,38	25.452,67

Sampai dengan periode laporan, terdapat 40 perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri atas tiga perusahaan berbentuk full fledge dan 37 perusahaan berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Sementara itu, pada perusahaan modal ventura terdapat empat perusahaan modal ventura syariah dan tiga perusahaan berbentuk UUS dengan total aset sebesar Rp459,6 miliar.

C. Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya & Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Jumlah perusahaan penjaminan syariah sebanyak lima perusahaan, terdiri atas dua *full fledge* dan tiga UUS dengan total aset sebesar Rp644 miliar yang didominasi oleh investasi pada deposito, diikuti oleh aktiva tetap, dan piutang imbal jasa penjaminan. Selain itu, aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya terdiri dari PT Pegadaian (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) masing-masing sebesar Rp3,9 triliun dan Rp12,0 triliun. Jumlah lembaga keuangan mikro syariah adalah sebanyak 11 perusahaan berbentuk *full fledge* dengan total aset Rp59,5 miliar.

3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Pada triwulan I-2016, OJK menerbitkan dua POJK yang mengatur perbankan syariah yaitu :

1. POJK No. 2/POJK.03/2016 tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank

Penerbitan POJK ini merupakan salah satu bentuk respon OJK terhadap perlambatan pertumbuhan perekonomian. POJK ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Ketentuan ini mengatur antara lain mengenai kebijakan pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional untuk:

- (a) Bank Umum Konvensional yang mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah berupa: (i) Pengurangan alokasi Modal Inti dalam perhitungan Pembukaan Jaringan Kantor, dan/atau (ii) Pelonggaran perimbangan penyebaran jaringan kantor;
- (b) Bank Umum Syariah (BUS) berupa: (i) Kemudahan persyaratan pembukaan LSB terkait wilayah kerja KC induk LSB, (ii) Perluasan cakupan layanan kegiatan kas mobil, dan/atau (iii) Penurunan biaya investasi dalam perhitungan alokasi Modal Inti untuk Pembukaan Jaringan Kantor;
- (c) Unit Usaha Syariah (UUS) berupa: (i) Perluasan jenis kantor Bank Umum Konvensional yang dapat melakukan kegiatan LS (Layanan Syariah), (ii) Kemudahan persyaratan pembukaan LS terkait wilayah kerja KC induk LS,

(iii) Perluasan cakupan layanan kegiatan kas mobil; dan/atau (iv) Penurunan biaya investasi dalam perhitungan alokasi Modal Inti untuk Pembukaan Jaringan Kantor.

2. POJK No. 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk memperkuat perbankan serta meningkatkan daya saing khususnya bagi perbankan syariah melalui penguatan permodalan, penataan kepemilikan, peningkatan kualitas pengurus, dan peningkatan layanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pokok-pokok pengaturan tersebut antara lain berisi: (a) Pendirian dan pencabutan BPRS, kepemilikan dan permodalan BPRS, kepengurusan BPRS, serta jaringan kantor; (b) Modal disetor minimal dibedakan menjadi empat zona; (c) Persetujuan pendirian BPRS terdiri dari: (i) persetujuan prinsip dan (ii) persetujuan izin usaha; (d) Setiap BPRS wajib memiliki paling sedikit satu pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% sesuai dengan kriteria mengenai PSP (Pemegang Saham Pengendali) yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPRS, dengan masa transisi lima tahun; serta (e) Perluasan cakupan definisi Pejabat Eksekutif yaitu menjadi pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPRS, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.

3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Pada periode ini, OJK sedang melakukan penyusunan dan penyempurnaan regulasi pasar modal berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Produk Investasi Syariah (DIRE Syariah). Penyusunan rancangan peraturan ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dalam rangka menambah variasi produk Pasar Modal Syariah. Pada triwulan I-2016, Penyusunan Rancangan Peraturan ini sedang dalam pembahasan internal.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Perusahaan Efek yang Menjalankan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi Syariah.

Penyusunan rancangan Peraturan ini bertujuan untuk menyusun kerangka regulasi yang dapat mendukung penguatan pengaturan, khususnya terkait lembaga penunjang di pasar modal syariah dan perusahaan efek, serta sebagai pedoman bagi perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang menerapkan Prinsip Syariah demi meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk dan jasa Syariah di Pasar Modal. Pada triwulan I-2016, Penyusunan Rancangan Peraturan ini sedang dalam pembahasan internal.

3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Selama Triwulan I Tahun 2016, OJK juga telah menetapkan dua Surat Edaran, yaitu:

1) SEOJK nomor 2/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Penerbitan surat edaran ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah, dimana secara garis besar Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk bagaimana cara menghitung tingkat kesehatan keuangan bagi perusahaan pembiayaan syariah.

2) SEOJK nomor 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah, dimana secara garis besar Surat Edaran tersebut merupakan mekanisme penyampaian dan pengisian laporan bulanan bagi perusahaan pembiayaan syariah.

3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Terkait dengan pengawasan perbankan syariah, OJK mencatat bahwa kondisi permodalan industri Perbankan Syariah sampai akhir periode laporan

secara umum berada di atas *threshold* (14%) yakni 15,44%, meskipun terdapat tiga Bank dengan rasio KPMM kurang dari 14%. Sebagai upaya *prudential supervisory action*, OJK melakukan diskusi dengan PSP dan/atau pengurus bank untuk melakukan tambahan modal disetor. Sesuai RBB 2016, terdapat tujuh BUS yang akan melakukan tambahan modal disetor dengan total sebesar Rp3,6 triliun.

NPF *Gross BUS* posisi triwulan I-2016 mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,59% (*qta*). Penyebab kenaikan tersebut antara lain pertumbuhan pembiayaan yang tinggi khususnya selama periode 2010 – 2014 dengan *Risk appetite* yang tinggi terhadap pembiayaan pada sektor-sektor dengan risiko tinggi, tidak dilindungi dengan jaminan yang memadai, persiapan infrastruktur yang kurang memadai dan ekspansi pembiayaan baru yang relatif rendah. Disamping itu nasabah BUS terbatas dan bukan *prime customer*,

serta produk pembiayaan yang masih terbatas (sebagian besar pembiayaan dengan akad *Murabahah/installment loan*).

Terkait dengan tingkat efisiensi BUS, OJK mencatat masih relatif rendah antara lain karena struktur dana bank didominasi dana mahal (*deposito*), rendahnya *fee based income* karena produk yang terbatas dan jaringan kantor bank yang belum optimal. Selain itu, RBBR perbankan syariah posisi Desember 2015, secara umum tergolong moderat dengan kecenderungan stabil sehingga fokus pengawasan 2016 masih terhadap risiko kredit, operasional dan stratejik serta penerapan tata kelola yang baik (GCG).

Selama triwulan I-2016, OJK menerima permohonan 27 izin *fit and proper test*, 12 izin produk baru, 105 izin pengembangan jaringan kantor dan 10 proses perizinan lainnya. Detail hasil proses perizinan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel III - 10 Permohonan Perbankan Syariah

Jenis Proses Perizinan	Total Permohonan Masuk	Disetujui	Tolak	Dihentikan	Dibatalkan	Belum Memenuhi Persyaratan Administrasi	Belum Memenuhi Ketentuan yang Berlaku	Dalam Proses Penyelesaian
Fit and Paper Test:								
1. Pemegang Saham Pengendali (PSP)	1	-	-	-	-	-	-	1
2. Pengurus Bank Syariah (Komisaris dan Direksi)	25	7	-	1	-	-	1	16
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	1	-	-	-	-	-	-	1
Total Permohonan Proses FPT	27	7	-	1	-	-	1	18
Perizinan Produk Baru								
1. Perizinan Produk Baru	12	-	-	-	-	-	10	2
Total Permohonan Perizinan Produk Baru	12	-	-	-	-	-	10	2
Pengembangan Jaringan Kantor:								
1. Pembukaan Kantor Baru	9	5	-	-	-	-	-	4
2. Penutupan Kantor	68	31	-	-	-	-	22	15
3. Pindahan Alamat Kantor	28	17	-	-	-	-	1	10
Total Permohonan Pengembangan Jaringan Kantor	105	53	-	-	-	-	23	29
Perizinan Lainnya:								
1. Izin Prinsip	-	-	-	-	-	-	-	3
2. Izin Usaha	6	3	-	-	-	-	-	1
3. Izin Prinsip Disetujui namun belum mengajukan Izin Usaha	2	1	-	-	-	-	-	1
4. Konvensi	2	-	-	-	1	-	-	-
5. Pemisahan Spin Off	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kantor Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Merger dan Akuisisi	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Konsolidasi	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Perubahan Nama	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Penutupan/Pencabutan Izin Usaha Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Kegiatan Usaha dalam Valas	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Proses Perizinan Lainnya	10	4	-	-	1	-	-	5

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan terkait dengan pasar modal syariah, berdasarkan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, OJK dapat memberikan persetujuan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES). Selama triwulan I-2016, OJK telah memberikan ijin menjadi Pihak Penerbit DES kepada PT Schroders Investment Management Indonesia dan PT Aberdeen Asset Management sehingga sampai akhir periode laporan terdapat 5 Pihak Penerbit DES. Terkait pengawasan terhadap Pihak Penerbit DES, OJK menerima dan mengevaluasi laporan DES dari Pihak Penerbit DES.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap 55 perusahaan perasuransian syariah dan telah menerbitkan 3 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) terhadap Perusahaan Perasuransian syariah. Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan on-site terhadap empat Perusahaan Perasuransian syariah.

Untuk pengawasan terhadap lembaga pembiayaan dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya, OJK telah menerbitkan dua LHPS terhadap lembaga pembiayaan syariah, serta melakukan pemeriksaan on-site terhadap empat lembaga pembiayaan syariah.

Berkaitan dengan layanan kelembagaan, selama periode laporan terdapat satu pemberian izin unit syariah Perusahaan Perasuransian kepada PT Asuransi Asei Indonesia, satu pemberian izin unit usaha syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT Wannamas Multifinance, pemberian izin pembukaan sembilan kantor cabang Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan, pengadministrasian pembukaan satu Kantor Pemasaran unit syariah dari Perusahaan Perasuransian, pencatatan atas 14 produk asuransi jiwa, pencatatan atas delapan produk

asuransi umum syariah, persetujuan pemasaran melalui pemasaran bancassurance atas tiga produk asuransi, penilaian kemampuan dan kepatutan yang terdiri atas 12 calon pihak utama perasuransian syariah, dua calon pihak utama pembiayaan syariah, dan satu calon pihak utama Perusahaan Penjaminan Syariah.

3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

A. Perbankan Syariah

Pembiayaan Pada Sektor Pertanian Organik

Dalam rangka meningkatkan pembiayaan perbankan syariah di sektor strategis terutama sektor pertanian organik, serta melaksanakan *Roadmap Sustainable Finance 2015-2019* yang antara lain memuat inisiatif untuk mendorong sektor jasa keuangan agar terlibat mendukung sektor-sektor usaha yang peduli lingkungan hidup (*eco-friendly*), OJK di 2016 melakukan kajian mengenai "Pola Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Pertanian Organik". Kajian ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor *viability* dan *feasibility* perbankan syariah untuk masuk pada pembiayaan sektor pertanian organik serta menginisiasi dan membentuk model pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian organik subsektor tanaman pangan khususnya padi.

Pada periode laporan, OJK dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian melakukan pertemuan awal untuk bertukar informasi, dan menyusun rencana kerja sama terkait pengembangan pertanian organik. OJK juga menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) "Pengembangan Pertanian Organik dengan Pembiayaan Syariah". Salah satu kesimpulan FGD dimaksud adalah perlunya pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan Pertanian Organik dengan Pembiayaan Syariah.

Kajian Penyempurnaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS

Selain itu, dalam rangka mendukung ekspansi perekonomian, khususnya di segmen UMKM secara optimal dan berkesinambungan, ketahanan dan daya saing industri BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), OJK melakukan kajian mengenai “Kajian Penyempurnaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS”, dengan tujuan untuk memperkirakan jumlah modal inti minimum yang diperlukan BPRS *existing* untuk bersaing dan tumbuh berkelanjutan serta mengevaluasi standar (komponen dan parameter) KPMM yang relevan bagi penguatan ketahanan permodalan BPRS dalam menyerap risiko aktivitas operasionalnya.

Adapun ruang lingkup penelitian difokuskan pada BPRS yang beroperasi minimal tiga tahun, dengan pertimbangan ketersediaan dan relevansi data dengan kondisi terkini industri. Dalam konteks KPMM, evaluasi difokuskan pada kecukupan komponen permodalan dan tidak menyentuh kelayakan parameter atau bobot risiko dari aset BPRS. Pendekatan atau *tools analysis* yang digunakan adalah *cluster analysis*.

Coaching clinic pelaporan LSMK

OJK juga melakukan berbagai kegiatan lain dalam rangka pengembangan perbankan syariah antara lain bekerja sama dengan BI melakukan pelaksanaan *coaching clinic* pelaporan LSMK terhadap delapan BUS/UUS dengan tujuan untuk memelihara kualitas data yang disampaikan oleh BUS ataupun UUS. OJK juga menyusun kebutuhan informasi penyempurnaan LBBUS terkait dengan SEOJK ATMR Risiko Kredit dan Risiko Pasar guna meningkatkan informasi dalam LSMK untuk memfasilitasi ATMR Risiko Pasar dan Risiko Kredit.

RKSI

1. Narasumber mengenai pengembangan perbankan syariah di Indonesia dalam rangkaian kegiatan Study Visit National Bank of Ethiopia ke Otoritas Jasa Keuangan yang dikoordinasi oleh Direktorat Internasional pada tanggal 15 – 19 Februari 2016.
2. Menyampaikan data dan penjelasan mengenai Industri Perbankan Syariah di Indonesia yang mencakup progress pengembangan saat ini, *framework* regulasi dan rencana pengembangan ke depan (*Roadmap* Perbankan Syariah) melalui *working group* yang dikoordinasi oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI dalam diskusi dengan Deloitte dan Islamic Development Bank (IDB) pada tanggal 7-10 Maret 2016 dalam rangka pendirian World Islamic Infrastructure Bank (nama masih bersifat tentatif). World Islamic Infrastructure Bank merupakan suatu bank multilateral yang akan didirikan atas inisiatif Islamic Development Bank (IDB), Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki. Diskusi dengan pihak Deloitte dan IDB tersebut adalah dalam rangka penyusunan studi kelayakan penempatan kantor pusat World Islamic Infrastructure Bank oleh Deloitte selaku konsultan yang ditunjuk oleh IDB untuk menentukan lokasi kantor pusat bank multilateral tersebut apakah di Indonesia atau di Turki. Keberadaan *sharia investment bank* tersebut sangat diperlukan guna mendukung pembangunan proyek-proyek Pemerintah sekaligus dapat membantu memenuhi kebutuhan likuiditas di industri perbankan syariah.
3. Bersama dengan Bank Indonesia memfasilitasi peluncuran Indonesia Islamic Finance Country Report (IFCR) 2016 pada tanggal 11 Maret 2016 di

Jakarta. Indonesia IFCR 2016 disusun dan dikembangkan oleh Islamic Research and Training Institute (IRTI-IDB), Thompson Reuters dan General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI) dengan mempertimbangkan masukan dari Otoritas Jasa Keuangan. Indonesia IFCR berisi analisis dan gambaran mengenai pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia serta potensi untuk pertumbuhannya di Indonesia.

B. Produk dan Edukasi Perbankan Syariah

Pada periode laporan, OJK melakukan berbagai kegiatan terkait pengembangan produk dan edukasi perbankan syariah antara lain Sosialisasi dan Edukasi Keuangan Syariah (Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah) beserta industri keuangan syariah dengan tujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan Kegiatan *Outreach* SJK Syariah yang terintegrasi melalui kegiatan Keuangan Syariah Fair Jakarta 2016 yang meliputi kegiatan: *Pre-event* KSF Jakarta 2016, *Workshop* Perbankan Syariah "iB Goes to School", *Workshop* perbankan syariah untuk guru dan tenaga pengajar sekolah menengah, Peluncuran: Buku Standar Produk Perbankan Syariah: Produk *Murabahah* dan Produk *Musyarakah* serta *Musyarakah Mutanaqisah* serta Peluncuran SIKOMPAK SYARIAH (Sinergi Komunikasi dan Pemasaran Produk Keuangan Syariah).

Selama periode laporan, OJK menyelenggarakan *Expo iB Vaganza* bersama industri perbankan dan keuangan syariah sekaligus sosialisasi serta edukasi publik perbankan syariah dan OJK dengan tujuan peningkatan *outreach* nasabah baru perbankan syariah. OJK bekerja sama dengan

Kompasiana melakukan sosialisasi terkait Perbankan Syariah kepada pihak media yang dilakukan di Jakarta dengan peserta 63 orang dan di Palembang dengan peserta 41 orang.

OJK juga melakukan penyusunan, pencetakan dan diseminasi materi sosialisasi dan edukasi perbankan syariah antara lain Buku Standar Produk *Musyarakah*, *Musyarakah Mutanaqisah*, dan *Murabahah*; mendesain Buku Seri Edukasi Produk dan Jasa Perbankan Syariah; *Flyer* Kampanye Program Edukasi Perbankan Syariah 2016 serta Kampanye Program Aku Cinta Keuangan Syariah 2016 serta Kuesioner Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Perbankan/Keuangan Syariah 2016. Terkait dengan edukasi perbankan syariah, OJK melaksanakan kegiatan *Training of Trainers* (TOT) di Bogor yang diikuti oleh 50 peserta. OJK juga menjadi narasumber untuk beberapa universitas, dan OJK juga melaksanakan survei tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. Selain itu, OJK juga sedang menyusun Standar Produk Ijarah.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

Selama periode laporan OJK telah melakukan beberapa kajian terkait dengan pengembangan Pengawasan Pasar Modal Syariah:

1. Kajian Inisiasi Undang-Undang Efek Syariah.
2. Kajian Metodologi Pemeringkatan Sukuk
3. Kajian Pengembangan Ahli Syariah Pasar Modal.
4. Kajian kontrak perwaliamanatan Sukuk
5. Kajian Pengembangan Sukuk Daerah.
6. Kajian Pengembangan Likuiditas Sukuk di Pasar Sekunder.
7. Kajian Tentang Transaksi Efek syariah (Repo Syariah)

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

Selama periode laporan, terdapat beberapa kegiatan pengembangan yang sedang dilakukan IKNB Syariah antara lain yaitu:

1. Keuangan Syariah Fair 2016

Pada Triwulan I-2016, OJK menyelenggarakan Keuangan Syariah Fair (KSF) di Jakarta. KSF merupakan salah satu strategi OJK untuk mendekatkan masyarakat dengan industri keuangan syariah dan sebagai sarana memperoleh informasi tentang keunggulan produk dan jasa keuangan syariah, serta memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia.

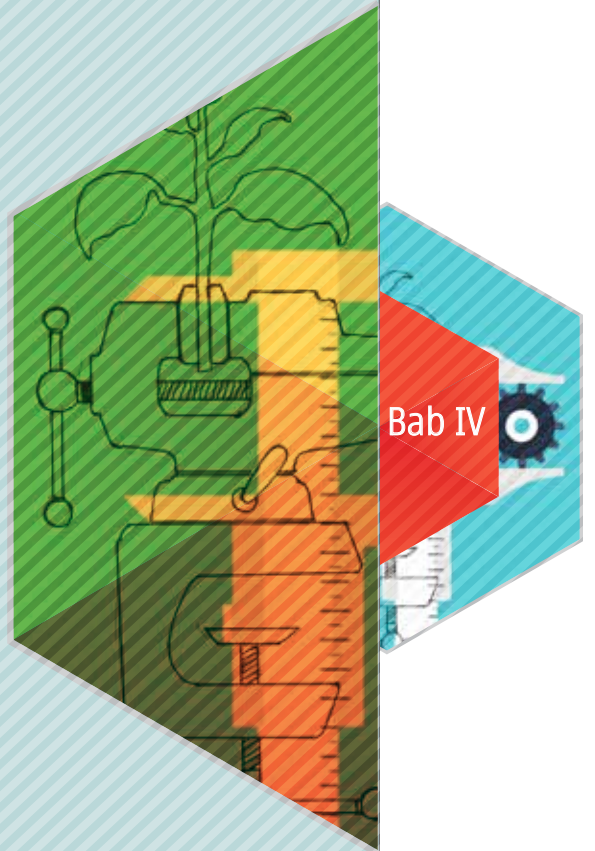
2. *Training of Trainer (ToT)* Keuangan Syariah

Pada periode laporan, OJK melakukan penyusunan modul ajar yang akan digunakan pada pelaksanaan ToT Keuangan Syariah periode laporan berikutnya. Modul ajar terdiri dari modul Asuransi Syariah, Modul pegadaian Syariah dan Modul Pembiayaan Syariah.

3. Sosialisasi Asuransi Syariah

Pada periode laporan, OJK melakukan sosialisasi asuransi syariah di Semarang bekerjasama dengan kampus Universitas Negeri Semarang. Topik yang diangkat adalah "Aspek Kelembagaan dan Sertifikasi DPS pada Perusahaan Asuransi Syariah". Acara ini dihadiri oleh narasumber dari perwakilan Dewan Syariah Nasional.

Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi



OJK meraih ***The 1st PR INDONESIA
Media Relations Awards & Summit
(PRIMAS) 2016*** untuk kategori Lembaga
Negara dengan Media Exposure terbaik.

OJK meluncurkan ***Sistem Informasi
Sumber Daya Manusia Otoritas
Jasa Keuangan (SIMFOSIA)***.

OJK menerima **16 Kunjungan
Instansi** dengan total Peserta
1.075 peserta.

Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi

IV

4.1 MANAJEMEN STRATEGIS DAN KINERJA OJK

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Manajemen strategis merupakan proses memformulasikan strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran dan *monitoring* atas keberhasilan pencapaian strategi. Untuk mendukung implementasi manajemen strategi, OJK memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penilaian kinerja OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Pada periode laporan, siklus MSAK berada pada tahap kedua yaitu penandatanganan Kesepakatan Kerja 2016, operasionalisasi Strategi OJK 2016 dan penyusunan RKA 2017.

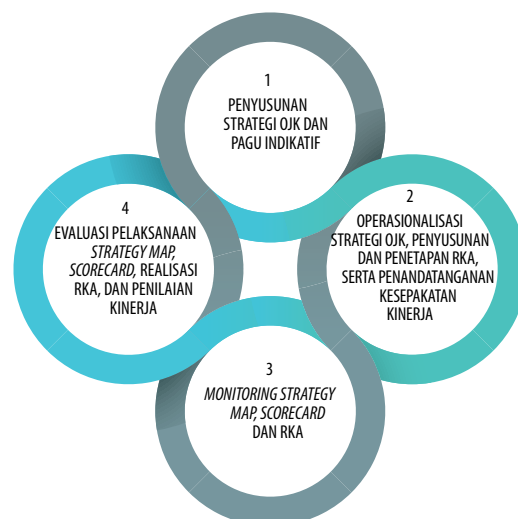
Selama periode laporan, OJK melakukan penandatanganan Kesepakatan Kinerja antara Anggota Dewan Komisioner dengan Deputi Komisioner dan Kepala Departemen di bawah supervisinya. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas proses pengelolaan kinerja, OJK

memulai pengembangan integrasi Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) OJK dengan sistem manajemen risiko. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MSAK, OJK melaksanakan pelatihan mengenai sistem pengelolaan kinerja dan survei persepsi kinerja kepada manajer IKU dan Anggaran dari masing-masing Satuan Kerja.

Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, OJK menerbitkan Laporan Triwulan IV-2015 dan Laporan Kinerja OJK 2015. Penerbitan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan OJK selama periode laporan.

Grafik IV - 1 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)

[sesuai PDK No.1/PDK.01/2013]



4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki *Strategy Map* 2016 yang didalamnya terdapat tujuh Sasaran Strategis OJK yang dapat dijabarkan sebagai berikut indikator pencapaiannya:

1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Tangguh, Kontributif dan Inklusif

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi Sektor Jasa Keuangan (SJK) seperti target peningkatan kredit (Perbankan), pertumbuhan Emiten dan perusahaan publik (Pasar Modal) serta pertumbuhan premi asuransi, piutang pembiayaan, aset penjaminan dan aset dana pensiun (IKNB) serta melalui pengukuran indeks kesehatan SJK seperti rasio *Capital Adequacy ratio/CAR* (Perbankan), Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan/MKBD (Pasar Modal), serta rasio tingkat kesehatan IKNB. Selain itu Sasaran Strategis ini juga diukur melalui kenaikan Indeks Inklusi keuangan dan tingkat kepuasan *Stakeholder* terhadap kinerja OJK.

2. Meningkatkan Pengaturan SJK yang Selaras dan Terintegrasi

Keberhasilan Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase ketentuan SJK yang diselaraskan dan persentase peraturan OJK yang berstandar internasional.

3. Mengembangkan SJK yang Kontributif, Stabil dan Berdaya Saing Global

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui peningkatan pendalaman pasar keuangan melalui pengawasan terhadap pencapaian Kredit sesuai RBB dengan target 100% (Perbankan), persentase pertambahan jumlah Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang melakukan pemasaran produk pengelola investasi (Pasar Modal), persentase peningkatan cakupan program asuransi

mikro (IKNB). Sasaran Strategis ini juga diukur melalui Kontribusi OJK dalam program prioritas pemerintah melalui persentase Bank Umum yang mencapai target kredit di sektor produktif, penambahan produk Reksadana Penyertaan Terbatas, dan presentase kenaikan lahan pertanian yang dijamin asuransi pertanian. Selain itu, Sasaran Strategis ini juga diukur melalui peran KR/ KOJK terhadap peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah serta ketahanan dan daya saing global sektor jasa keuangan.

4. Mengoptimalkan Pengawasan SJK yang Terintegrasi;

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase pelaksanaan pengawasan SJK yang terintegrasi, penanganan kasus dugaan tindak pidana SJK serta penerapan pelayanan perizinan prima dan terintegrasi.

5. Mengoptimalkan Edukasi dan Perlindungan Konsumen;

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui penerapan tiga pilar SNLKI sesuai dengan rencana, pelaksanaan *thematic surveillance* terhadap produk dan layanan SJK sesuai rencana dan persentase tingkat penyelesaian pengaduan konsumen.

6. Meningkatkan *Surveillance* Sistem Keuangan

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat kualitas pelaksanaan *surveillance* dan manajemen krisis OJK untuk mendukung Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) serta persentase tindak lanjut hasil koordinasi dengan BI dan Kemenkeu.

7. Mendorong Terwujudnya SJK Syariah yang Sehat dan Bertumbuh

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat pelaksanaan program akselerasi pertumbuhan syariah dan tingkat kualitas pelaksanaan *Outreach* SJK yang terintegrasi.

4.1.3 Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK

Dalam rangka mengakselerasi terwujudnya Sasaran Strategis, OJK menetapkan Inisiatif Strategis (IS), yaitu kegiatan yang bersifat proyek dengan jangka waktu tertentu, berdampak signifikan terhadap pencapaian Sasaran Strategis OJK, dibawah oleh satu atau lebih Anggota Dewan Komisioner yang ditunjuk sebagai pemilik (*Initiative Owner*), dan dilakukan secara lintas Satuan Kerja oleh satu atau lebih Satuan Kerja yang dikoordinasikan oleh Pegawai atau Satuan Kerja yang ditunjuk (*Initiative Coordinator*);

Sejalan dengan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal OJK maka di 2016 OJK menetapkan 8 IS, yaitu :

- a. **IS-1:** Membangun Reputasi dan Kredibilitas Institusi melalui Implementasi Program *Recycling*
- b. **IS-2:** Memperkuat Organisasi dalam rangka Mewujudkan Integrasi Pengaturan Sektor Jasa Keuangan
- c. **IS-3:** Menyusun dan Menyelaraskan Rancangan Undang Undang Terkait OJK dan Aturan Pelaksanaannya
- d. **IS-4:** Mewujudkan Kantor Regional dan OJK sebagai Mitra Strategis *Stakeholders* dalam Pengembangan Ekonomi Daerah
- e. **IS-5:** Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Fungsi Perizinan Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan
- f. **IS-6:** Mendorong Akselerasi Pertumbuhan Industri Jasa Keuangan Syariah di Indonesia
- g. **IS-7:** Mendorong Efisiensi dan Akselerasi Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*)
- h. **IS-8:** Mengembangkan Fungsi Penelitian dalam rangka mewujudkan *research-based policy*

4.2 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki komitmen tinggi dalam rangka mewujudkan kredibilitasnya di mata industri jasa keuangan. Wujud komitmen tersebut tercermin dalam upaya OJK menuju tata kelola yang baik. Melalui pelaksanaan beberapa program strategis, antara lain penanganan dan pencegahan anti fraud, pengelolaan risiko, pengendalian kualitas bisnis proses, dan pelaksanaan audit internal yang berfungsi untuk memastikan kualitas dan pengelolaan risiko atas proses bisnis di OJK dengan pendekatan *combined assurance*.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, Dan Pengendalian Kualitas

1. Pelaksanaan *Combined Assurance* (CA)

Combined Assurance OJK merupakan inisiatif yang bertujuan memastikan proses koordinasi yang seimbang dan efektif, diantara seluruh fungsi *assurance* (*assurance provider*). Sebagaimana tertuang dalam SEDK nomor 2/SEDK.06/2015, CA OJK dilakukan berlandaskan konsep *three lines of defense*, yakni:

a) *First Line* (Satuan Kerja Pemilik Risiko)

First Line melakukan *assurance* atas pelaksanaan proses kerjanya, mereviu kinerja, dan melaporkan seluruh kegiatan operasionalnya secara berkala.

b) *Second Line* (Satuan Kerja yang Mengkoordinasikan Pelaksanaan Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas)

Second Line berfungsi menyediakan kebijakan dan *tools* yang dibutuhkan oleh *first line*, mengkoordinasikan implementasi kebijakan dan *tools* yang disusun, serta melakukan validasi implementasi atas kebijakan dan *tools* yang disusun.

c) **Third Line (Satuan Kerja yang Melaksanakan Fungsi Audit)**

Third line berfungsi melakukan *assurance* dengan cara memberikan pelaporan dan opini secara *independent* mengenai kualitas proses bisnis *first line*, mereviu kinerja, dan melaporkan seluruh kegiatan operasionalnya serta kualitas *second line* dalam menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian kualitas.

Implementasi *combined assurance* selama triwulan I-2016 dilaksanakan melalui sembilan audit terkait perizinan terintegrasi, perizinan sektoral, pengawasan sektoral, pengelolaan pungutan, pengelolaan SDM, pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan keuangan, sistem informasi, penyelesaian pengaduan konsumen. Dari sembilan tema tersebut, terdapat dua tema yang selesai dilaksanakan yakni efektifitas tata kelola dan penanganan anggaran. Sementara untuk reviu kualitas, telah diselesaikan empat tema yakni pengawasan terintegrasi, pengaturan terintegrasi, pendalaman pasar dan akselerasi pertumbuhan SJK syariah.

2. Penanganan Anti Fraud

Dalam rangka membangun budaya anti gratifikasi, OJK mendorong seluruh jajaran dan pegawai OJK untuk melaporkan segala bentuk gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK melalui serangkaian kegiatan sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang dilakukan secara rutin.

Selama triwulan ini, tercatat adanya peningkatan yang cukup signifikan atas jumlah pelaporan gratifikasi oleh pegawai OJK. Hal ini terlihat dari laporan gratifikasi yang diterima pada akhir Desember 2015 sebanyak 11 laporan dan kemudian jumlah laporan gratifikasi yang diterima sampai akhir triwulan I-2016 meningkat hingga sebanyak 71 laporan.

Peningkatan jumlah laporan gratifikasi tersebut merupakan wujud adanya kesadaran dan inisiatif seluruh jajaran atau pegawai OJK untuk melaporkan segala bentuk gratifikasi ke UPG. Hal ini selaras dengan salah satu visi dan misi OJK untuk mewujudkan budaya anti gratifikasi di lingkungan OJK. Selanjutnya, UPG melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut dimana sebanyak 35 laporan telah ditetapkan status kepemilikannya baik oleh UPG OJK maupun KPK.

3. Profil Risiko OJK Wide Semester I 2016

Pada periode laporan, OJK menetapkan Profil Risiko OJK Wide Semester I-2016. Sejumlah 26 risiko menjadi prioritas penanganan risiko di OJK. Untuk memperlancar proses mitigasi risiko, Satuan Kerja mengumpulkan mitigasi risiko terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja. Mitigasi ini merupakan kontrol tambahan yang dilaksanakan untuk mengurangi level risiko yang telah diidentifikasi. Selama periode laporan, dilakukan *monitoring* realisasi mitigasi melalui data pelaporan dari masing-masing Satuan Kerja.

4. Pelaksanaan Control Self Assessment (CSA)

Berdasarkan Surat Edaran Dewan Komisiner OJK nomor 3/SEDK.06/2015 tentang sistem Pengendalian Internal, masing-masing Satuan Kerja menyusun dan melaksanakan proses pengendalian internal di lingkungannya. Untuk memastikan efektifitas pelaksanaan pengendalian internal tersebut, AIMRPK menyusun sebuah *tools* yang dinamakan *Control Self Assessment* (CSA). CSA bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi satuan kerja dalam pelaksanaan perbaikan proses pengendalian internal secara berkelanjutan.

Selama triwulan I-2016 telah dilakukan penyusunan kertas kerja CSA yang selanjutnya akan disosialisasikan pada triwulan II.

Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan *Good Governance* di OJK

1. Penyelenggaraan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) Forum 2016 dengan tema *Cyber Security Opportunities and Challenges*.

Komitmen OJK dalam upaya mencapai *good governance* diwujudkan dalam GRC Forum 2016 yang mengambil tema *cyber security Opportunities and Challenge*. Forum dimaksudkan untuk meningkatkan *awareness* akan ancaman *cyber attack* baik di lingkungan OJK maupun industri jasa keuangan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas produk sektor jasa keuangan diperlukan payung hukum yang memadai dan mampu menjawab kebutuhan dan melindungi antara konsumen dengan pelaku industri jasa keuangan. Selain itu diperlukan teknologi dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam menghadapi ancaman *cyber crime* dimaksud.



2. Pelaksanaan *Quality Officer* Forum 2016

Sebagai regulator industri jasa keuangan di Indonesia, OJK dituntut menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas dengan melaksanakan proses, sistem *governance*, dan manajemen OJK yang juga berkualitas. Untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa tujuan tersebut dapat tercapai maka diperlukan mekanisme Pengendalian Kualitas.

Selama triwulan I-2016, OJK melaksanakan *Quality Officer Forum* (QO Forum) dengan tema *Optimalisasi Peran Quality Officer dalam Penerapan Kualitas Satuan Kerja*. *Quality Officer* merupakan perwakilan Satuan Kerja yang

bertindak sebagai penanggung jawab dalam penerapan pengendalian kualitas. Melalui penyelenggaraan forum tersebut diharapkan masing-masing QO memiliki keseragaman pandangan dan pemahaman dalam menentukan standar kualitas dimasing-masing Satuan Kerjanya serta memberikan pembekalan dalam hal implementasi penyusunan laporan pengendalian kualitas dimaksud.

4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa Dewan Komisioner melaksanakan Rapat Dewan Komisioner (RDK) secara berkala. Selama triwulan I-2016, OJK melaksanakan Rapat Dewan Komisioner (RDK) sebanyak 14 kali dengan jumlah topik pembahasan sebanyak 43 topik.

Beberapa aturan yang mendukung paket kebijakan pemerintah kembali diputuskan dalam RDK periode triwulan I – 2016. Pada paket kebijakan V, pemerintah memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan revaluasi atas aktiva tetap. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Jumlah Penilai Publik yang terbatas belum mampu mengakomodir kebutuhan perusahaan dalam melakukan revaluasi atas aset tetap mereka. Agar kebijakan tersebut berjalan optimal, OJK menerbitkan POJK tentang Pendaftaran Penilai Pemerintah untuk Tujuan Revaluasi Aset bagi BUMN atau BUMD yang Melakukan Penawaran Umum di Pasar Modal. POJK ini memberikan ruang bagi Penilai Pemerintah untuk melakukan penilaian atas aset yang dimiliki oleh BUMN dan BUMD. Keberadaan Penilai Pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia diharapkan menjadi solusi adanya ketimpangan antara jumlah Penilai Publik dengan jumlah BUMN dan BUMD yang tersebar di seluruh Indonesia.

RDK pada triwulan ini juga menyetujui pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi

Keuangan (SNLIK) 2016. Salah satu tujuan dilakukan survei untuk memberikan data terkini mengenai tingkat literasi dan inklusi kelompok masyarakat Indonesia terhadap industri jasa keuangan. Selain inisiatif diatas, RDK juga membahas beberapa hal yaitu mengenai *Systemically Important Bank* (SIB), hasil uji kemampuan dan kepatutan di industri perbankan dan non bank dan pencabutan ijin usaha bank.

Terkait dengan kebijakan internal OJK, pada triwulan I-2016 RDK memutuskan pembentukan Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi di OJK. Pembentukan Satuan Kerja tersebut diharapkan semakin memperkuat fungsi OJK sebagai lembaga yang diamanatkan oleh konstitusi untuk dapat menyelenggarakan sistem pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di OJK, RDK harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Salah satu upaya untuk menjaga efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan RDK, Dewan Komisioner dapat menyelenggarakan forum lain yang

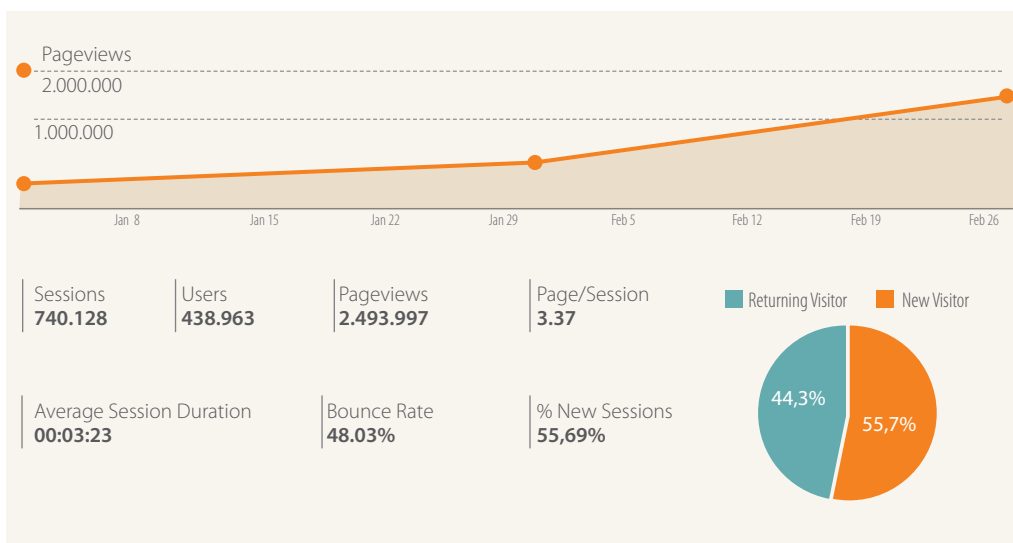
dihadiri oleh Dewan Komisioner yaitu forum *Board Seminar*. Dalam aturan tentang tata cara penyusunan aturan di OJK, materi yang bersifat pengaturan wajib dibahas terlebih dahulu pada forum Board Seminar.

4.4 KOMUNIKASI

4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

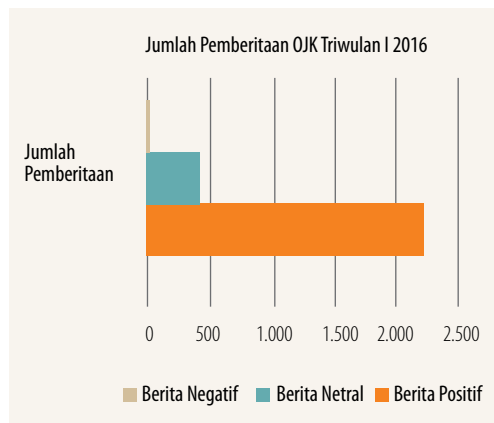
Selama periode laporan, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, dan *Youtube*. Adapun jumlah halaman media *online* yang dikunjungi mengalami peningkatan yang signifikan dibanding triwulan sebelumnya. *Website* OJK telah dikunjungi sebanyak 2.493.997 *pageviews* (naik 40,2%); jumlah *follower* akun *twitter* OJK sebanyak 15.943 *followers* (naik 17,4%), serta 91.722 *views* pada *channel youtube* OJK (naik 24,6%).

Grafik IV - 2 Statistik Pengunjung Website OJK



Terkait pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisa kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media. Analisa dilakukan melalui *monitoring* terhadap *tone* berita mengenai OJK dan Industri Keuangan secara umum, serta berita mengenai OJK pada 25 media cetak, 30 media *online*, 11 stasiun televisi nasional, TV daerah terpilih, dan media sosial (*Facebook, Twitter, Youtube*). Selama periode laporan, terdapat 2.676 pemberitaan terkait OJK. Dari jumlah tersebut, *tone* media sebagian besar bersifat positif, dengan proporsi positif sebesar 82,8% (2.216 berita), netral 16,8% (451 berita), dan negatif 0,3% (9 berita). Materi pemberitaan didominasi oleh pemberitaan terkait program percepatan akses keuangan daerah, rencana pemberian insentif bank terkait *Net Interest Margin* (NIM), program LAKU PANDAI, dan kerjasama OJK dengan berbagai lembaga negara lain.

Grafik IV - 3 *Tone* Pemberitaan Triwulan I 2016



Terkait dengan relasi media, selama triwulan I-2016 OJK menerbitkan 27 siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk mengumumkan program atau kegiatan OJK, peraturan terbaru OJK, atau isu lainnya terkait dengan pelaku Industri Jasa Keuangan yang memiliki nilai berita agar dapat dipublikasikan di media massa. Adapun judul siaran pers yang telah diterbitkan oleh OJK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV - 1 Judul Siaran Pers Triwulan I-2016

No.	Judul Siaran Pers	Tempat	Tanggal
1	OJK Resmikan Layanan Keuangan Masyarakat Bank Sinarmas Di Desa Tegalrejo Magelang Jawa Tengah	Magelang	08-Jan-16
2	OJK Relaksasi Aturan Perizinan LKM	Jakarta	08-Jan-16
3	OJK Keluarkan Izin Usaha Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	Jakarta	13-Jan-16
4	Peresmian Kantor OJK Solo Dan Aktivasi Gerai Pusat Edukasi, Layanan Konsumen & Akses Keuangan UMKM (PELAKU)	Solo	14-Jan-16
5	Pencabutan izin usaha PT. BPR Agra Arthaka Mulya, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul	Yogyakarta	14-Jan-16
6	Pertemuan Presiden Dengan Industri Jasa Keuangan Di Istana Negara OJK Dorong Program Percepatan Akses Keuangan Daerah	Jakarta	15-Jan-16
7	OJK Arahkan Industri Jasa Keuangan Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkatkan Daya Saing (Pertemuan Tahunan OJK Dengan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2016)	Jakarta	15-Jan-16
8	OJK Dorong Pengembangan Pasar Repo di Indonesia	Jakarta	29-Jan-16
9	OJK dan Kementerian ESDM Jalin Kerjasama Pengembangan Energi "OJK Dorong Industri Jasa Keuangan Perbesar Pembiayaan di Sektor Energi"	Jakarta	03-Feb-16
10	BI, MA dan OJK Perkuat Koordinasi dan Kerjasama Peningkatan Wawasan Hakim	Jakarta	22-Feb-16
11	Indonesia Siap Laksanakan Program Asesmen Sektor Keuangan	Jakarta	22-Feb-16
12	OJK Giatkan Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah	Jakarta	25-Feb-16
13	OJK Dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Jalin Kerjasama Pengembangan Keuangan Mikro Syariah	Jakarta	29-Feb-16
14	OJK Gelar Keuangan Syariah Fair 2016, Luncurkan SiKompak dan Standar Produk Keuangan Syariah	Jakarta	03-Mar-16
15	OJK Dorong Pembiayaan Infrastruktur Melalui Sukuk	Jakarta	03-Mar-16
16	Dorong Perizinan dan Pelaporan Secara Elektronik, OJK Launching Aplikasi Sistem Informasi Perijinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) dan Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan Pembiayaan (SIPP)	Jakarta	08-Mar-16
17	OJK Jalin Kerjasama dengan KPK Tingkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Jasa Keuangan	Jakarta	10-Mar-16
18	OJK Luncurkan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro Dan Inklusi	Jakarta	15-Mar-16

No.	Judul Siaran Pers	Tempat	Tanggal
19	OJK Tetapkan 23 Emiten Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan	Jakarta	16-Mar-16
20	OJK Dorong Bank Optimalkan Layanan Digital	Jakarta	17-Mar-16
21	OJK Kembangkan Kerjasama dengan Australia	Jakarta	18-Mar-16
22	Industri Jasa Keuangan Tunjukkan Komitmen Kuat Kembangkan Perlindungan Konsumen	Jakarta	22-Mar-16
23	OJK Jalin Kerjasama Dengan Bank Sentral Timor Leste	Dili, Timor Leste	23-Mar-16
24	Peresmian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Selatan Sebagai TPAKD Yang Pertama Kali Terbentuk Di Indonesia	Jakarta	23-Mar-16
25	OJK Resmikan Perluasan Layanan Bank Mandiri Di Timor Leste	Dili, Timor Leste	23-Mar-16
26	OJK Gelar <i>Governance, Risk, and Compliance Forum 2016 "Cyber Security: Oppourtunities And Challenges"</i>	Jakarta	29-Mar-16
27	OJK Meningkatkan Kerjasama Di Tingkat Regional Melalui Penandatanganan <i>Letter Of Intent</i> dengan Bank Of Thailand (BOT)	Bangkok, Thailand	31-Mar-16

Selain itu OJK juga menyelenggarakan jumpa pers sebanyak enam kali. Topik jumpa pers triwulan I-2106 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV - 2 Jumpa Pers Triwulan I 2016

No	Tanggal	Nama Kegiatan
1	08-Jan-16	OJK Relaksasi Aturan Perizinan LKM
2	22-Feb-16	BI, MA dan OJK Perkuat Koordinasi dan Kerjasama Peningkatan Wawasan Hakim
3	25-Feb-16	OJK Giatkan Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah
4	08-Mar-16	Dorong Perizinan dan Pelaporan Secara Elektronik, OJK <i>Launching</i> Aplikasi Sistem Informasi Perijinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) dan Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan Pembiayaan (SIPP)
5	15-Mar-16	OJK Luncurkan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro Dan Inklusi
6	22-Mar-16	Industri Jasa Keuangan Tunjukkan Komitmen Kuat Kembangkan Perlindungan Konsumen

OJK mengadakan *media gathering* dan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai sarana tatap muka dan diskusi antara jurnalis dengan OJK. Kegiatan tersebut berfungsi sebagai sarana untuk menjalin hubungan baik. Di samping kegiatan tersebut, OJK juga mengadakan kegiatan pelatihan jurnalistik kepada wartawan. Adapun materi pelatihan yang diberikan khususnya mengenai ekonomi, sistem keuangan Indonesia, sistem perbankan nasional, sistem pasar modal Indonesia, sistem keuangan non bank nasional, teknik penulisan artikel dan berita ekonomi, dan fungsi serta peran OJK.

Tabel IV - 3 *Media Gathering, Focus Group Discussion, dan Pelatihan Jurnalistik Triwulan I 2016*

No.	Tanggal	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
1	13-14 Februari 2016	<i>Media Gathering</i> dan Kunjungan Agen Laku Pandai Cirebon	32
2	28-31 Maret 2016	Pelatihan Wartawan Daerah di NTT " <i>OJK Goes to East</i> "	30
3	15-17 April 2016	FGD dan <i>Media Gathering</i> Redaktur/Wartawan di Bandung	24

4.4.2 Kunjungan Instansi

Sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan program edukasi terhadap masyarakat, OJK menerima kunjungan masyarakat (instansi, lembaga pendidikan, dan sebagainya). Permintaan kunjungan dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan kunjungan beserta waktu dan topik yang diinginkan ke *email* visitobjk@ojk.go.id. Hingga periode triwulan I-2016 berakhir, OJK menerima 16 kunjungan instansi dengan total 1.075 peserta sebagai berikut:

Tabel IV - 4 Kunjungan Instansi Triwulan I 2016

No.	Tanggal	Institusi	Peserta	Tema
1	5 Januari 2016	Institute of Social Moral Management Education and Development	50	OJK Wide
2	18 Januari 2016	Himpunan Mahasiswa Matematika Universitas Parahyangan	44	Implementasi Matematika dalam SJK
3	19 Januari 2016	Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	50	Praktik Bisnis dalam skala besar & menengah
5	2 Februari 2016	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)	51	OJK Wide
8	17 Februari 2016	FSI FEB Universitas Indonesia	90	Perbankan Syariah
9	15 Februari 2016	Prasetya Mandiri group (School of Business)	147	OJK Wide
10	25 Februari 2016	Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Sangga Buana Bandung	150	Implementasi Akuntansi dalam lembaga
11	3 Maret 2016	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung	60	Pengaturan Perbankan Konvensional dan Syariah
12	3 Maret 2016	Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan	106	OJK Wide (Peran EPK dan Pengawasan)
13	8 Maret 2016	SMK Negeri 1 Nglipar Gunungkidul	70	Implementasi Akuntansi dalam lembaga
14	24 Maret 2016	Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia	82	Implementasi Akuntansi dalam lembaga
15	29 Maret 2016	Fakultas Agama Islam Universitas Suryakencana	100	OJK Wide
16	31 Maret 2016	Himpunan Mahasiswa Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Indonesia	75	Mengenal Lebih Dekat Fungsi dan Peran Ojk

4.4.3 Penghargaan

Selama periode laporan OJK meraih *The 1st PR INDONESIA Media Relations Awards & Summit (PRIMAS) 2016* untuk kategori Lembaga Negara dengan *Media Exposure* terbaik. Penghargaan ini diberikan oleh Majalah PR Indonesia bekerjasama dengan PT Isentia.

Acara tersebut digelar untuk mengapresiasi kementerian, lembaga, BUMN, dan swasta yang memiliki eksposur pemberitaan terbanyak di tahun 2015. Metode penentuan pemenang dilakukan dengan melakukan *monitoring* atas pemberitaan di media cetak yang dilakukan oleh PT Isentia. Hasil *monitoring* dipilih Tim Juri PR Indonesia untuk ditentukan peringkatnya.

Sebanyak 40 lembaga yang terdiri dari 10 kementerian, 10 lembaga negara, 10 BUMN, dan 10 perusahaan swasta meraih penghargaan tersebut. Pemberian penghargaan dihadiri oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Niken Widyastuti, Dirut Garuda Indonesia M. Arif Wibowo, Dirut Telkomsel Ririk Ardiansyah, dan Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulisty.

Gambar IV - 1

Piagam Penghargaan *The 1st PR INDONESIA Media Relations Awards & Summit (PRIMAS) 2016*



4.5 KEUANGAN

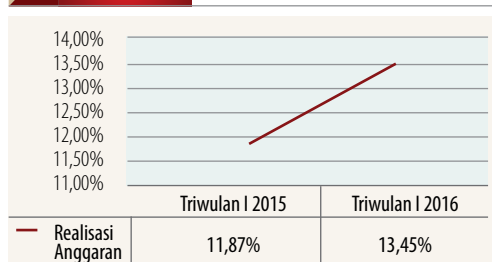
4.5.1 Anggaran dan Penggunaan

Berdasarkan Undang Undang OJK no 21 Tahun 2011 pasal 34, anggaran OJK dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pada periode 2013–2015, sumber dana OJK masih menggunakan APBN dan pungutan. Namun demikian, di 2016 sumber pembiayaan OJK sepenuhnya berasal dari pungutan yaitu sebesar Rp. 3.934 miliar. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban APBN, sehingga APBN dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan atau infrastruktur lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, serta *destination statement*, OJK terus meningkatkan *governance* dalam penggunaan anggaran dalam mendukung kegiatan operasional. Penggunaan anggaran OJK menggunakan prinsip efisiensi dan efektivitas antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapatkan oleh organisasi.

Sampai akhir triwulan I-2016, realisasi anggaran OJK sebesar 13,4% atau sebesar Rp. 528,2 miliar. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan Triwulan I-2015 yang hanya sebesar 11,9%. Peningkatan realisasi tersebut merupakan indikator bahwa OJK lebih optimal dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program kerja yang telah disusun.

Gambar IV - 2 Realisasi Anggaran



4.5.2 Pengembangan Sistem Keuangan Internal

Sebagai wujud peningkatan kualitas, akuntabilitas dan kelancaran pengelolaan keuangan di internal, OJK melakukan beberapa program strategis dalam penyelesaian ketentuan internal terkait pelaksanaan pencairan dan pertanggungjawaban dana Otoritas Jasa Keuangan (OJK), revisi anggaran, dan pedoman akuntansi. Selain itu, sejalan dengan kemandirian sumber pendanaan OJK yang berasal dari pungutan, telah disusun Keputusan Anggota Dewan Komisiner (KADK) mengenai Pembentukan tim gugus tugas Penerapan Budaya Efisiensi di Otoritas Jasa Keuangan.

4.6 SISTEM INFORMASI

OJK berkomitmen dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam mengatur dan mengawasi Industri Jasa Keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal maupun IKNB. Untuk meningkatkan dukungan terhadap tugas OJK, termasuk dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pelaksanaan pungutan dari sektor industri Jasa Keuangan, maka pada triwulan I-2016 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

4.6.1 Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

a) Sistem Perizinan Terintegrasi (*Bancaassurance*)

Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (*Bancassurance*) merupakan jenis perizinan interkoneksi antara bidang perbankan dengan bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang memiliki frekuensi tinggi dan high impact. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu proses perizinan dan mengurangi

frekuensi korespondensi serta memudahkan pihak eksternal untuk memantau proses permohonan.

b) Sistem Informasi *Banking Surveillance Dashboard* (BSD)

Sistem Informasi *Banking Surveillance Dashboard* merupakan sistem informasi yang membantu dalam mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyajikan data dan informasi secara *agregat*/makro terkait kondisi perbankan. Sistem ini bertujuan sebagai alat deteksi dini dalam mengidentifikasi risiko dan masalah potensial perbankan secara umum (*surveillance tools*) dan memberikan informasi kondisi perbankan terkini.

c) Sistem Informasi Pelaporan Perkembangan Penyelenggaraan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Sistem ini dibangun untuk menyediakan media bagi Bank penyelenggara Laku Pandai untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan penyelenggara Laku Pandai setiap Triwulan secara *online*. Melalui sistem ini, pemantauan perkembangan program Laku Pandai dapat dilakukan setiap triwulan.

d) Pengembangan Sistem Aplikasi untuk Pengawasan dan *Monitoring* OJK

Pada periode laporan, OJK juga mengembangkan sistem aplikasi untuk pengawasan dan *monitoring* OJK antara lain (i) Pengembangan Sistem Informasi *Risk Based Supervision* (SIRIBAS); (ii) Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro (SI LKM); (iii) Pengembangan Sistem *Monitoring* Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (SIKARIN); (iv) Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal Terpadu (SIPM); (v) Sistem Informasi Perbankan modul Data Keuangan; (vi) Aplikasi Pelaporan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR); dan (vii) Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT).

4.6.2 Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi

a) Sistem Kegiatan *Review* dan Pendampingan Auditor Eksternal (SI META)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas audit oleh auditor eksternal dibutuhkan suatu sistem yang dapat memastikan efektivitas dan efisiensi proses *monitoring*. Sistem ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pendampingan auditor eksternal.

b) Pembangunan Sistem Aplikasi internal OJK

Selain mengembangkan aplikasi yang digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan dan monitoring, OJK juga mengembangkan aplikasi internal antara lain (i) Aplikasi Administrasi dan Manajemen Penyidikan; (ii) Sistem Informasi Ketentuan Perbankan; (iii) Survei Dunia Usaha; (iv) Aplikasi Statistika Pasar Modal (PM); (v) Sistem Informasi Rahasia Bank; (vi) Sistem Informasi Penatausahaan Aset; (vii) Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Terintegrasi (SAKTI OJK).

4.7 LOGISTIK

Salah satu fokus kegiatan OJK di 2016 adalah penyediaan fasilitas ruang kerja serta gedung kantor, baik pusat maupun daerah. OJK memerlukan sarana ruang kantor dengan luasan dan lokasi yang memadai dan representatif dalam menunjang efektifitas dan kelancaran operasional pelaksanaan wewenang, fungsi dan tugas pokoknya.

4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat

Upaya percepatan penyelesaian pembangunan gedung *Finance Center* oleh Kementerian Keuangan yang digunakan OJK sebagai kantor pusat terus dilakukan. Sampai akhir triwulan I-2016, pembangunan gedung dimaksud masih dalam proses persetujuan permohonan

pelaksanaan Bangun Guna Serah (BGS) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang Milik Negara. Pembangunan diperkirakan untuk dilaksanakan pada awal 2017 dan selesai dilaksanakan pada awal 2020.

Selain mengupayakan percepatan pembangunan gedung *Finance Center*, OJK juga melakukan survei dan kajian terhadap lokasi Gedung Kantor lainnya yang menjadi alternatif untuk digunakan sebagai Gedung Kantor Pusat OJK, dan juga sebagai solusi untuk mengantisipasi penambahan pegawai serta penambahan kebutuhan ruang kantor dalam waktu dekat.

4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

Berkaitan dengan *progress* penyediaan Gedung Kantor, sampai dengan triwulan I-2016, terdapat 15 kantor yang berdiri secara mandiri antara lain:

1. Kupang	9. Lampung
2. Palangkaraya	10. Papua
3. Purwokerto	11. Solo
4. Tegal	12. Tasikmalaya
5. Ambon	13. Jember
6. Di Yogyakarta	14. Bengkulu
7. Kediri	15. Makassar
8. Kendari	

Selain itu, terdapat sembilan kantor OJK yang saat ini sudah melakukan tahap sewa dan proses penataan antara lain Palu, Denpasar, Banjarmasin, Bandung, Jambi, Batam, Banda Aceh, Semarang dan Palembang. Kantor-kantor tersebut akan siap beroperasi pada Semester 1-2016

4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

Selama periode laporan, OJK menyusun *Road Map* pemenuhan gedung kantor pusat dan gedung kantor daerah, yang merupakan

perencanaan jangka panjang dimana OJK menargetkan pada 2020 seluruh kantor daerah dan kantor pusat telah memiliki kantor dengan status seluruhnya kepemilikan OJK.

4.8 SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI

4.8.1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan

Dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia selama triwulan I-2016 OJK telah melaksanakan hal – hal sebagai berikut:

I. Pemenuhan Sumber Daya Manusia

Pemenuhan Internal

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai di Satuan Kerja (Satker) dan pengembangan karir pegawai, OJK melakukan pemenuhan secara internal melalui promosi mutasi, mutasi, rotasi. Prinsip pemenuhan internal adalah menempatkan pegawai yang *fit* di jabatan yang lowong. Metode pemenuhan internal yang digunakan adalah mekanisme *Job Opening*/telang jabatan. Pemenuhan internal dilakukan secara lintas Bidang dalam rangka mendukung integrasi/sinergi dalam OJK. Selama triwulan I-2016, realisasi pemenuhan internal baik melalui promosi, rotasi dan mutasi dilakukan untuk level jabatan Direktur ke atas dan Deputi Direktur ke bawah dengan jumlah posisi yang dipenuhi 1170 posisi.

Pemenuhan Eksternal

Pemenuhan kebutuhan pegawai yang tidak dapat dipenuhi secara internal, dipenuhi melalui pemenuhan eksternal antara lain melalui:

1) Rekrutmen Sumber Umum

Berdasarkan Perencanaan Sumber Daya Manusia 2016, telah diputuskan penerimaan pegawai sejumlah 609 pegawai yang terdiri dari 163 Pegawai

Calon Kepala Sub Bagian dan 446 Pegawai Calon Staf. Penerimaan pegawai tersebut sebagian besar diproyeksikan untuk menggantikan pegawai Bank Indonesia yang kembali ke Bank Indonesia. Proses perekrutan dilakukan dengan dua metode yaitu *affirmative action* di 14 daerah yaitu Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat serta menggunakan jasa *recruitment specialist*.

2) Rekrutmen melalui PKWT

Selain melakukan rekrutmen dengan sumber umum, OJK juga melaksanakan proses seleksi penerimaan melalui tenaga kerja PKWT menjadi pegawai tetap OJK dengan tahapan Psikotes (tertulis, FGD dan Wawancara) dan *Assessment Center* (khusus level Jabatan Kepala Sub Bagian) dengan jumlah 296 orang yang sebagian besar merupakan pemenuhan level pegawai Tata Usaha.

4.8.2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia tercermin dari motivasi bekerja dan kinerja yang tinggi. Untuk menjaga agar motivasi dan kinerja Sumber Daya Manusia di OJK dalam kondisi yang baik, maka OJK menetapkan kebijakan mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), yang terdiri dari perencanaan, pemenuhan, pemetaan, pengembangan, dan pemeliharaan Sumber Daya Manusia. Sejalan dengan hal tersebut, dalam melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Sumber Daya Manusia perlu didukung dengan sistem informasi yang mutakhir sehingga pengelolaan Sumber Daya Manusia dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

1) Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia

Sepanjang triwulan I-2016 terdapat beberapa kebijakan terkait dengan MSDM yang telah ditetapkan, yaitu:

- a) Kebijakan terkait struktur penghasilan di Otoritas Jasa Keuangan.
- b) Kebijakan yang terkait dengan fasilitas kesehatan paska kerja

2) Sistem Informasi Sumber Daya Manusia

Pada triwulan I-2016, dilakukan peluncuran Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan (SIMFOSIA). SIMFOSIA merupakan sistem informasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan data organisasi dan sumber daya manusia OJK berdasarkan sistem MSDM yang memenuhi kebutuhan perencanaan, pemenuhan, pemetaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Melalui penerapan SIMFOSIA diharapkan proses pengelolaan dan manajemen SDM akan lebih mudah, transparan, dan efisien.

4.8.3 Pengembangan Organisasi

Selama triwulan I-2016 terdapat beberapa perubahan mendasar dalam struktur organisasi OJK, antara lain:

- a) Penguatan Kantor Regional dan Kantor OJK
- b) Penataan OJK *Institute*
- c) Penguatan fungsi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Penguatan Kantor Regional dan Kantor OJK

Penguatan organisasi KR-KOJK dilakukan melalui pelaksanaan beberapa program strategis, yaitu:

- a) Mewujudkan KR-KOJK menjadi menjadi sarana pendukung strategis pelaksanaan

- fungsi dan tugas pokok OJK secara nasional (*networking support*).
- b) Setiap provinsi di Indonesia memiliki kantor OJK dengan tipe kantor yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah.
 - c) Penyusunan bentuk organisasi KR-KOJK disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi implementasi yang telah diputuskan Dewan Komisiner.
 - d) Pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan nonbank (pengawasan pasar modal dan IKNB) akan diimplementasikan di masing-masing KR-KOJK secara bertahap.
 - e) Impelementasi inisiatif penataan organisasi KR-KOJK dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan perkembangan strategi di Kantor Pusat.

Seiring dengan pelaksanaan program tersebut, terdapat perubahan struktur serta jumlah KR-KOJK, yakni dari 6 KR menjadi 9 KR dan dari 29 KOJK menjadi 37 KOJK. Pembentukan 11 KOJK akan berlangsung sampai akhir 2017. Dalam proses ini juga dibentuk jabatan baru yakni Deputy Komisiner Manajemen Strategis IIC yang berfungsi melakukan koordinasi pelaksanaan tugas operasional (non pengawasan, perizinan, edukasi dan perlindungan konsumen) Kantor Regional dan Kantor OJK.

Penataan OJK *Institute*

Pada triwulan I-2016, OJK *Institute* mengalami penguatan organisasi dan perluasan fungsi. Mengacu pada Peraturan Dewan Komisiner nomor 12 /PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, fungsi Grup Pengembangan dan Pengelolaan OJK *Institute* meliputi *Research Center*, *Assessment Centre*, *Talent Pool*, *Financial Library* dan Museum OJK, serta pengelolaan *learning center*. Sejak 22 Desember 2015, fungsi OJK *Institute* diperluas dengan menambahkan fungsi pengembangan keuangan mikro dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor jasa keuangan (SJK) melalui program *recycling OJK*.

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

OJK berperan aktif dalam pencegahan TPPU-TPPT dengan tujuan melindungi LJK dan masyarakat secara keseluruhan. *International Monetary Fund* memberi rekomendasi kepada OJK agar pengawasan terhadap aktivitas TPPU/TPPT dilakukan secara tersendiri (independen) dan mendapatkan porsi yang lebih besar, serta tidak menjadi bagian dari pengawasan risiko operasional seperti yang saat ini diterapkan oleh OJK. Menyikapi hal tersebut, OJK membentuk Satuan Kerja tersendiri yaitu Grup Penanganan APU-PPT yang berada dibawah Deputy Komisiner Manajemen Strategis IC.

4.9 OJK INSTITUTE

Program pengembangan SDM difokuskan untuk penguatan *service excellence* dalam mencapai sasaran program transformasi OJK 2014 – 2017, dengan tetap mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaannya. Upaya mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan OJK *Institute* melalui berbagai program sebagaimana telah ditetapkan dalam Sistem Pengembangan OJK yang meliputi: (1) Program Pengembangan Kepemimpinan; (2) Program Pengembangan Kompetensi; (3) Program Pendidikan Formal; (4) Program Pengenalan untuk Calon Pegawai; (5) Program Internalisasi Kultur; (6) Program Bimbingan; dan (7) Program Penugasan Pegawai.

Selama triwulan I-2016, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

4.9.1 Program Pengembangan Kepemimpinan

Program ini bertujuan mempersiapkan pegawai menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih

tinggi ini. Sepanjang 2016, akan dilaksanakan untuk empat level jabatan berbeda. Pada triwulan pertama dilaksanakan Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB) level pertama *batch* pertama dengan 40 peserta setingkat Kepala Sub Bagian.

4.9.2 Program Pengembangan Kompetensi

Program Pengembangan Kompetensi (PPK) pegawai baik untuk kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*), berdasarkan kebutuhannya dapat dikategorikan antara lain PPK Luar Negeri (PPKLN) dan PPK Dalam Negeri (PPKDN) yang terdiri dari PPKDN dalam bentuk *In-House Training* (IHT) dan PPKDN dalam bentuk Non-IHT

Untuk PPKLN, sepanjang triwulan I-2016 tercatat 19 pegawai melaksanakan pengembangan di luar negeri, dengan rincian 14 pegawai untuk pengembangan teknis (*hard skill*) dan tiga pegawai mengikuti pengembangan kepemimpinan (*leadership*), serta dua pegawai mengikuti kegiatan *benchmarking*. Untuk PPKDN dengan format IHT sepanjang triwulan I-2016, dilaksanakan program pengembangan teknis (*hard skill*) dengan peserta mencapai 527 pegawai. Sementara itu, untuk program pengembangan perilaku (*soft skill*) mencapai 659 pegawai. Adapun untuk PPKDN Non-IHT, sebanyak 147 pegawai telah melaksanakan program pengembangan teknis, dan 32 pegawai untuk program pengembangan perilaku.

4.9.3 Program Pendidikan Formal

Program Pendidikan Formal (PPF) merupakan bentuk pengembangan pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 maupun Strata-3. Sepanjang triwulan I-2016, tercatat tiga pegawai yang mulai melaksanakan PPF

menggunakan skim-1 (beasiswa penuh dari OJK). Adapun untuk skim-2 (beasiswa dari pihak lain dengan *top up* fasilitas dari OJK), yaitu atas beasiswa Australia Awards Scholarship (AAS) sebanyak 4 pegawai melaksanakan *pre-departure training*.

4.9.4 Program Asesmen

Sepanjang triwulan pertama I-2016, OJK telah melaksanakan assessment terhadap 28 Direktur.

4.10 MANAJEMEN PERUBAHAN

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi OJK serta *Destination Statement* 2017, OJK menyelesaikan sejumlah program dan melaksanakan kegiatan terkait manajemen perubahan dan budaya organisasi. Sesuai *Road Map* dan *Action Plan* Program Transformasi Manajemen Perubahan 2014-2017, seluruh kegiatan difokuskan dalam rangka memenuhi tema *Providing Service Excellence* dengan penguatan nilai Sinergi, Inklusif dan Visioner. Untuk mencapai sasaran Program Transformasi OJK 2014-2017, OJK mencanangkan 2016 sebagai tahun penguatan nilai Sinergi, Inklusif dan Visioner dengan tema tahunan pelaksanaan program budaya yang menitikberatkan pada peningkatan level pelayanan OJK bagi para pemangku kepentingan (*service excellence*).

Selama 2016, OJK menetapkan tiga program budaya nasional dan satu program budaya spesifik. Program budaya nasional merupakan program yang dirancang dan diinisiasi secara sentralisasi di kantor pusat. Program ini wajib diimplementasikan oleh setiap Satuan Kerja di lingkungan OJK. Adapun program budaya nasional terdiri dari "OJK Ramah", "OJK Cerdas", dan "OJK Sehat". Sementara itu, program budaya spesifik adalah "OJK Gesit" yang merupakan program budaya kerja yang didesain secara mandiri dan dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja.

Kegiatan program budaya dan perubahan yang berhasil dijalankan selama triwulan I-2016 adalah:

1. Change Partner Forum 2016

Change Partner Forum 2016 merupakan forum komunikasi transformasi yang melibatkan para *Change Partners* dari seluruh satuan kerja OJK. Forum ini bertujuan untuk memfinalisasi dan mensosialisasikan program budaya 2016, prosedur monitoring dan evaluasi program budaya serta rencana penggunaan anggaran budaya yang dilaksanakan sepanjang 2016. Forum tersebut juga memfasilitasi pembekalan teknis bagi para *Change Partners* dalam mengelola program, *monitoring* dan media komunikasi perubahan di satuan kerja.

2. Change Agent Forum 2016

Change Agents merupakan Insan OJK yang ditugaskan membantu *Change Partners* dalam mengeksekusi program-program budaya OJKWay di setiap satuan kerja. *Change Agent Forum 2016* merupakan forum komunikasi dan *sharing* yang mempertemukan perwakilan *Change Agents* dari seluruh satuan kerja. Dalam forum tersebut, para *Change Agents* menerima pembekalan teknik komunikasi untuk membantu mereka dalam mengimplementasikan dan mengeksekusi program-program perubahan dan budaya di masing-masing satuan kerja.

3. Change Leader Forum – High Level

Change Leader Forum – High Level merupakan forum transformasi budaya dan internalisasi nilai-nilai strategis yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisiner, Deputi Komisiner, Kepala Departemen, Kepala Kantor Regional dan Kepala Kantor OJK di seluruh Indonesia. Dalam forum ini, seluruh *Change Leaders* menandatangani program *charter* OJK 2016 guna mempertegas komitmen pelaksanaan program budaya yang akan dilaksanakan.

4. OJK Leadership and Change Sharing Forum

Dalam rangka mengakselerasi proses internalisasi budaya *service excellence* sekaligus mengubah paradigma birokrasi yang terkesan kaku dan lambat, OJK menyelenggarakan *OJK Leadership and Change Sharing Forum*, yaitu forum diskusi dan *knowledge sharing* bagi para *Change Leader* di lingkungan Kantor Pusat OJK. Acara ini menghadirkan narasumber eksternal yang berbagi pengalaman mengenai tantangan yang dihadapi oleh masing-masing korporasi agar dapat *survive* dan sukses dalam industri bisnis nasional.

5. Inisiasi Program Budaya OJK bagi Sekretaris dan Frontliners OJK

OJK menyelenggarakan kegiatan Inisiasi Program Budaya OJKWay kepada para Sekretaris dan *Frontliners*. Sebagai salah satu bagian ujung tombak organisasi, OJK menyadari bahwa para Sekretaris dan *Frontliners* perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan yang sama terkait program budaya OJKWay 2016 untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja OJK yang berbasis *service excellence*.

Di bidang *monitoring*, OJK menjalankan sejumlah kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan memantau *progress* implementasi program-program perubahan dan budaya yang dilaksanakan, diantaranya yaitu:

1. Monitoring Program Budaya 2016

OJK memberikan kesempatan kepada satuan kerja untuk melakukan penilaian pelaksanaan program budaya melalui metode *self-assessment* yang didukung bukti-bukti pelaksanaan program budaya. Penilaian dan pengumpulan bukti-bukti dilakukan secara *online* melalui aplikasi *dashboard monitoring system* (ojkway.com) dan dapat diakses oleh seluruh satuan kerja.

2. On-Site Monitoring dan Mystery Call

Selain melalui pelaporan pelaksanaan program budaya OJK yang dilakukan

secara *self assessment*, dilakukan kunjungan langsung (*on-site monitoring*) ke seluruh Satuan Kerja. Pelaksanaan *on-site monitoring* ini dilaksanakan bekerja sama dengan pihak eksternal untuk mengetahui validitas data laporan *self assessment* yang telah disampaikan setiap Satuan Kerja.

Di bidang media komunikasi, OJK melakukan sejumlah pengembangan dan penyempurnaan media kampanye program budaya diantaranya:

1. Penerbitan Majalah Integrasi

Majalah Integrasi merupakan media komunikasi internal OJK yang diterbitkan untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan terkait program perubahan dan budaya serta pencapaian-pencapaian yang telah diraih OJK dalam periode penerbitan. Selama 2016, frekuensi penerbitan Majalah Integrasi menjadi setiap bulan. Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan dua edisi reguler Majalah Integrasi yaitu pada bulan Januari dan Februari serta satu edisi khusus Majalah Integrasi yaitu di bulan Maret 2016.

2. Pesan Ketua DK dan Pesan ADK

Seperti periode sebelumnya, OJK

melanjutkan penyebaran Pesan Ketua Dewan Komisioner dan Pesan ADK melalui *e-mail blast* ke seluruh Insan OJK secara periodik setiap bulannya.

3. TV Monitor

OJK juga melakukan penyempurnaan materi komunikasi yang disampaikan melalui TV Monitor yang disiarkan di setiap lantai di Gedung Sumitro Djojohadikusumo. Materi yang ditayangkan mencakup nilai-nilai strategis OJK (INPRESIV), penjelasan mengenai program budaya nasional dan spesifik yang akan dilaksanakan di 2016 dan kegiatan/program kerja yang tengah dikampanyekan oleh satuan kerja lain.

4. Pengembangan Media Kampanye Perubahan

OJK mengembangkan dan mengintensifkan berbagai media komunikasi internal seperti poster, *screen saver*, *standing banner*, *lift sticker*, *Video Service Excellence*, *Video Testimoni Insan OJK*, dan *Motion Graphics Program Budaya OJKWay 2016*. Seluruh sarana komunikasi tersebut digunakan untuk mengkampanyekan nilai-nilai strategis OJK dan menyampaikan program transformasi budaya yang tengah dilaksanakan di OJK.

